



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

ISSN 3047-0994



kfr



kajian fiskal regional

Provinsi Sumatera Selatan

Volume 8 Nomor 2, Juni 2025



Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan

Kajian Fiskal Regional
Provinsi Sumatera Selatan
Volume 8 Nomor 2, Juni 2025



Kajian Fiskal Regional diterbitkan oleh Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Sumsel, Kementerian Keuangan, dengan
periode publikasi triwulanan

Diterbitkan oleh:

Kanwil DJPb Provinsi Sumsel

Pengarah:

Rahmadi Murwanto (Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel)

Penanggung Jawab:

Setiyo Budi Pramono (Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II)

Reviewer:

Dr. Sukanto, S.E., M.Si. (Local Expert Ekonomi dan Fiskal Provinsi Sumsel)

Suwardi (Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B)

Kontributor:

1. Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Regional:

Yudho Bintoro Sandi, Anisa Ayufitria Damayanti, Hanip Tarmizi

2. Perkembangan Fiskal Regional:

Haerul Anwar, Jaka Trisna, Jeny Serhan, Muhammad Ferdy Oktavianto, Riedho Hizwar,
A'rsyil A'zim, M. Telly Anggra, Suci Amalia Putri, Sohendar

3. Peran dan Strategi Pengembangan KDMP/KKMP di Sumatera Selatan:

Hadiyan Lutfi dan Jeny Serhan

4. Boks 1. Perubahan Luas Lahan terhadap Produksi Padi di Beberapa Kabupaten di Sumatera Selatan:

Hesti (Universitas Bina Darma)

5. Boks 2. Pengaruh Angka Melek Huruf dan Realisasi Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Selatan:

Adelia Rahmawati (Universitas Sriwijaya)

Desain dan Layout:

Anisa Ayufitria Damayanti, Miftah Amiruddin Alwi Syahputra,
Destrian Ahmad Ramadhan, Jeny Serhan.

Alamat Redaksi:

Gedung Keuangan Negara Palembang Lantai II
Jl. Kapten A. Rivai No. 2-4 Palembang

Situs Web: <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/>

Download KFR



Feedback



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II 2025.

KFR berperan untuk memberikan gambaran perkembangan implementasi kebijakan fiskal Pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan selama triwulan II 2025. Penyusunan KFR ini diharapkan dapat menjadi alat analisis, evaluasi dan menjadi media informasi yang bernilai strategis baik bagi Kementerian Keuangan maupun bagi para mitra kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyediakan data dan informasi dan telah berpartisipasi dalam penyelesaian KFR Triwulan II ini. Kami berharap koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan KFR Provinsi Sumatera Selatan dapat terus berlanjut secara berkala di masa mendatang, guna mendukung kesinambungan implementasi kebijakan fiskal di Sumatera Selatan. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak, selalu kami harapkan, agar dapat menjadi perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kualitas dari hasil kajian yang dilakukan.

Harapan kami, semoga KFR Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II 2025 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan di Sumatera Selatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 29 Agustus 2025

Kepala Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Sumatera Selatan



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto

01

Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Regional

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	xi
Dashboard	xiii

1.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	3
1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	3
1.1.2	Inflasi	9
1.2	Perkembangan Indikator Kesejahteraan	11
1.2.1	Ketenagakerjaan	11
1.2.2	Kemiskinan dan Ketimpangan	12
1.2.3	Nilai Tukar Petani	13
1.2.4	Indeks Pembangunan Manusia	13
Boks 1	Analisis Perubahan Luas Lahan Terhadap Produksi Padi di Beberapa Kabupaten Provinsi Sumsel	14

02

Perkembangan Fiskal Regional

2.1	Pelaksanaan APBN Sumsel	17
2.1.1	Pendapatan Negara dan Hibah	18
2.1.2	Belanja Negara	23
2.1.3	Surplus/Defisit	29
2.2	Pelaksanaan APBD Sumsel	30
2.2.1	Pendapatan Daerah	30
2.2.2	Belanja Daerah	33
2.2.3	Surplus/Defisit APBD	34
2.2.4	Pembiayaan Daerah	34
2.2.5	Proyeksi APBD	34

03

2.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian	35
2.3.1 Pendapatan Konsolidasian	35
2.3.2 Belanja Konsolidasian	35
2.3.3 Surplus/Defisit	35
2.3.4 Pembiayaan Konsolidasian	35
2.4 Progress Implementasi Program Penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG)	36
Boks 2 Pengaruh Angka Melek Huruf dan Realisasi Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan Tahun 2020-2023	38

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

3.1 Pendahuluan	42
3.2 Analisis Tematik	42
3.2.1 Perkembangan KMDP/KKMP di Sumatera Selatan	42
3.2.2 Dukungan Pemerintah untuk Pengembangan KMDP/KKMP di Sumatera Selatan	44
3.2.3 Tantangan dalam Pengembangan KMDP/KKMP di Sumatera Selatan	45
3.2.4 Strategi Pengembangan KMDP/KKMP di Sumatera Selatan	46
3.2.5 Rekomendasi: Peran Kanwil DJPb Sumatera Selatan dalam Pengembangan KMDP/KKMP di Sumatera Selatan	47
3.2.6 Potensi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan	48

04

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan Rekomendasi	52
----------------------------	----

02

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Laporan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan II 2024-2025 (c-to-c) Penerimaan Per Kelompok Pajak Lingkup	17
Tabel 2.2	Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)	19
Tabel 2.3	Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)	20
Tabel 2.4	Realisasi Impor dan Bea Masuk per Komoditas Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	21
Tabel 2.5	Perkembangan PNBPN Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)	22
Tabel 2.6	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II (dalam Miliar Rupiah)	23
Tabel 2.7	Proyeksi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)	23
Tabel 2.8	Proyeksi Penerimaan PNBPN Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)	23
Tabel 2.9	Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)	26
Tabel 2.10	Proyeksi Transfer ke Daerah s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)	29
Tabel 2.11	Laporan Realisasi APBD Konsolidasian Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024-2025 (c-to-c)	30
Tabel 2.12	Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Wilayah Sumatera Selatan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	32
Tabel 2.13	Proyeksi Realisasi APBD Lingkup Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2025	34
Tabel 2.14	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024-2025 (c-to-c)	35
Tabel 2.15	Data NTP per SubSektor Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	36

03

Tabel 2.1	Laporan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan II 2024-2025 (c-to-c) Penerimaan Per Kelompok Pajak Lingkup	17
Tabel 2.2	Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)	19
Tabel 2.3	Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)	20
Tabel 2.4	Realisasi Impor dan Bea Masuk per Komoditas Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	21
Tabel 2.5	Perkembangan PNBPN Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)	22
Tabel 2.6	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II (dalam Miliar Rupiah)	23
Tabel 2.7	Proyeksi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)	23
Tabel 2.8	Proyeksi Penerimaan PNBPN Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)	23
Tabel 2.9	Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)	26
Tabel 3.1	Jumlah KDMP Lingkup Sumatera Selatan	42

01

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (yoy,%)	3
Grafik 1.2	Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Q2 2025 di wilayah Sumatera	3
Grafik 1.3	Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara Sumsel	3
Grafik 1.4	Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Sumsel	3
Grafik 1.5	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Pengeluaran (yoy,%)	4
Grafik 1.6	Rata-Rata Hasil Survei Konsumen Kota Palembang	4
Grafik 1.7	Perkembangan Kredit Perbankan di Wilayah Sumsel	5
Grafik 1.8	Perkembangan PMA dan PMDN Wilayah Sumsel	5
Grafik 1.9	Perkembangan Neraca Perdagangan Sumsel	6
Grafik 1.10	Perkembangan Harga Komoditas Internasional	6
Grafik 1.11	Perkembangan Top Komoditas Ekspor Sumsel (Juta USD)	6
Grafik 1.12	Pangsa Ekspor Sumsel Jan-Juni 2025 Menurut Negara Tujuan (%)	6
Grafik 1.13	Perkembangan Top Komoditas Impor Sumsel (Juta USD)	7
Grafik 1.14	Pangsa Impor Sumsel Jan-Jun 2025 Menurut Negara Asal (%)	7
Grafik 1.15	Perkembangan Aktivitas Bongkar-Muat Luar Negeri Sumsel	7
Grafik 1.16	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Lapangan Usaha (yoy,%)	8
Grafik 1.17	TPK dan RLM Hotel Berbitang Sumsel	8
Grafik 1.18	Perkembangan Inflasi Tahunan Sumsel dan Nasional (%)	9
Grafik 1.19	Inflasi Tahunan Juni 2025 Provinsi di Regional Sumatera (%)	9
Grafik 1.20	Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran (%)	9
Grafik 1.21	Perkembangan Harga Emas (Logam Mulia) ANTAM (Rp)	10

02

Grafik 1.22	Perkembangan Harga Pangan di Wilayah Sumsel (Rp)	10
Grafik 1.23	Perkembangan Inflasi Tahunan Antar Kabupaten/Kota di Sumsel (%)	10
Grafik 1.24	Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan TPAK Sumsel	11
Grafik 1.25	Penyerapan Tenaga Kerja Sumsel Menurut Lapangan Usaha Februari 2025	12
Grafik 1.26	Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel (%)	12
Grafik 1.27	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumsel	12
Grafik 1.28	Perkembangan Gini Ratio Sumsel	13
Grafik 1.29	Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumsel	13
Grafik 1.30	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sumsel	13
Grafik 2.1	Perkembangan Pendapatan Negara Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	18
Grafik 2.2	Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Negara per Jenis Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	18
Grafik 2.3	Kontribusi per Jenis Pajak Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	19
Grafik 2.4	Perkembangan Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	21
Grafik 2.5	Perkembangan Volume Ekspor CPO & Turunannya Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	21
Grafik 2.6	Perkembangan Harga Patokan Ekspor CPO & Turunannya Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	21
Grafik 2.7	Realiasi per Jenis PNPB Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	22
Grafik 2.8	Perkembangan Realisasi Belanja Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	23

Grafik 2.9	Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Belanja Negara Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	24
Grafik 2.10	Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Jenis Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	24
Grafik 2.11	Perkembangan Belanja Pegawai Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	24
Grafik 2.12	Perkembangan Belanja Barang Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	25
Grafik 2.13	Perkembangan Belanja Modal Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	25
Grafik 2.14	Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	25
Grafik 2.15	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Unit Organisasi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (Rp Miliar	25
Grafik 2.16	Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Unit Organisasi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	26
Grafik 2.17	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi	26
Grafik 2.18	Kontribusi BPP per Fungsi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	26
Grafik 2.19	Kontribusi Transfer ke Daerah per Jenis Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	27
Grafik 2.20	Perkembangan Dana Bagi Hasil Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	28
Grafik 2.21	Perkembangan Hibah ke Daerah Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	29
Grafik 2.22	Perkembangan Surplus/Defisit APBN Sumsel Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	29

03

Grafik 2.23	Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi per Jenis Pendapatan Daerah Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	31
Grafik 2.24	Pertumbuhan Realisasi per Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	32
Grafik 2.25	Pertumbuhan Realisasi per Jenis Pendapatan dari Dana Transfer Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	32
Grafik 2.26	Pertumbuhan Realisasi per Jenis Belanja Daerah Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	33
Grafik 2.27	Pertumbuhan Realisasi per Jenis Belanja Operasi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)	33
Grafik 2.28	Realisasi Penerima MBG Per Kelompok Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025	36
Grafik 3.1	Jumlah Total KDMP/KKMP di Sumatera Selatan	43
Grafik 3.2	Jumlah KDMP di Sumatera Selatan	43
Grafik 3.3	Jumlah KKMP di Sumatera Selatan	43
Grafik 3.4	Modal Awal KDMP/KKMP di Sumatera Selatan	43

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan penguatan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai *Regional Chief Economist*, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan menyusun Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2025 ini untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian *output* dan *outcome*-nya yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Sumatera Selatan tumbuh lebih tinggi di tengah sinyal pemulihan nasional yang menguat. Pada Triwulan II 2025, ekonomi Sumsel tumbuh sebesar 5,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian nasional (5,12%) maupun tahun sebelumnya (4,96%). Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan angka tertinggi kedua di Pulau Sumatera dan sekaligus mempertahankan peran strategisnya sebagai salah satu motor pertumbuhan kawasan. Beberapa indikator kinerja pembangunan juga telah menunjukkan progresnya dengan baik, seperti tingkat pengangguran yang terus menunjukkan tren perbaikan (3,89%) Demikian juga dengan tingkat kemiskinan 10,15% yang terus menurun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat dan tercatat pada angka 73,84 pada tahun 2024. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2025 berada di angka 122,38, dan Inflasi pada Juni 2025 sangat terkendali dalam rentang target $2,5\% \pm 1\%$ yaitu sebesar 2,44%. Kondisi ketimpangan pendapatan penduduk makin membaik dengan rasio gini per Maret 2025 tercatat di angka 0,311 turun dari periode September 2024 yang sebesar 0,331.

Dari sisi fiskal APBN, Pendapatan Negara selama triwulan II 2025 mencapai 37,06% dari target atau sebesar Rp6,63 triliun, tumbuh 4,07% (yoy) dengan kontributor terbesar dari PPN, yaitu sebesar 51,88% dari total penerimaan pajak.



Sementara realisasi Belanja Negara mencapai 40,31% dari pagu atau senilai Rp19,92 triliun yang berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada Kementerian negara/Lembaga sebesar Rp5,38 triliun dan TKD sebesar Rp14,54 triliun. Pertumbuhan negatif terjadi pada BPP yang berkontraksi 34,22% (yoy) sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penopang kinerja konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan 1,48% (yoy) sehingga kontraksi belanja negara secara keseluruhan tidak terlalu dalam.

Di tengah transisi pemerintahan baru dan kebijakan efisiensi belanja, kinerja APBD di Sumatera Selatan sampai dengan akhir triwulan II masih *on-track*. Kinerja pendapatan tumbuh positif, mencapai Rp18,42 triliun atau tumbuh positif 5,44% (yoy), meskipun kinerja belanja daerah berkontraksi 20,38% (yoy). Tantangan dalam pengelolaan APBD Sumsel adalah pada sisi pendapatan daerah walaupun masih didominasi oleh dana transfer, namun pada triwulan II Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan signifikan sehingga mengindikasikan akan terjadinya perbaikan kemandirian fiskal daerah. Dari sisi belanja daerah, proporsi belanja operasional masih sangat tinggi, sementara alokasi pada belanja modal proporsinya masih terbatas. Ke depan, dengan adanya kebijakan efisiensi, diharapkan kinerja belanja daerah dapat lebih optimal sehingga menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong pencapaian target dan output pembangunan pada tahun depan.

Salah satu program unggulan pemerintah saat ini yang menjadi prioritas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan menyediakan akses terhadap makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan kualitas SDM, serta mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Program MBG dimulai pada 6 Januari 2025, sampai dengan akhir bulan Juni 2025 terdapat 72 SPPG aktif dari target sebanyak 969 SPPG (7,4%) dengan total penerima manfaat 233.067 orang dari target 2.047.861 orang (11,38%). Jumlah SPPG dan penerima MBG ini akan semakin bertambah seiring dengan kesiapan SPPG. Program prioritas pemerintah ini berpotensi memberikan multiplier effect yang signifikan di Sumatera Selatan sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Analisis tematik KFR Triwulan II tahun 2025 mengangkat isu mengenai peran dan strategi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Sumsel. Saat ini telah terbentuk sebanyak 3.258 KDMP/KKMP yang tersebar pada 17 Kabupaten/Kota. Salah satu tantangan yang dihadapi KDMP/KKMP di Sumsel adalah masih terbatasnya kapasitas/kompetensi pengelola koperasi. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan KDMP/KKMP. Kanwil DJPb Sumsel dapat berperan sebagai katalisator dalam pengembangan KDMP/KKMP di Sumsel.

Secara umum, kinerja ekonomi dan fiskal Sumsel selama triwulan II tahun 2025 masih *on-track*. Namun demikian, kinerja ekonomi dan fiskal perlu penguatan agar dapat ditingkatkan pada periode selanjutnya sehingga seluruh target pembangunan dapat terealisasi dan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel.

Dashboard Ekonomi Regional

Indikator Makro Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (c - to - c)



Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh solid pada triwulan II 2025 dengan capaian 5,42% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sumatera.

Laju Inflasi (%)



Dari sisi harga, inflasi Sumsel mencapai 2,44% (yoy) pada Juni 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya namun masih berada dalam sasaran target inflasi nasional.

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Indikator Kesejahteraan

Selain pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, Perkembangan indikator kesejahteraan Sumsel hingga triwulan II 2025 menunjukkan perkembangan yang terus membaik

Kemiskinan

Per Maret 2025
10,15%

Gini Ratio

s.d. Maret 2025
0,311

Tingkat Pengangguran Terbuka

s.d. Februari 2025
3,89%

Nilai Tukar Petani

per Juni 2025
122,38

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Pengembangan Koperasi

Menindaklanjuti Instruksi Presiden dan serentak pada 12 Juli 2025 seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan total 17 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1.683 desa dan 327 kelurahan terbentuk 3.258 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tabel. Jumlah KDMP Lingkup Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Desa /Kel sudah bentuk KMP	Jumlah KDMP		Jml. Modal
			Desa	Kel	
1	Banyuasin	313	289	24	945.189.000
2	Empat Lawang	156	147	9	3.859.460.000
3	Lahat	377	360	17	577.655.000
4	Muara Enim	256	246	10	336.365.000
5	Musi Banyuasin	242	229	13	2.322.840.000
6	Musi Rawas	199	186	13	444.097.000
7	Musi Rawas Utara	89	82	7	159.555.000
8	Ogan Ilir	241	227	14	490.450.000
9	Ogan Komering Ilir	327	311	16	154.705.000
10	Ogan Komering Ulu	157	143	14	159.493.000
11	Ogan Komering Ulu Selatan	259	251	8	20.425.000
12	Ogan Komering Ulu Timur	312	305	7	572.714.000
13	PALU	71	65	6	5.260.000
14	Lubuk Linggau	72	0	72	132.000.000
15	Pagar Alam	35	0	35	54.610.000
16	Palembang	107	0	107	243.820.000
17	Prabumulih	45	12	33	140.327.000
Total		3.258	2.853	405	10.618.965.000

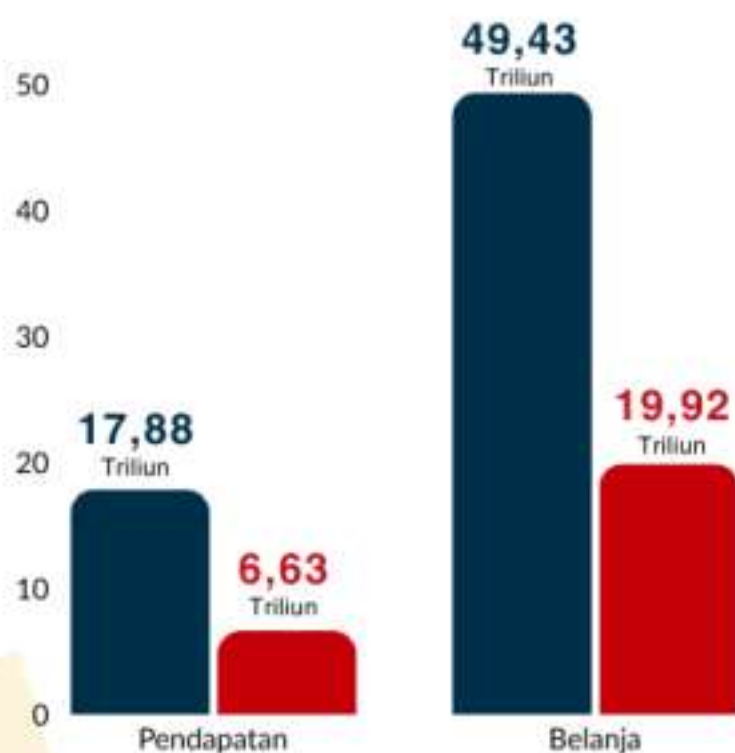
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan



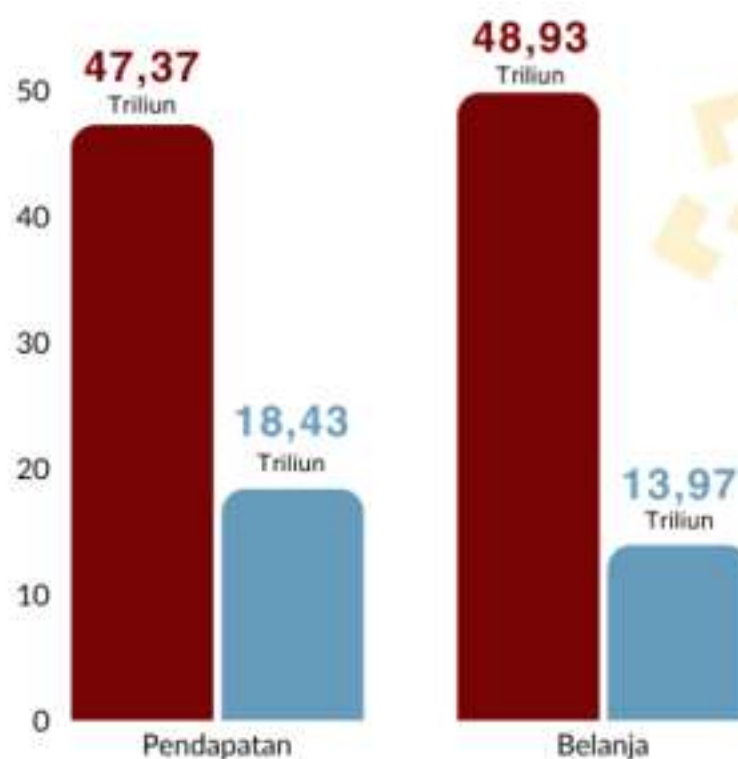
Kinerja Fiskal Regional

Triwulan II Tahun 2025

Pagu
Realisasi

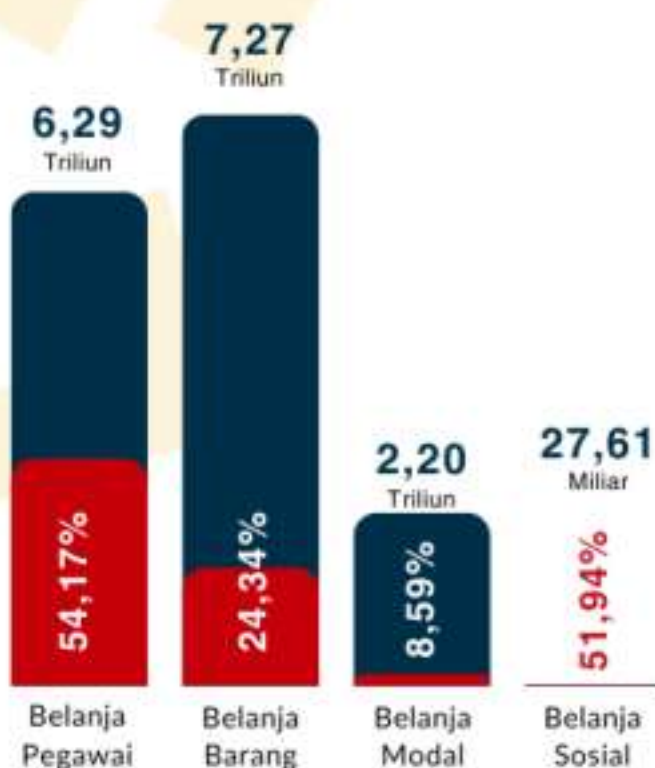


Pagu
Realisasi



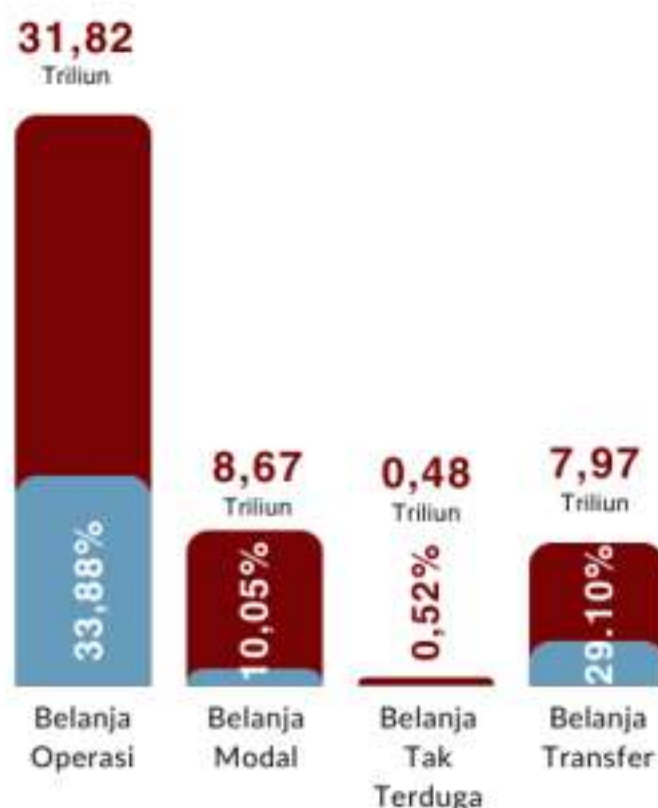
APBN

Sumber: Online Monitoring SPAN



APBD

Sumber: Dit. APK, DJPb





Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Regional

Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh lebih tinggi dari nasional pada triwulan II 2025, didorong oleh kuatnya konsumsi domestik. Pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,42% (yoy) dan menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Akselerasi ini dipicu oleh momentum HBKN Idulfitri dan Iduladha, libur sekolah, dan kenaikan daya beli masyarakat, yang terefleksi pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan mobilitas wisatawan nusantara.

- Dari sisi pengeluaran, penguatan ekonomi Sumsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB. Aktivitas konsumsi meningkat seiring momen Hari Besar Keagamaan Nasional, cuti bersama, dan libur sekolah yang mendorong mobilitas masyarakat dan belanja rumah tangga. Di sisi lain, PMTB tumbuh positif didorong peningkatan aktivitas konstruksi serta seiring proyek infrastruktur yang kembali berjalan pasca mulai dibukanya blokir anggaran belanja modal pemerintah. Meskipun jika dibandingkan tahun sebelumnya PMTB mengalami perlambatan dipengaruhi terbatasnya ekspansi investasi fisik baik oleh pemerintah maupun swasta serta masih terkonsentrasinya belanja modal pemerintah di wilayah Sumsel.
- Dari sisi lapangan usaha, kinerja ekonomi ditopang oleh lima sektor utama dengan kontribusi tertinggi, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi. Sektor Pertambangan tumbuh positif seiring peningkatan produksi batu bara, Industri Pengolahan meningkat dipengaruhi lonjakan produksi dan ekspor produk olahan kelapa sawit, Perdagangan meningkat seiring meningkatnya pengeluaran rumah tangga selama momen Hari Raya dan libur panjang.
- Dari sisi harga, inflasi Sumsel mencapai 2,44% (yoy) pada Juni 2025, meningkat dibanding bulan Maret namun masih berada dalam sasaran target inflasi nasional. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh lonjakan harga emas perhiasan serta komoditas pangan strategis seperti beras, cabai rawit, dan telur ayam ras.
- Secara spasial, inflasi Sumsel menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera, dan juga bervariasi antar kota/kabupaten IHK. Kabupaten Muara Enim kembali mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,31% (yoy), sedangkan Lubuklinggau terendah dengan inflasi 1,82%. Kontributor utama inflasi antarwilayah relatif seragam, didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
- Di sisi kesejahteraan, kondisi ketenagakerjaan membaik, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 69,35% dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 3,89%. Kualitas tenaga kerja juga meningkat seiring bertambahnya pekerja formal dan penurunan pekerja paruh waktu. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2025 terpantau menurun 2,10% dibandingkan bulan sebelumnya mencerminkan memburuknya daya beli dan efisiensi usaha tani.

1.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

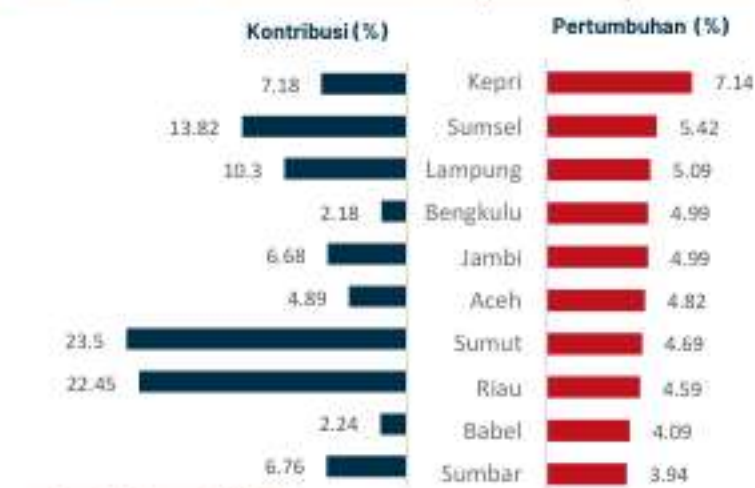
Perekonomian Sumsel tumbuh lebih tinggi di tengah sinyal pemulihan nasional yang menguat. Pada Triwulan II 2025, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 5,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian nasional (5,12%) maupun tahun sebelumnya (4,96%), menandakan pemulihan yang tetap terjaga dan stabil. Pertumbuhan yang melampaui nasional mencerminkan kekuatan daya beli masyarakat serta ketahanan sektor-sektor utama daerah dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi global dan domestik. Secara triwulanan, terjadi akselerasi pertumbuhan sebesar 4,65% (qoq), jauh meningkat dari 0,16% (qoq) pada triwulan sebelumnya, menunjukkan aktivitas ekonomi yang mengalami pemulihan. Namun, akselerasi ini belum optimal didukung oleh stimulus fiskal, mengingat konsumsi pemerintah masih berkontraksi -3,98% (yoy), sehingga peran belanja publik perlu diperkuat untuk menjaga momentum perekonomian.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (yoy, %)



Secara spasial, Sumatera Selatan mencatatkan kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Sumatera, sekaligus mempertahankan peran strategisnya sebagai salah satu motor pertumbuhan kawasan. Pada Triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,42% (yoy), hanya berada di bawah Kepulauan Riau (7,14%), dan mengungguli provinsi besar lainnya seperti Lampung (5,09%), Bengkulu dan Jambi (4,99%), hingga Sumatera Utara (4,69%). Dari sisi kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera, Sumsel menempati posisi ketiga dengan pangsa 13,82%, setelah Sumatera Utara (23,5%) dan Riau (22,45%). Hal ini mencerminkan daya dorong Sumsel yang konsisten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, baik melalui kekuatan sektor unggulan, peran distribusi logistik, maupun konektivitas antarwilayah yang mendukung aktivitas produksi dan perdagangan lintas provinsi.

Grafik 1.2. Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Q2 2025 di wilayah Sumatera



Peningkatan mobilitas masyarakat dan pariwisata domestik menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi Sumsel. Pada Triwulan II 2025, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) asal Sumatera Selatan mencapai 7,48 juta perjalanan, meningkat tajam sebesar 56,52% (yoy), sementara jumlah kunjungan wisnus ke Sumsel tumbuh 64,93% (yoy) menjadi 7,49 juta perjalanan. Lonjakan ini didorong oleh meningkatnya intensitas perjalanan masyarakat selama periode libur panjang yang meliputi Hari Raya Idulfitri dan Iduladha, libur sekolah, serta cuti bersama nasional. Momentum liburan tersebut tidak hanya meningkatkan pergerakan penduduk antarwilayah, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, khususnya di sektor perdagangan dan pariwisata. Selain itu, faktor-faktor seperti pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), kebijakan diskon tarif transportasi publik, serta daya beli masyarakat yang relatif terjaga menjadi katalis yang mendorong akselerasi konsumsi rumah tangga.

Grafik 1.3. Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara Sumsel



Jumlah Peningkatan mobilitas masyarakat tetap menjadi penopang aktivitas ekonomi, meskipun tidak merata di semua moda transportasi. Jumlah penumpang kereta api di Sumatera Selatan pada Triwulan II 2025 tercatat meningkat sebesar 7,80% (yoy), mencerminkan meningkatnya minat terhadap perjalanan darat berbiaya relatif rendah, terutama saat periode libur panjang nasional. Namun, jumlah penumpang angkutan laut dan udara justru mengalami penurunan masing-masing sebesar -0,63% dan -8,13% (yoy). Penurunan ini dapat dikaitkan dengan beralihnya preferensi masyarakat ke penggunaan kendaraan pribadi, terutama untuk perjalanan antarkota yang masih terjangkau secara jarak. Faktor efisiensi biaya, fleksibilitas waktu tempuh, serta kenyamanan selama perjalanan menjadi pertimbangan utama dalam memilih moda transportasi pribadi, terlebih saat periode mudik dan liburan keluarga.

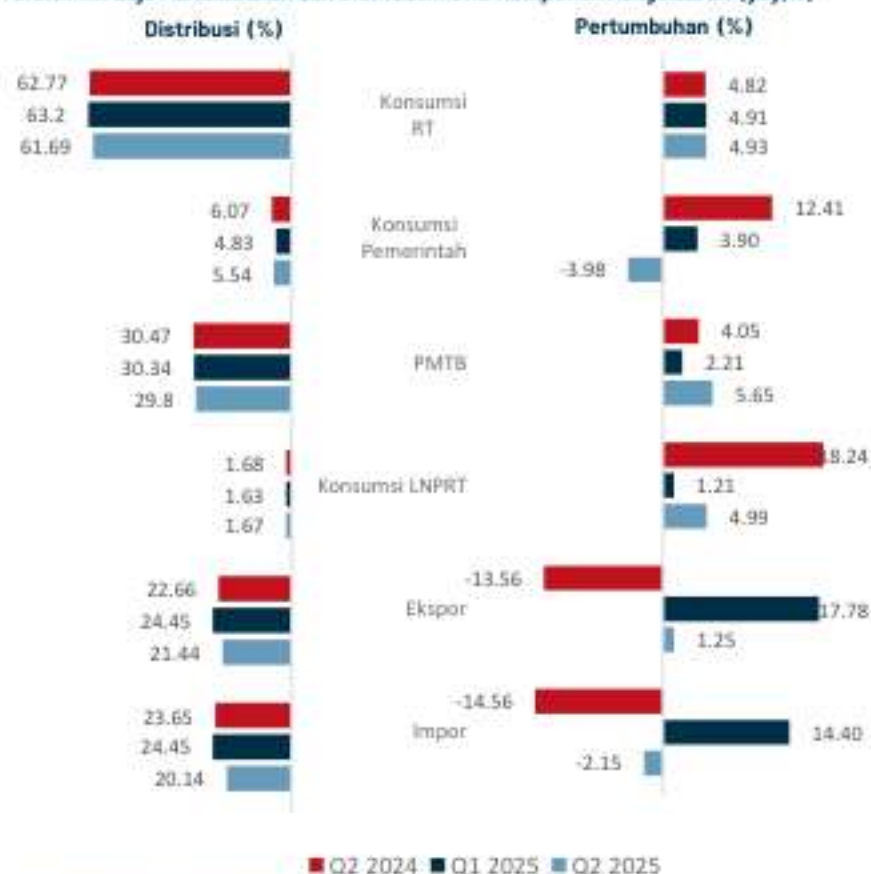
Grafik 1.4. Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Sumsel



1.1.1.1. PDRB Menurut Pengeluaran

Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan dari sisi pengeluaran pada Triwulan II 2025 menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga menjadi komponen dengan kontribusi terbesar, yakni sebesar 61,69%, meskipun sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (63,20%) dan periode yang sama tahun lalu (62,77%). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyusul dengan porsi sebesar 29,80%, juga menunjukkan tren stabil dari tahun ke tahun. Sementara itu, peran sektor eksternal masih terbatas, dengan kontribusi ekspor sebesar 21,44% dan impor sebesar 20,14% terhadap total PDRB, keduanya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Konsumsi pemerintah menyumbang 5,54%, sedikit meningkat dari triwulan I 2025 (4,83%) namun masih lebih rendah dari Triwulan II 2024 (6,07%). Adapun konsumsi konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tetap konsisten pada level yang rendah, yaitu 1,67%. Dominasi konsumsi rumah tangga dan investasi fisik ini memperkuat narasi bahwa struktur ekonomi Sumatera Selatan masih sangat bergantung pada aktivitas domestik, sementara kontribusi sektor luar negeri dan lembaga non-rumah tangga relatif minor. Hal ini memberikan sinyal penting dalam perumusan kebijakan penguatan daya beli dan investasi jangka menengah.

Grafik 1.5. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Pengeluaran (yoy,%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Dari sisi pertumbuhan, PMTB menjadi komponen dengan laju pertumbuhan tertinggi pada Triwulan II 2025, menguat dibandingkan triwulan sebelumnya, ditopang oleh peningkatan aktivitas konstruksi serta seiring proyek infrastruktur yang kembali berjalan pasca mulai dibukanya blokir anggaran belanja modal pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil sebesar 4,93% (yoy), mempertahankan peran utamanya dalam struktur PDRB Sumsel, mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga di tengah tekanan inflasi. Konsumsi LNPRT meningkat sebesar 4,99% (yoy), menguat dari 1,21% (yoy) pada triwulan sebelumnya, mengindikasikan meningkatnya aktivitas lembaga sosial dan keagamaan di triwulan II. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor luar negeri melambat menjadi hanya 1,25% (yoy) dibanding 17,78% pada triwulan sebelumnya, disebabkan penurunan ekspor komoditas utama seperti Batubara, Karet, Pulp, Minyak

Mentah, serta Lemak dan Minyak. Impor barang dan jasa justru kembali berkontraksi sebesar -2,15% (yoy), setelah sempat melonjak pada triwulan I 2025, seiring melemahnya permintaan input produksi di regional Sumsel. Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -3,98% (yoy), berbalik dari pertumbuhan 3,90% pada triwulan sebelumnya, akibat realisasi belanja barang dan belanja modal yang lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, yang masih dipengaruhi efek kebijakan efisiensi sejak awal tahun 2025.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama PDRB Sumatera Selatan dari sisi pengeluaran dengan kontribusi sebesar 61,69% dan pertumbuhan 4,93% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,91%), mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terjaga. Aktivitas konsumsi meningkat seiring momen Hari Besar Keagamaan Nasional, cuti bersama, dan libur sekolah yang mendorong mobilitas masyarakat dan belanja rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan makanan-minuman, transportasi, rekreasi, serta pendidikan. Namun demikian, sentimen konsumen menunjukkan sedikit pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun menjadi 118,5 dari 125,3 pada triwulan I, demikian pula dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang turun signifikan dari 136,5 menjadi 121,2, meskipun keduanya masih berada di atas level optimis (100). Penurunan ini mengindikasikan adanya kehati-hatian konsumen terhadap prospek ekonomi ke depan, seiring mulai meningkatnya tekanan biaya hidup. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) justru mencatatkan penguatan menjadi 115,7, menunjukkan bahwa persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini masih relatif terjaga. Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun konsumsi tetap menjadi penopang utama perekonomian, potensi pelemahan sentimen perlu dicermati sebagai sinyal perlunya penguatan kembali stimulus berkelanjutan dari sisi fiskal maupun lapangan kerja.

Grafik 1.6. Rata-Rata Hasil Survei Konsumen Kota Palembang



sumber: Bank Indonesia (diolah)

Peningkatan Ketersediaan akses pembiayaan tetap menjadi pendorong konsumsi rumah tangga di Sumatera Selatan. Pada triwulan II 2025, penyaluran kredit konsumsi tercatat meningkat menjadi Rp154,92 triliun, tumbuh sebesar 1,97% (qtq) dan 9,92% (yoy), melanjutkan tren positif sejak pertengahan 2023 dan sekaligus mencatatkan rekor tertinggi baru sejak 2022. Kenaikan ini menunjukkan peran signifikan lembaga keuangan dalam menopang daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga, kendaraan, pendidikan, hingga gaya hidup. Peningkatan ini juga sejalan dengan momentum HBKN, libur panjang sekolah, dan peningkatan mobilitas masyarakat. Tren ini mencerminkan bahwa meskipun tekanan harga dan ketidakpastian global masih membayangi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem

keuangan dan prospek ekonomi tetap kuat, sebagaimana tercermin pula dalam indeks keyakinan konsumen yang tetap dalam level optimis.

Grafik 1.7. Perkembangan Kredit Perbankan di Wilayah Sumsel (Rp Triliun)



Konsumsi pemerintah pada triwulan II 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 3,68% (yoy) dengan kontribusi 4,50% terhadap PDRB Sumatera Selatan. Meskipun sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (3,90%), kinerja ini masih mencerminkan peran belanja fiskal sebagai penopang perekonomian di tengah upaya konsolidasi fiskal nasional. Berdasarkan realisasi anggaran, belanja pemerintah pusat di Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp5,38 triliun atau 34,08% dari pagu, mengalami kontraksi -34,22% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan tajam pada belanja barang dan belanja modal yang masing-masing turun -43,28% dan -89,95% (yoy), seiring dengan implementasi efisiensi belanja sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025. Meski demikian, belanja pegawai tetap tumbuh positif 7,58% (yoy), didorong oleh kenaikan gaji dan tunjangan ASN. Belanja bansos juga tumbuh 1,97%, mencerminkan komitmen menjaga perlindungan sosial, terutama melalui program KIP Kuliah dan ATENSI bagi mahasiswa dan kelompok rentan.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) tetap menjadi penyangga utama konsumsi pemerintah. Realisasi TKD hingga Triwulan II 2025 mencapai Rp14,54 triliun atau 43,23% dari pagu, tumbuh 1,48% (yoy). Peningkatan ini terutama ditopang oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (29,34%), Dana Alokasi Khusus Nonfisik (11,64%), dan Dana Desa (0,34%) yang mengalami pertumbuhan positif. Namun demikian, komponen belanja terbesar yakni Dana Alokasi Umum (DAU) justru mengalami kontraksi -1,86%, dan Dana Alokasi Khusus Fisik juga terkontraksi tajam sebesar -59,45%, mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi penyaluran belanja produktif, khususnya pada komponen yang memerlukan kelengkapan dokumen atau kontrak fisik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun TKD masih menopang konsumsi pemerintah daerah, efektivitasnya mulai terkendala oleh perlambatan di beberapa jenis dana yang bersifat *earmarked* untuk pembangunan sektor prioritas.

Sementara itu, belanja pemerintah daerah dari APBD juga mengalami perlambatan dengan realisasi mencapai Rp13,97 triliun atau 28,56% dari pagu, turun -20,38% (yoy). Seluruh komponen utama belanja daerah tercatat mengalami penurunan realisasi tahunan. Belanja Operasi, yang mencakup belanja pegawai dan belanja barang/jasa, masih menjadi porsi terbesar, namun mengalami penurunan -10,21% (yoy). Belanja Modal, meskipun mencapai Rp871,05 miliar, hanya menyumbang 10,05% dari pagu dan terkontraksi tajam 69,30%, mengindikasikan tantangan dalam pelaksanaan

proyek pembangunan fisik. Penurunan juga terjadi pada belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penurunan pada seluruh kelompok belanja ini mengindikasikan belum optimalnya daya dorong belanja APBD terhadap perekonomian daerah, terutama dari sisi belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi pemerintah pada triwulan II 2025 masih didominasi oleh belanja pegawai, bantuan sosial, dan TKD, sementara kinerja belanja produktif seperti belanja modal dan barang/jasa masih belum maksimal dalam memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

PMTB tercatat tumbuh sebesar 5,65% (yoy) pada triwulan II 2025 dengan kontribusi sebesar 29,8% terhadap struktur PDRB Sumatera Selatan. Meskipun pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang hanya 2,21% (yoy), namun tetap lebih rendah dari pertumbuhan PMTB pada triwulan II 2024 yang mencapai 6,55%. Perlambatan ini mencerminkan masih terbatasnya ekspansi investasi fisik baik oleh pemerintah maupun swasta. Data BPS menunjukkan realisasi belanja modal yang bersumber dari gabungan APBN dan APBD mengalami kontraksi 70,78% (yoy). Sejalan dengan itu, berdasarkan data yang dihimpun Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal K/L hanya terealisasi Rp188,66 miliar (-89,95% yoy), dan belanja modal APBD sebesar Rp871,05 miliar (-69,30% yoy), menunjukkan lemahnya kontribusi belanja infrastruktur terhadap pembentukan modal tetap bruto.

Di sisi lain, investasi swasta belum menunjukkan ekspansi yang signifikan. Total realisasi investasi (PMA dan PMDN) pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp12,59 triliun, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp13,07 triliun dan turun 8,19% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan terutama terjadi pada investasi asing (PMA) yang menyusut dari Rp5,25 triliun menjadi Rp4,45 triliun. Sementara itu, PMDN memang meningkat secara tahunan dari Rp7,82 triliun menjadi Rp8,14 triliun, namun secara kuartalan justru terkontraksi 17,25% (yoy). Kondisi ini mencerminkan sikap hati-hati pelaku usaha swasta dalam merespons ketidakpastian global dan dinamika pasca tahun politik.

Grafik 1.8. Perkembangan PMA dan PMDN Wilayah Sumsel (Rp Triliun)



Meskipun demikian, struktur investasi tetap menunjukkan arah yang mendukung PMTB. PMDN yang mendominasi 64,64% total investasi berperan sebagai pendorong utama perluasan kapasitas produksi dan pembangunan infrastruktur niaga, khususnya melalui sektor perdagangan besar dan eceran, jasa properti, serta industri makanan dan minuman. Di sisi lain, PMA tetap memainkan peran strategis pada sektor-sektor padat modal seperti pertambangan, migas, dan industri pengolahan, yang mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai

tambah ekspor. Walaupun kredit investasi masih tumbuh positif, dampaknya terhadap pembentukan aset tetap belum terlihat signifikan. Dengan kontribusi PMTB besar namun belum optimal dalam mengungkit pertumbuhan, percepatan realisasi belanja infrastruktur serta penguatan iklim investasi menjadi krusial dalam mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Selatan ke depan.

Peran PMTB berpotensi menguat seiring tercantumnya sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Sumatera Selatan dalam dokumen RPJMN 2025–2029. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, beberapa PSN yang diindikasikan akan dilaksanakan di Sumsel antara lain yaitu pengembangan *food estate*, proyek *Biorefinery* Pertamina di Musi Banyuasin, pembangunan jaringan gas perkotaan, hilirisasi komoditas kelapa sawit dan rumput laut, serta pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas. Selain itu, pengembangan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan juga menjadi salah satu prioritas PSN daerah. Apabila proyek-proyek ini segera memasuki tahap konstruksi dan pembebasan lahan, maka dampaknya terhadap pertumbuhan PMTB akan sangat signifikan ke depannya. Untuk itu, konsistensi dukungan fiskal, percepatan perizinan, serta sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan eksekusi proyek-proyek strategis tersebut benar-benar dapat mengakselerasi investasi fisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kinerja ekspor-impor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan II 2025 menunjukkan pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tetap mencatatkan surplus perdagangan. Nilai ekspor Sumsel tercatat sebesar USD1.573,25 juta atau mengalami kontraksi 17,7% (qoq) dan -10,2% (yoy), seiring dengan penurunan nilai ekspor batubara, pulp, dan komoditas olahan lainnya. Di sisi lain, impor tercatat sebesar USD259,89 juta, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (USD229,68 juta), namun tetap berada dalam kisaran yang terkendali. Surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD1.313,36 juta, masih menjadi kontributor penting terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, meskipun tidak setinggi capaian triwulan I 2025 (USD1.682,82 juta).

Grafik 1.9. Perkembangan Neraca Perdagangan Sumsel

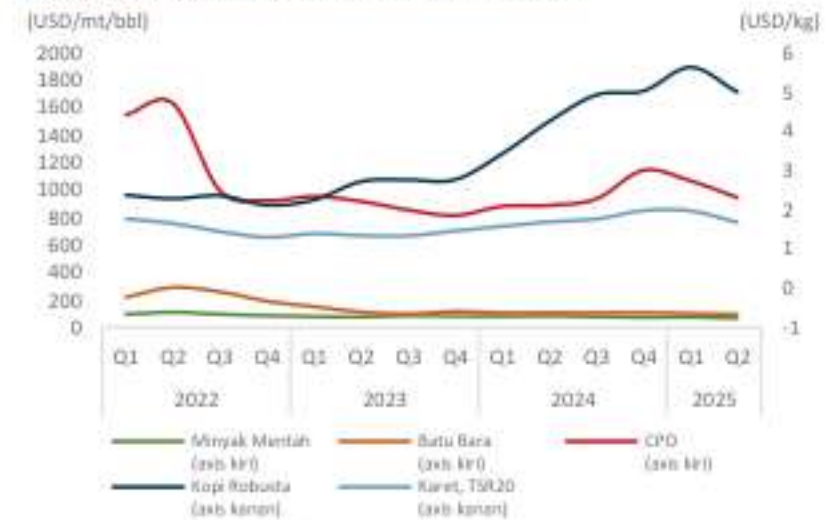


sumber: Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumbagtir (diolah)

Pelemahan ekspor pada triwulan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai ekspor komoditas utama seperti batubara dan pulp. Ekspor batubara turun menjadi USD506,84 juta dari sebelumnya USD700,76 juta, seiring dengan menurunnya harga batubara internasional dari USD100,56/mt (Q1) menjadi USD94,56/mt (Q2). Demikian pula pulp turun menjadi USD379,41 juta dari sebelumnya USD558,16 juta. Sementara itu, komoditas bahan baku karet dan lemak-minyak menunjukkan ketahanan ekspor meski terjadi koreksi

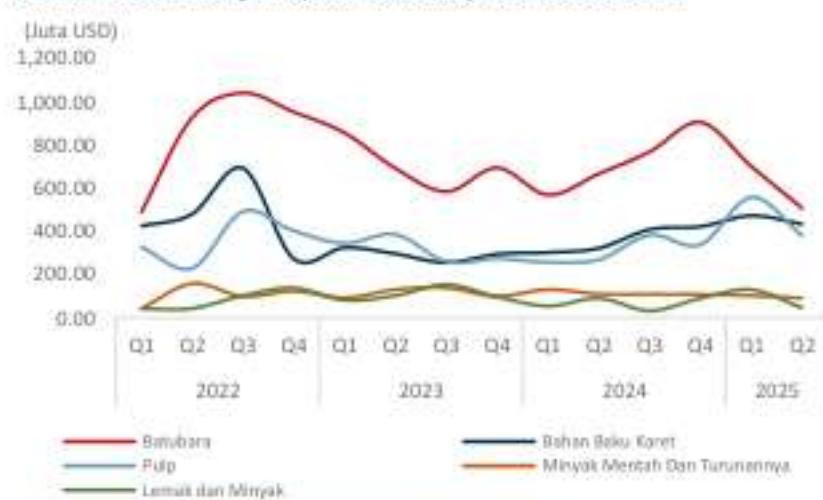
harga. Penurunan harga CPO dari USD1.068,39/mt ke USD945,78/mt dan stabilnya harga kopi robusta di level USD5,00/kg mencerminkan tekanan pasar komoditas global akibat penyesuaian permintaan dari negara mitra dagang utama. Penurunan ekspor ini perlu dicermati karena dapat mengurangi surplus perdagangan dan menghambat kontribusi sektor eksternal terhadap PDRB.

Grafik 1.10. Perkembangan Harga Komoditas Internasional



sumber: World Bank (diolah)

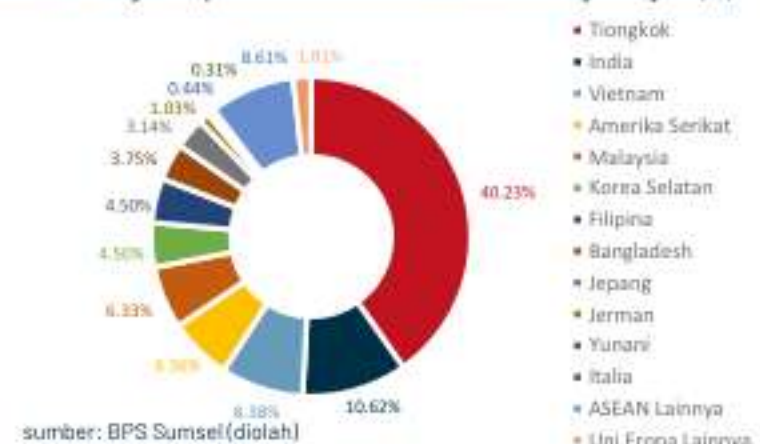
Grafik 1.11. Perkembangan Top Komoditas Ekspor Sumsel (Juta USD)



sumber: Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumbagtir (diolah)

Struktur ekspor Sumsel masih bergantung pada Tiongkok sebagai mitra dagang utama, dengan kontribusi sebesar 40,23% terhadap total ekspor selama Januari–Juni 2025 atau senilai USD1,206 miliar. Disusul India (USD318,49 juta), Vietnam (USD251,09 juta), dan Amerika Serikat (USD190,65 juta), dominasi pasar Asia menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap kondisi perekonomian kawasan. Meskipun menjadi sumber devisa utama, ketergantungan ini membawa risiko eksternal, terutama dari gejolak geopolitik, kebijakan proteksionis seperti yang ditempuh AS terhadap Tiongkok, serta fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, penguatan diversifikasi pasar ekspor dengan mendorong akses ke negara-negara nontradisional dan ASEAN lainnya, serta percepatan hilirisasi komoditas menjadi strategi jangka menengah yang perlu terus didorong untuk menjaga ketahanan sektor eksternal Sumsel.

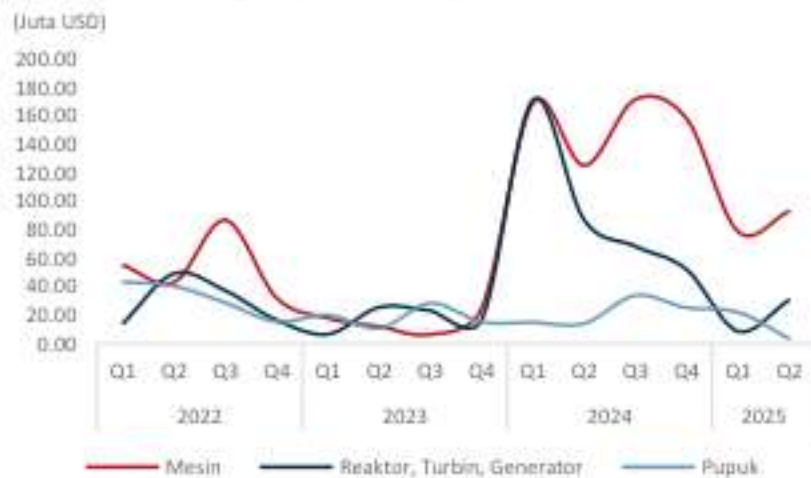
Grafik 1.12. Pangsa Ekspor Sumsel Jan–Juni 2025 Menurut Negara Tujuan (%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, sektor eksternal Sumatera Selatan perlu mewaspadai beberapa risiko strategis yang dapat memengaruhi kinerja perdagangan luar negeri. Salah satunya adalah eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel yang berdampak pada gangguan jalur pelayaran internasional, terutama di kawasan Laut Merah. Hal ini dapat mengganggu arus logistik ekspor utama Sumsel seperti batubara dan CPO ke negara mitra utama di Asia dan Timur Tengah, serta mendorong kenaikan biaya pengapalan dan asuransi. Di sisi lain, India yang merupakan salah satu pasar ekspor terbesar Sumsel (dengan kontribusi lebih 10,62% pada triwulan II 2025) menghadapi tantangan domestik berupa ketegangan politik serta tekanan terhadap sektor manufakturnya akibat pelemahan ekonomi global dan kebijakan proteksionis AS terhadap Tiongkok.

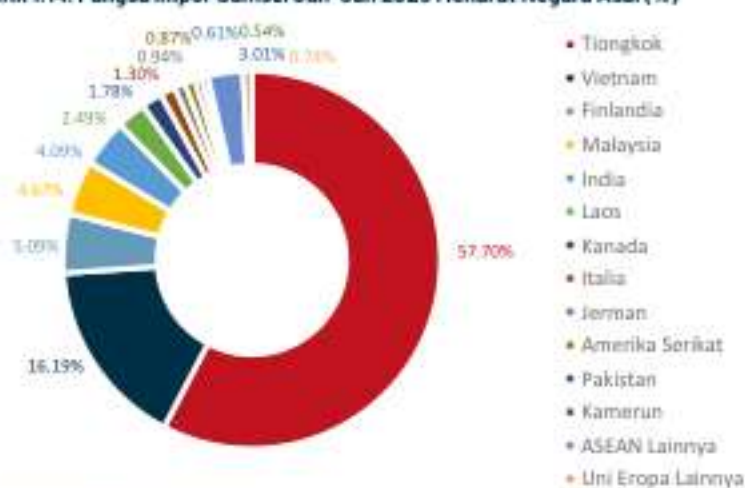
Grafik 1.13. Perkembangan Top Komoditas Impor Sumsel (Juta USD)



sumber: Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumbagtim (diolah)

Nilai impor Sumatera Selatan pada Triwulan II 2025 tercatat melemah, mencerminkan berkurangnya permintaan atas barang modal seiring dengan normalisasi belanja infrastruktur dan efisiensi investasi industri. Nilai impor mesin turun signifikan menjadi USD78,84 juta dari puncaknya di Triwulan I 2024 yang mencapai USD169,28 juta. Penurunan tajam juga terjadi pada impor reaktor, turbin, dan generator yang hanya sebesar USD8,65 juta, serta pupuk yang jatuh ke level USD3,41 juta. Fenomena ini mencerminkan penurunan aktivitas investasi produktif sektor publik dan swasta, serta upaya optimalisasi rantai pasok domestik.

Grafik 1.14. Pangsa Impor Sumsel Jan-Jun 2025 Menurut Negara Asal (%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Dari sisi geografis, Tiongkok tetap menjadi negara asal impor terbesar bagi Sumatera Selatan, disusul oleh Vietnam dan Finlandia. Komoditas utama yang diimpor dari Tiongkok meliputi mesin untuk keperluan khusus, mesin umum, serta peralatan listrik, yang mencerminkan dominasi barang modal dan input industri. Ketergantungan terhadap mitra Tiongkok masih tinggi, dan ketegangan dagang global seperti tarif antisubsidi Uni Eropa terhadap kendaraan listrik asal Tiongkok (meski tidak langsung menysasar mesin industri) berpotensi

memicu disrupsi rantai pasok dan volatilitas harga komponen global. Sementara itu, Vietnam menyuplai kayu olahan dan pupuk, sedangkan impor dari Finlandia masih didominasi mesin industri. Struktur impor ini menunjukkan pentingnya menjaga diversifikasi mitra dagang untuk mengurangi risiko eksposur terhadap gejolak global.

Volume bongkar-muat luar negeri di pelabuhan Sumatera Selatan pada Triwulan II 2025, sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya, namun masih dalam kisaran tinggi secara historis. Aktivitas bongkar meningkat menjadi 151.175 unit, yang mengindikasikan arus masuk barang impor tetap aktif, meskipun dari sisi nilai menunjukkan penurunan. Stabilitas aktivitas pelabuhan memperlihatkan bahwa sektor perdagangan luar negeri masih berjalan relatif lancar secara fisik, meskipun tekanan nilai terjadi dari sisi harga dan volume pembelian.

Grafik 1.15. Perkembangan Aktivitas Bongkar-Muat Luar Negeri Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

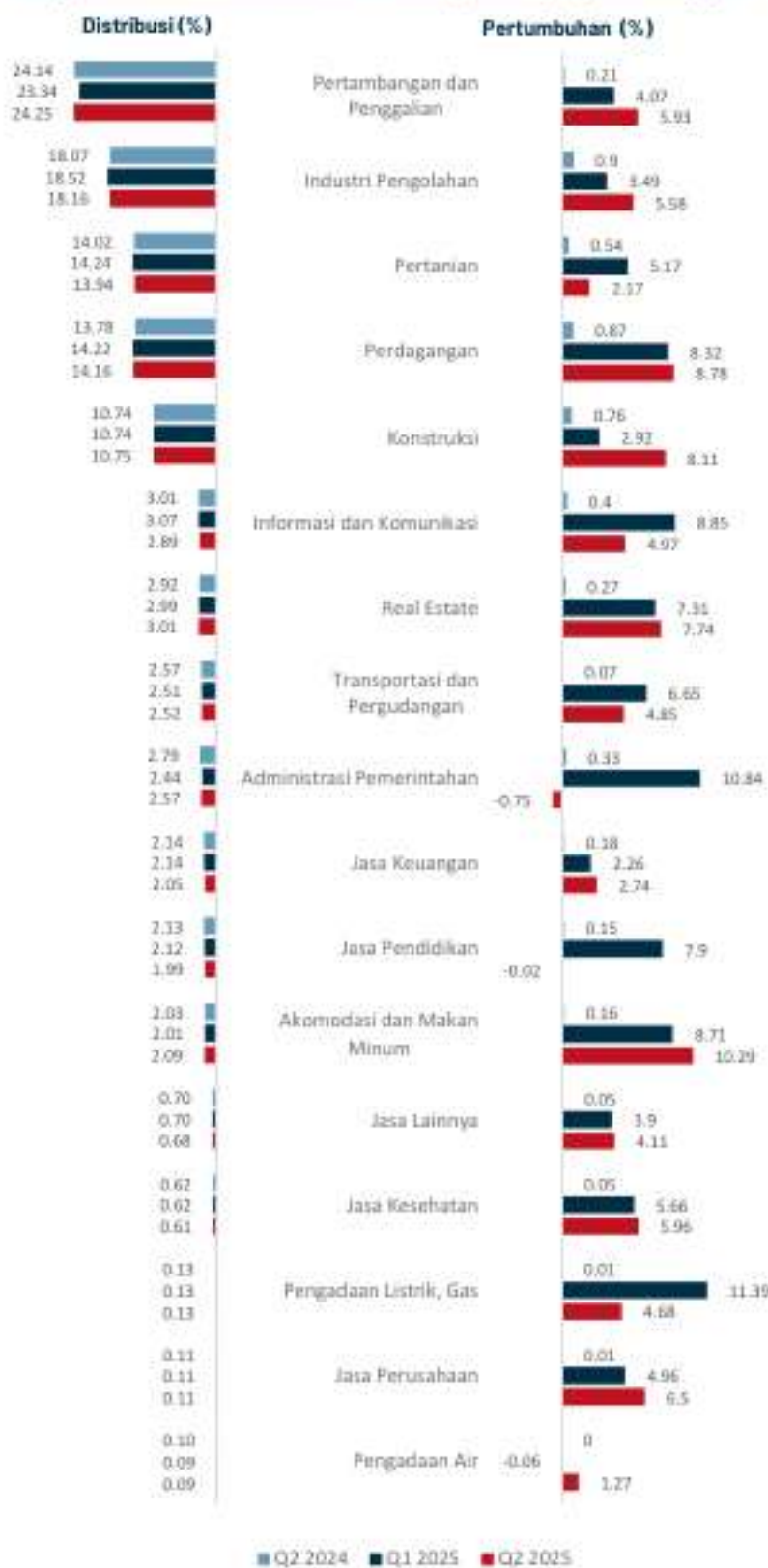
Dengan capaian surplus neraca perdagangan yang kembali menguat sebesar USD1,313 juta pada Triwulan II 2025, sektor eksternal juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumsel. Tren pemulihan ekspor pasca koreksi harga komoditas global pada tahun lalu menunjukkan konsistensi, meskipun nilai ekspor mengalami penurunan secara kuartalan sebesar -17,7% (qto), yang lebih disebabkan oleh normalisasi ekspor batubara dan CPO. Namun, masih dominannya peran dua negara tersebut dalam struktur ekspor Sumsel menandakan kerentanan terhadap volatilitas permintaan eksternal. Di tengah meningkatnya ketegangan dagang global seperti kebijakan tarif Uni Eropa terhadap produk Tiongkok serta potensi risiko dari geopolitik Asia Selatan, upaya diversifikasi pasar ekspor dan penguatan hilirisasi komoditas menjadi semakin mendesak. Secara keseluruhan, dengan kontribusi dan pertumbuhan net ekspor yang tetap tinggi, sektor eksternal mampu menjaga momentum pertumbuhan Sumsel di tengah tekanan global, asalkan disertai mitigasi risiko dan peningkatan efisiensi logistik domestik.

1.1.1.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Sumatera Selatan dari sisi lapangan usaha pada triwulan II 2025 masih ditopang oleh lima sektor utama yang menyumbang lebih dari 81% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kelima sektor tersebut meliputi Pertambangan dan Penggalan (24,25%), Industri Pengolahan (18,16%), Pertanian (13,94%), Perdagangan Besar dan Eceran (14,16%), serta Konstruksi (10,75%). Komposisi ini menegaskan bahwa struktur ekonomi Sumsel masih sangat dipengaruhi oleh sektor berbasis sumber daya alam dan aktivitas turunannya, meskipun sektor Perdagangan dan Konstruksi secara konsisten menunjukkan

peran strategis dalam menopang pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi daerah.

Grafik 1.16. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Lapangan Usaha (yoy,%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 5,93% (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,07%), dan mempertahankan perannya sebagai kontributor terbesar PDRB Sumsel. Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan produksi batubara sebesar 3,60% (Kementerian ESDM), seiring dengan masih tingginya permintaan dari negara tujuan utama seperti Tiongkok, India, dan Vietnam. Namun, harga batubara internasional yang mulai melandai dan potensi dampak dari pelemahan pertumbuhan ekonomi global tetap menjadi risiko yang harus diwaspadai. Diversifikasi pasar dan peningkatan efisiensi rantai pasok menjadi kunci menjaga daya saing sektor ini.

Industri Pengolahan mencatatkan akselerasi pertumbuhan sebesar 5,58% (yoy), naik dari 3,49% pada triwulan sebelumnya, didukung oleh lonjakan produksi dan ekspor produk olahan kelapa sawit. Produksi CPO dan palm kernel meningkat signifikan sebesar 61,51% (BPS), sementara ekspor pulp dan produk turunan karet juga mencatatkan kinerja positif. Walaupun harga minyak nabati dan bahan bakar mengalami koreksi, peningkatan aktivitas manufaktur tetap

terjaga. Perbaikan pada subsektor hilir dan pertumbuhan investasi baru menjadi faktor penentu keberlanjutan pertumbuhan industri pengolahan.

Sektor Pertanian tumbuh sebesar 2,17% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,17%) seiring dengan efek musiman pascapanen dan basis tinggi tahun lalu. Meski demikian, beberapa indikator produksi menunjukkan performa positif, seperti produksi padi dan palawija yang tumbuh 4,82% dan hortikultura yang melonjak 19,68%. Namun, penurunan harga output pertanian, terutama pada cabai merah, kopi, dan karet, menjadi tekanan bagi pendapatan petani. Hal ini tercermin dari penurunan NTP Sumsel menjadi 122,38 pada Juni 2025, turun 2,10% dibanding Mei, sebagai dampak dari turunnya indeks harga yang diterima petani (-2,06%) di tengah naiknya biaya konsumsi (0,04%). Penurunan daya beli ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektoral belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan petani secara riil.

Perdagangan mengalami pertumbuhan kuat sebesar 8,78% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (8,32%), menunjukkan ketahanan konsumsi domestik. Peningkatan ini berkorelasi dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga selama momen Hari Raya dan libur panjang, tercermin dari peningkatan belanja makanan-minuman non-alkohol (28,58%), perabot rumah tangga (28,73%), serta transportasi dan komunikasi (26,73%) menurut BPS. Aktivitas pelabuhan dan logistik turut mendukung kinerja sektor ini, meskipun tekanan inflasi dan pelemahan global tetap menjadi faktor yang harus dicermati.

Sektor Konstruksi tumbuh menguat sebesar 8,11% (yoy), meningkat tajam dibanding triwulan sebelumnya (2,92%), seiring dengan akselerasi proyek infrastruktur dan membaiknya realisasi belanja modal, meskipun masih tumbuh negatif secara tahunan. Indeks nilai konstruksi juga meningkat sebesar 9,16%, didukung oleh percepatan penyelesaian proyek fisik dan pengadaan barang konstruksi. Sektor ini diharapkan terus tumbuh pada paruh kedua 2025 seiring realisasi proyek strategis nasional dan peningkatan belanja pemerintah daerah.

Di luar lima sektor utama, sektor Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 10,29% (yoy) pada triwulan II 2025, melanjutkan tren peningkatan dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan permintaan masyarakat terhadap layanan *hospitality* dan makanan-minuman, khususnya selama periode libur panjang HBKN Idul Fitri, Idul Adha, dan libur sekolah. Peningkatan ini juga didorong oleh membaiknya pendapatan rumah tangga dan kegiatan konsumsi, tercermin dari peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,93% (yoy) pada triwulan ini.

Grafik 1.17. TPK dan RLM Hotel Berbintang Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang melakukan perjalanan ke Sumatera Selatan memang meningkat, namun indikator kinerja akomodasi formal belum sepenuhnya menunjukkan pemulihan yang sejalan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Juni 2025 tercatat sebesar 46,42%, turun dibandingkan Juni 2024 sebesar 48,14%. Penurunan TPK ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah kunjungan wisata meningkat, preferensi wisatawan cenderung bergeser ke penginapan alternatif seperti *guesthouse* ataupun *homestay* yang lebih *affordable*. Rata-rata Lama Menginap (RLM) juga stagnan di angka 1,37 hari, belum menunjukkan perbaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya, menandakan bahwa karakter kunjungan didominasi oleh wisata jangka pendek. Faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya TPK adalah efisiensi belanja perjalanan dinas instansi pemerintah dan minimnya agenda skala besar di Sumsel sepanjang triwulan ini. Hal ini sejalan dengan penurunan anggaran perjalanan dinas dan optimalisasi *virtual meeting* di lingkungan K/L dan pemerintah daerah. Selain itu, tidak adanya event nasional berskala besar juga membatasi peluang peningkatan okupansi hotel berbintang di daerah.

1.1.2. Inflasi

Inflasi Sumsel menunjukkan tren peningkatan, namun masih terkendali dan berada dalam sasaran target inflasi. Per Juni 2025, inflasi tahunan Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,44% (yoy), meningkat dibanding di bulan Maret yang sebesar 1,77% (yoy), serta lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang berada di angka 1,87% (yoy). Kenaikan ini terjadi setelah tren pemulihan pasca deflasi di awal tahun dan menunjukkan arah yang konsisten dengan peningkatan konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan Idul Adha serta libur sekolah. Inflasi Sumsel masih berada dalam rentang target nasional $2,5\% \pm 1\%$, namun cenderung mendekati batas atas target, terutama karena tekanan harga dari beras, daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan emas perhiasan,

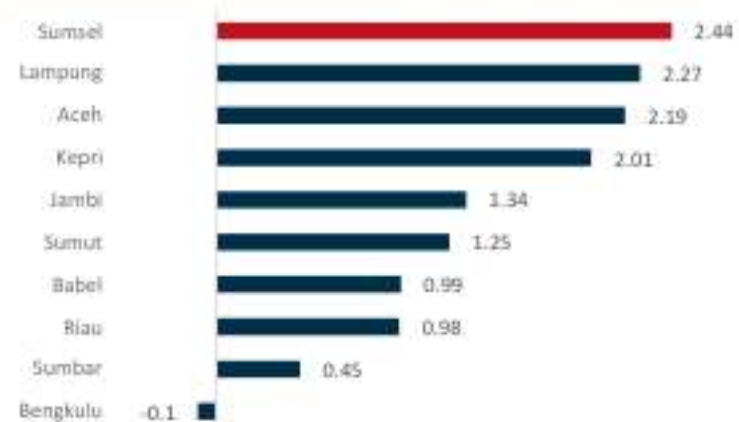
Grafik 1.18. Perkembangan Inflasi Tahunan Sumsel dan Nasional (%)



Secara spasial, Sumsel menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi di Sumatera pada Juni 2025. Sumatera Selatan mencatatkan inflasi tertinggi di antara seluruh provinsi di Pulau Sumatera dengan tingkat inflasi 2,44% (yoy) pada Juni 2025, disusul oleh Lampung (2,27%) dan Aceh (2,19%). Angka ini jauh melampaui rata-rata regional dan kontras dengan provinsi seperti Bengkulu yang mengalami deflasi sebesar -0,10%, serta Sumbar, Riau, dan Babel yang mencatat inflasi di bawah 1%. Dominasi inflasi Sumsel secara regional turut menempatkan provinsi ini dalam sorotan. Tekanan inflasi di

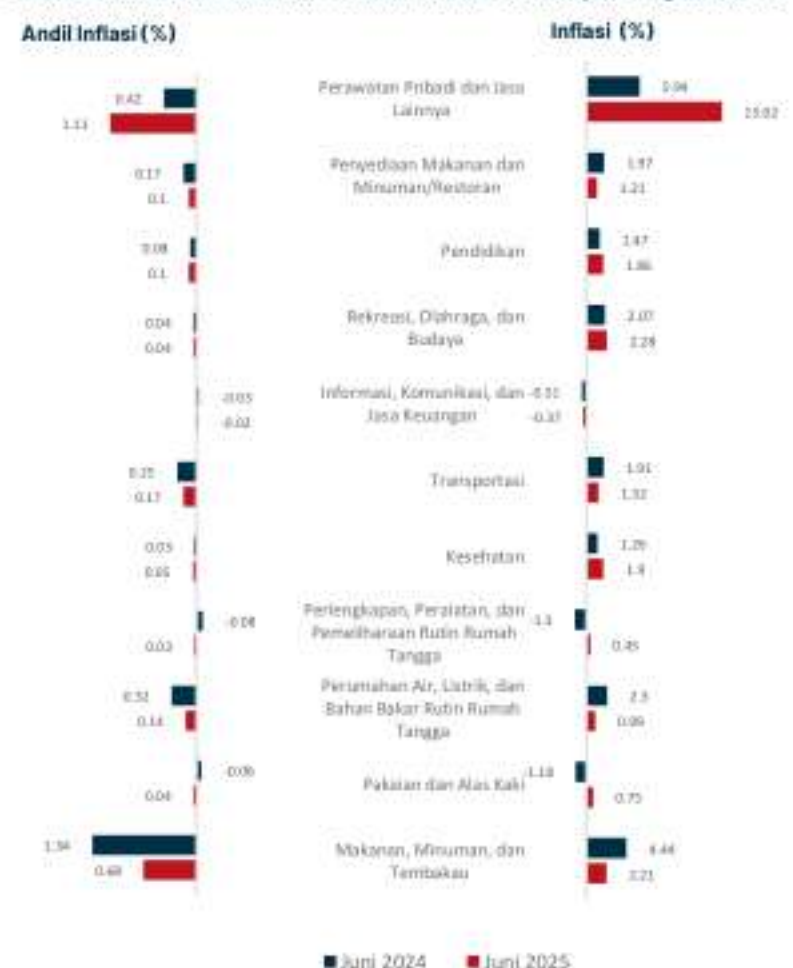
Sumsel mengindikasikan masih adanya tekanan struktural dari sisi pasokan pangan, serta keterbatasan distribusi pasca HBKN yang memengaruhi harga-harga kebutuhan pokok. Namun demikian, kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui operasi pasar dan program Gerakan Pangan Murah (GPM) telah membantu meredam gejolak harga secara terbatas, namun tetap dibutuhkan strategi penguatan stok pangan dan distribusi antar wilayah untuk mengantisipasi tekanan harga pada paruh kedua 2025.

Grafik 1.19. Inflasi Tahunan Juni 2025 Provinsi di Regional Sumatera (%)



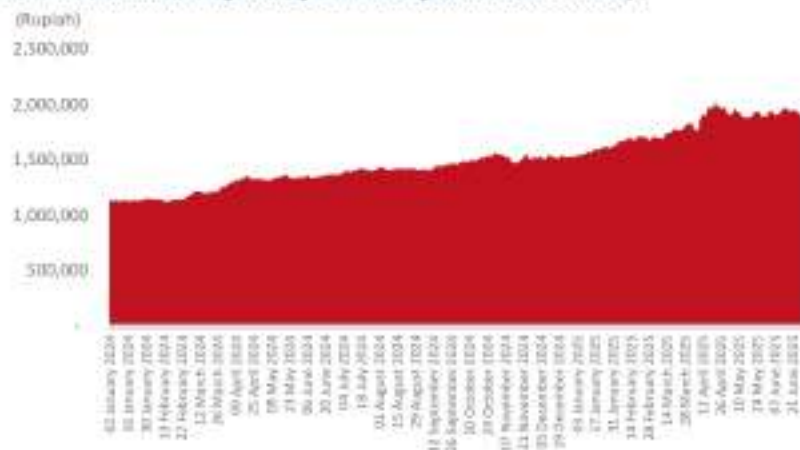
Kelompok perawatan pribadi dan makanan tetap menjadi pendorong utama inflasi Sumsel hingga Juni 2025. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatatkan inflasi tahunan tertinggi sebesar 15,02% (yoy) dengan andil inflasi 1,11%, naik tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan inflasi 2,21% (yoy) dengan andil 0,68%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2024, namun tetap menjadi kontributor kedua terbesar terhadap inflasi tahunan. Tekanan harga pangan, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, serta cabai rawit, tetap signifikan meskipun pasokan cenderung stabil secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sisi permintaan tetap tinggi, terutama di wilayah dengan konsumsi rumah tangga yang kuat.

Grafik 1.20. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran (%)



Lonjakan harga emas menjadi pendorong utama inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Sumatera Selatan hingga Juni 2025. Kelompok ini mencatatkan inflasi tahunan tertinggi dengan andil inflasi terbesar yang dipengaruhi melonjaknya harga emas perhiasan, yang mengikuti tren global akibat meningkatnya ketegangan geopolitik serta ekspektasi penurunan suku bunga acuan oleh *The Fed*. Berdasarkan data ANTAM, harga emas logam mulia terus meningkat hingga menembus Rp1,88 juta per gram pada Juni 2025, mencerminkan tekanan signifikan terhadap konsumsi perhiasan masyarakat. Tingginya tekanan harga ini menjadikan kelompok perawatan pribadi sebagai penyumbang inflasi paling dominan di Sumsel sepanjang tahun berjalan.

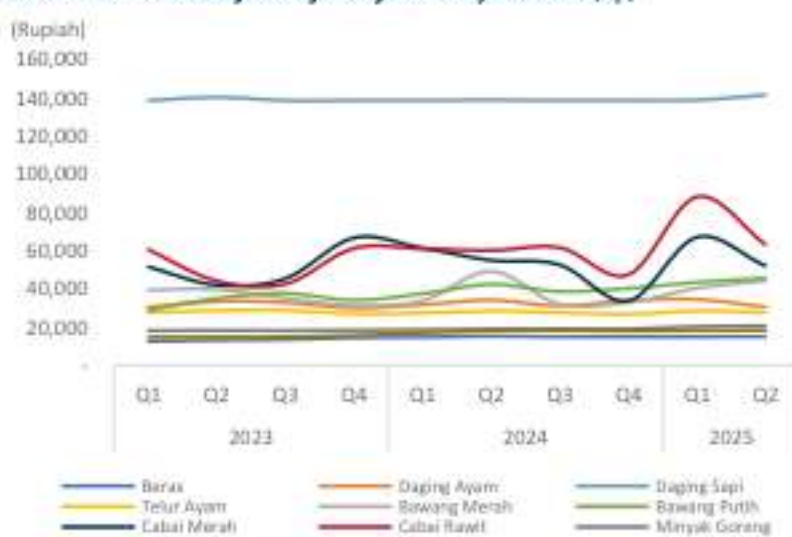
Grafik 1.21. Perkembangan Harga Emas (Logam Mulia) ANTAM (Rp)



sumber: ANTAM (diolah)

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tetap menjadi kontributor utama kedua inflasi Sumsel. Walaupun terjadi perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, tekanan harga bahan pangan masih terasa, khususnya dari beras, telur ayam ras, dan cabai rawit. Data Bank Indonesia menunjukkan harga beras terus naik setiap kuartal, mencapai Rp15.033/kg pada triwulan II 2025 dibanding Rp14.733/kg pada triwulan I. Hal serupa juga terjadi pada cabai rawit yang melonjak menjadi Rp63.233/kg pada triwulan II 2025 dari sebelumnya Rp47.517/kg di triwulan IV 2024, mencerminkan fluktuasi pasokan dan pengaruh musim. Kenaikan harga ini konsisten dengan andil kelompok bahan makanan terhadap inflasi kelompok makanan secara keseluruhan.

Grafik 1.22. Perkembangan Harga Pangan di Wilayah Sumsel (Rp)



sumber: Bank Indonesia (diolah)

Kontribusi kelompok lain seperti Rekreasi, Pendidikan, dan Penyediaan Makanan/Minuman turut memperkuat tekanan inflasi struktural. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya mengalami inflasi 2,28% dengan andil 0,04%, sedangkan Pendidikan tercatat tumbuh 1,86% (yoy). Walaupun tidak sekuat dua kelompok utama, kelompok ini menunjukkan peningkatan permintaan dan aktivitas ekonomi masyarakat kelas

menengah, yang secara tidak langsung memperkuat ekspektasi inflasi. Ini juga mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat Sumsel yang mulai pulih dan meluas ke sektor nonpokok.

Dari sisi spasial, Kabupaten Muara Enim kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Sumatera Selatan pada Juni 2025, yakni sebesar 3,31%, disusul Ogan Komering Ilir (2,15%) dan Palembang (1,97%). Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Kota Lubuk Linggau sebesar 1,82%. Meskipun seluruh daerah masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5\% \pm 1\%$, posisi Muara Enim yang hampir melewati batas atas target inflasi menandakan tekanan harga yang relatif tinggi dan perlu diwaspadai, terutama karena Muara Enim konsisten mencatat inflasi di atas rerata provinsi selama beberapa bulan terakhir.

Grafik 1.23. Perkembangan Inflasi Tahunan Antar Kabupaten/Kota di Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Kontributor utama inflasi antarwilayah relatif seragam, didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Beras menjadi penyumbang terbesar inflasi di hampir seluruh wilayah, termasuk Muara Enim dan OKI, yang masing-masing mencatat andil 0,14% dan 0,14% (m-to-m). Selain itu, emas perhiasan kembali memberikan tekanan inflasi, terutama di OKI dan Palembang, seiring tren kenaikan harga global. Komoditas lain seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan tomat juga turut mendorong inflasi, mencerminkan adanya tekanan pasokan pangan musiman dan volatilitas harga pangan strategis.

Namun demikian, terdapat pula komoditas penahan inflasi (deflasi), yang memberikan variasi tekanan antarwilayah. Cabai merah dan bawang putih menjadi penekan harga yang cukup konsisten, terutama di Palembang dan Lubuklinggau. Misalnya, cabai merah mencatat deflasi sebesar 0,05% (Palembang) dan 0,07% (Lubuklinggau), sedangkan bawang putih menahan inflasi hingga 0,13% di Muara Enim. Deflasi ini mencerminkan keberhasilan stabilisasi pasokan, panen lokal, maupun respons distribusi dari Satgas Pangan.

Kesenjangan inflasi antarwilayah mencerminkan perbedaan struktur pasokan, pola konsumsi, dan efektivitas pengendalian harga di masing-masing daerah. Daerah seperti Muara Enim dan OKI yang lebih rentan terhadap tekanan harga pangan dan energi memerlukan penguatan koordinasi pengendalian inflasi, baik melalui optimalisasi cadangan pangan, distribusi yang efisien, maupun sinergi program perlindungan sosial. Sementara itu, daerah dengan tekanan inflasi yang lebih terkendali seperti Lubuk Linggau dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan stabilisasi harga.

Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, terdapat empat kelompok pengeluaran yang perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi pendorong inflasi di Semester II 2025, yaitu makanan-minuman-tembakau, transportasi, pakaian dan alas kaki, serta pendidikan. Risiko inflasi pada kelompok pakaian dan pendidikan diperkirakan meningkat pada periode Juni–Juli, seiring momen tahun ajaran baru dan libur sekolah yang memicu kenaikan harga pakaian, sepatu, serta tarif akademi, kursus, atau bimbingan belajar. Sementara itu, risiko inflasi pada kelompok makanan dan transportasi cenderung meningkat pada Juli dan Desember, didorong oleh konsumsi tinggi saat musim libur dan potensi kenaikan harga BBM yang dapat memicu lonjakan tarif angkutan. Selain itu, inflasi ini juga mendapat tekanan dari lonjakan harga emas dunia, yang meningkat tajam akibat ketidakpastian geopolitik. Temuan ini menegaskan perlunya antisipasi terhadap gejolak harga komoditas global serta momen musiman domestik yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Selain itu, inflasi pangan masih menjadi ancaman struktural di Sumsel. Bank Indonesia memproyeksikan empat komoditas utama (beras, bawang merah, cabai merah, dan daging ayam ras) akan mengalami tekanan harga signifikan pada Semester II 2025. Harga beras telah melampaui HET sebesar Rp15.200/kg, sementara bawang merah juga menembus HAP dengan harga Rp42.900/kg pada Juli 2025. Kenaikan harga ini tidak hanya mencerminkan faktor musiman (seperti panen gadu) tetapi juga persoalan struktural seperti defisit neraca konsumsi, rendahnya produktivitas akibat minimnya penggunaan benih unggul dan pupuk bersubsidi, serta ketergantungan pada benih lokal. Cabai merah, misalnya, diperkirakan mengalami lonjakan harga pada triwulan IV 2025 karena orientasi produksi masih dominan di sektor hulu dengan karakteristik benih yang rentan terhadap penyakit. Dengan kondisi tersebut, proyeksi inflasi pangan berpotensi menggerus daya beli, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan perlu mendapat perhatian melalui kebijakan stabilisasi harga dan penguatan produksi lokal.

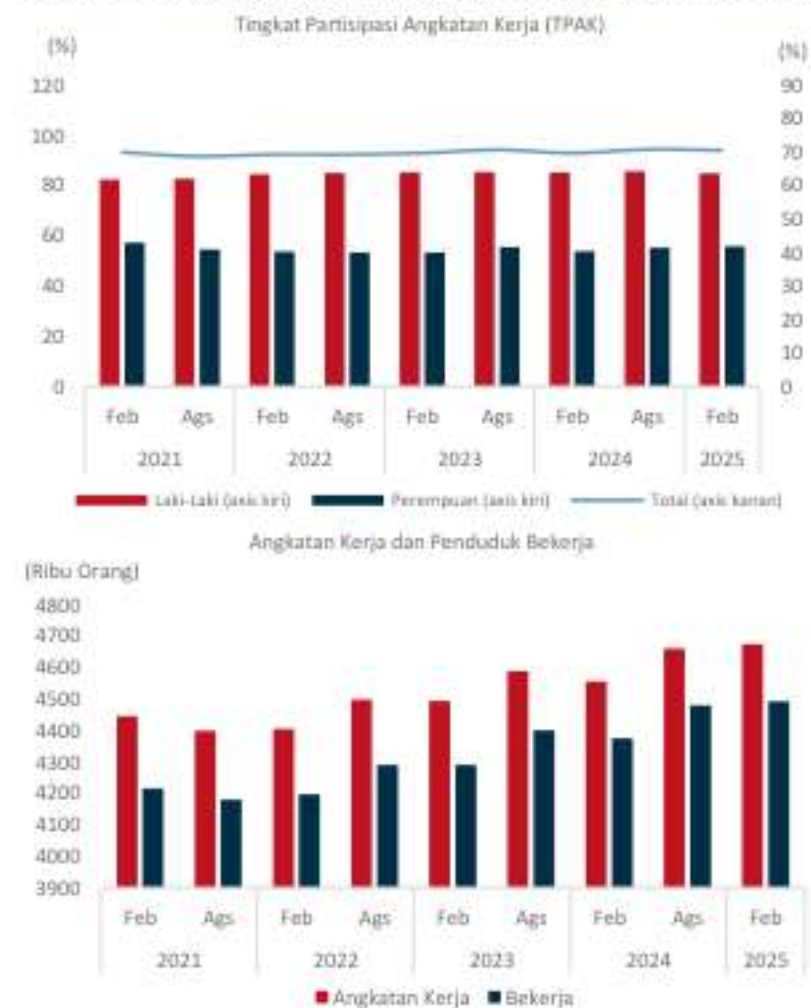
Inflasi *administered price* di Sumatera Selatan diproyeksikan oleh Bank Indonesia berpotensi meningkat pada semester II 2025. Tekanan utama bersumber dari dua faktor dominan, yakni kenaikan HET LPG 3 kg dan rencana penyesuaian tarif ojek *online*, yang keduanya memberikan tekanan inflasi terutama di wilayah perkotaan. Harga pasar LPG 3 kg di Sumsel telah meningkat signifikan dari Rp20.000/tabung pada awal tahun menjadi Rp25.000/tabung per Mei 2025, jauh di atas HET yang ditetapkan Rp18.500/tabung. Kenaikan harga ini tidak hanya berdampak langsung pada biaya energi rumah tangga dan UMKM, tetapi juga menciptakan efek *multiplier* terhadap kelompok pengeluaran lain, terutama akomodasi dan makanan-minuman. Sementara itu, rencana kenaikan tarif ojek *online* sebesar hingga 15% berdasarkan zonasi tarif nasional juga akan menjadi *upside risk* tambahan, khususnya untuk wilayah Zona I yang mencakup Sumatera Selatan. Jika kebijakan ini terealisasi, akan berdampak terhadap kenaikan biaya transportasi pribadi dan jasa, memperluas tekanan *administered price* secara keseluruhan. Namun demikian, potensi tekanan ini diperkirakan tertahan oleh faktor *downside*, seperti bertambahnya frekuensi penerbangan dari dan ke Palembang, pengembalian status Bandara SMB II sebagai bandara internasional, serta diversifikasi moda transportasi yang lebih terjangkau. Dalam jangka menengah, perlu diwaspadai pula risiko lanjutan dari tingginya harga minyak mentah dunia, yang dapat berdampak pada BBM subsidi dan non-subsidi apabila terjadi penyesuaian harga.

1.2. Perkembangan Indikator Kesejahteraan

1.2.1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Sumatera Selatan pada Februari 2025 menunjukkan perbaikan secara umum dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 4,67 juta orang, meningkat 117,60 ribu orang dibandingkan Februari 2024, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 4,49 juta orang (naik 116,88 ribu orang). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turut mengalami kenaikan sebesar 0,81 poin persen menjadi 70,56%. Kenaikan TPAK ini lebih didorong oleh peningkatan partisipasi perempuan (+1,98 poin) dibandingkan laki-laki yang justru mengalami penurunan (-0,32 poin), menunjukkan tren positif pemberdayaan tenaga kerja perempuan di pasar kerja Sumsel.

Grafik 1.24. Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan TPAK Sumsel



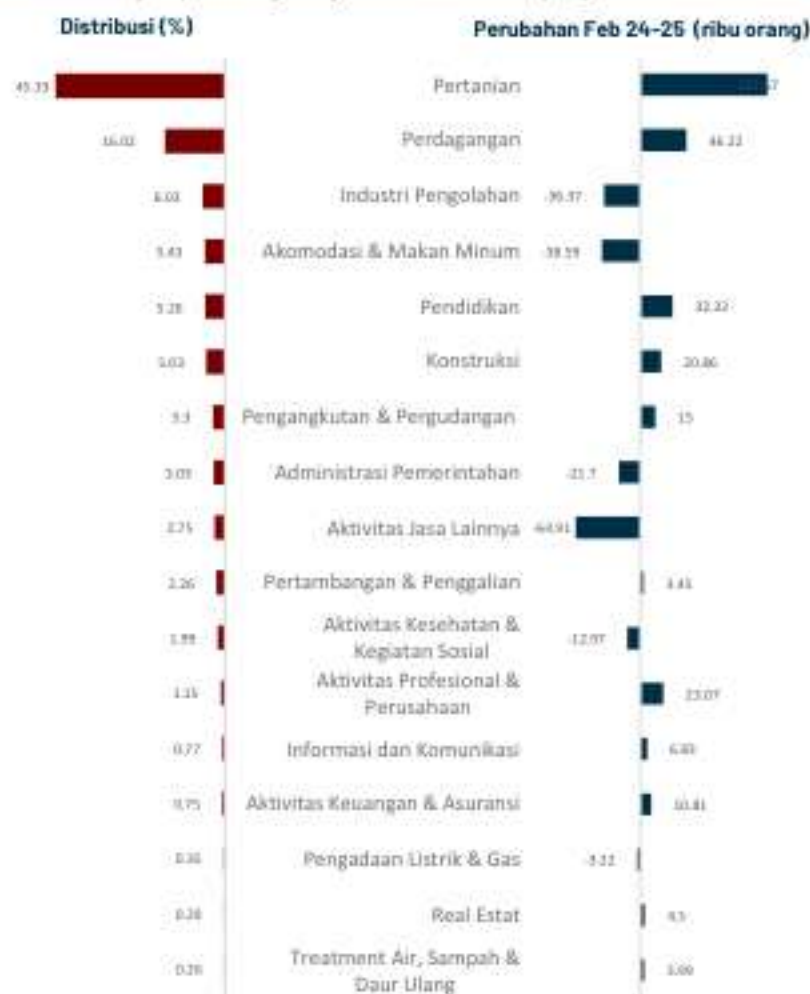
sumber: BPS Sumsel (diolah)

Sektor Pertanian tetap menjadi penopang utama penyerap tenaga kerja di Sumsel, baik secara struktural maupun dalam perubahan tahunan. Sebanyak 45,33% penduduk bekerja bergerak di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, meningkat signifikan sebanyak 127,57 ribu orang secara tahunan. Sektor Perdagangan menyerap 16,02% dan mengalami kenaikan sebesar 46,22 ribu orang, diikuti sektor Pendidikan yang naik 32,32 ribu orang. Sebaliknya, sektor Industri Pengolahan justru mengalami penurunan tenaga kerja sebesar 36,37 ribu orang, menjadi perhatian tersendiri di tengah perannya sebagai sektor prioritas hilirisasi.

Komposisi pekerjaan berdasarkan status menunjukkan dominasi pekerjaan informal, meski terdapat peningkatan kecil pada pekerja formal. Proporsi pekerja informal tercatat sebesar 63,26%, lebih tinggi dari pekerja formal yang hanya 36,74%. Namun demikian, status buruh/karyawan/pegawai tetap menjadi kelompok terbanyak (33,20%), dan kelompok ini mengalami peningkatan secara jumlah absolut. Di sisi lain, pekerja bebas di pertanian meningkat, sementara pekerja berusaha sendiri justru menurun 4,52 poin persen, yang bisa

mengindikasikan konsolidasi usaha mikro atau peralihan ke sektor informal lain.

Grafik 1.25. Penyerapan Tenaga Kerja Sumsel Menurut Lapangan Usaha Februari 2025

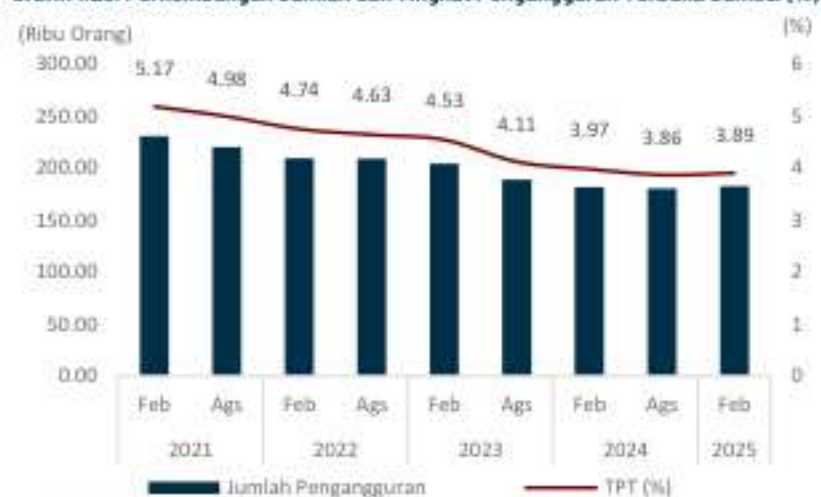


sumber: BPS Sumsel (diolah)

Kualitas kerja juga menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya pekerja penuh dan menurunnya setengah pengangguran. Pada Februari 2025, proporsi pekerja penuh (≥ 35 jam/minggu) mencapai 60,37%, naik 1,43 poin persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat setengah pengangguran turun dari 11,22% menjadi 9,20%, dan pekerja paruh waktu sedikit naik ke 30,43%. Penurunan setengah pengangguran ini menandakan perbaikan utilisasi tenaga kerja di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi pasca pemulihan konsumsi dan proyek strategis nasional.

Dari sisi pendidikan, mayoritas penduduk bekerja masih berpendidikan rendah, namun tren pendidikan tinggi menunjukkan peningkatan. Sebanyak 39,96% tenaga kerja masih lulusan SD ke bawah, namun proporsinya menurun dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, proporsi pekerja dengan pendidikan menengah atas dan tinggi (SMA dan universitas) mengalami peningkatan, menunjukkan arah perbaikan kualitas SDM dalam jangka panjang. Kelompok lulusan diploma dan sarjana menyumbang 11,55% dari total pekerja, menjadi potensi basis tenaga terampil yang mendukung sektor formal dan industri strategis.

Grafik 1.26. Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

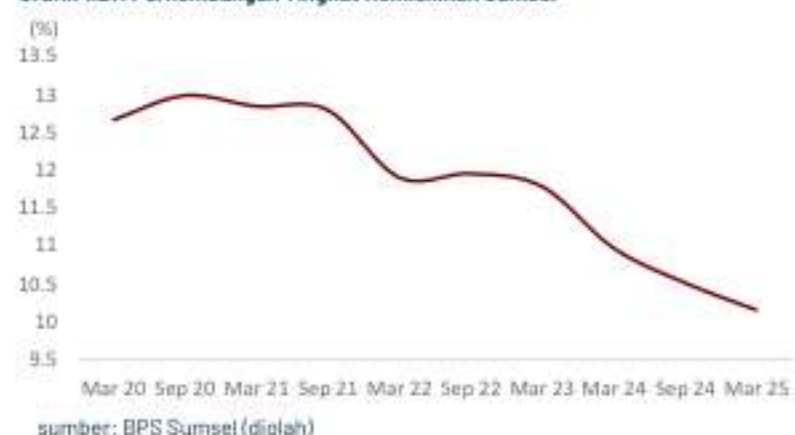
Indikator pengangguran juga membaik, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,89%. Penurunan sebesar 0,08 poin persen dari Februari 2024 ini terjadi seiring peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun TPT perkotaan masih lebih tinggi (5,49%) dibanding perdesaan (2,87%), yang mencerminkan adanya *mismatch* keterampilan atau kebutuhan kerja formal yang belum optimal di wilayah urban. Secara pendidikan, lulusan SMK masih mencatatkan TPT tertinggi (10,21%), mengindikasikan tantangan *link and match* antara dunia pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja.

Dengan demikian, pasar tenaga kerja Sumsel sampai dengan Triwulan II tahun 2025 menunjukkan pemulihan yang menggembirakan, meskipun masih terdapat tantangan struktural seperti tingginya pekerja informal, ketimpangan wilayah, dan pengangguran terdidik. Upaya penguatan pelatihan vokasional, sertifikasi tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja formal menjadi krusial dalam menjaga kesinambungan perbaikan ketenagakerjaan di provinsi Sumsel.

1.2.2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan Sumsel masih berada dalam tren perbaikan. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan Sumsel berada di angka 10,15%, turun 0,36 poin persen dari September 2024 yang sebesar 10,51%. Berdasarkan wilayah, kemiskinan di wilayah Pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Pedesaan tercatat di angka 10,79% dan perkotaan 9,10%. Namun persentase penduduk miskin perkotaan mengalami kenaikan 0,08 poin jika dibandingkan September 2024, sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan meskipun per Maret 2025 masih lebih tinggi, namun mengalami penurunan sebesar 0,64 poin jika dibandingkan dengan September 2024. Hal ini menunjukkan, meskipun secara keseluruhan tingkat kemiskinan Sumsel masih berada pada tren perbaikan, peningkatan kemiskinan di perkotaan mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Hal ini menandakan perlunya intervensi yang lebih spesifik dan terfokus untuk mengatasi tantangan kemiskinan.

Grafik 1.27. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

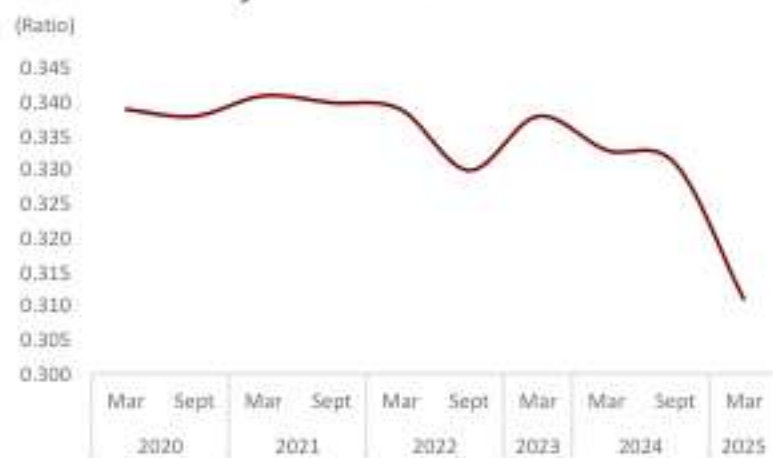
Perbaikan tingkat kemiskinan Sumsel per Maret 2025 masih terkoreksi oleh peningkatan tingkat kedalaman (P1) maupun keparahan (P2). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumsel per Maret 2025 di angka 1,642, naik dari September 2024 yang diangka 1,449. Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Sumsel cenderung menjauh dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumsel (P2) per Maret 2025 di angka 0,371, naik dari September 2024 yang tercatat 0,316, yang mengindikasikan

bahwa ketimpangan antar penduduk miskin di Sumsel sedikit meningkat.

Komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan Sumsel. Per Maret 2025, komoditas makanan berkontribusi sebesar 75,06% dari total garis kemiskinan, dengan beras, rokok kretek filter, daging ayam, telur ayam ras, gula pasir dan mie instan sebagai komoditas dominan. Sementara itu, komoditas non makanan yang dominan menyumbang garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Kondisi ketimpangan Sumsel per Maret 2025 mengalami penurunan. *Gini Ratio* Sumsel tercatat di angka 0,311, turun dari periode September 2024 yang sebesar 0,331. Membaiknya tingkat ketimpangan tersebut tidak terlepas dari program pemerintah yang memberikan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Grafik 1.28. Perkembangan Gini Ratio Sumsel

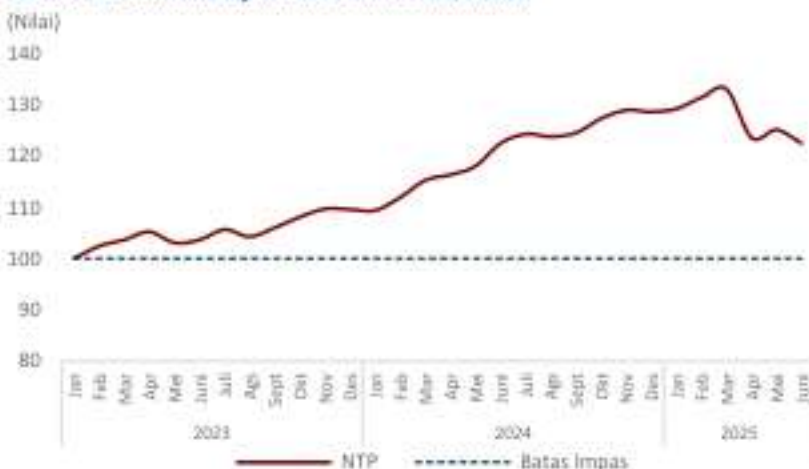


sumber: BPS Sumsel (diolah)

1.2.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Selatan Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 2,10% dibanding bulan Mei 2025, mencerminkan memburuknya daya beli dan efisiensi usaha tani. NTP Sumsel tercatat sebesar 122,38, menurun 2,10% (mtm) dari Mei 2025 (125,01). Penurunan ini disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima petani (-2,06%) di tengah kenaikan tipis indeks harga yang dibayar petani (0,04%), yang mencerminkan tergerusnya daya beli petani, penurunan NTP ini menunjukkan bahwa pendapatan petani mengalami penurunan akibat turunnya harga komoditas seperti cabai merah, kopi biji kering, dan karet. Sementara itu, kenaikan harga kebutuhan rumah tangga seperti telur, daging ayam, dan beras ikut memperburuk tekanan.

Grafik 1.29. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Penurunan NTP diakibatkan oleh subsektor Hortikultura dan Perkebunan Rakyat yang menunjukkan tren harga output lebih rendah dibanding input produksinya. Kenaikan nilai tukar petani subsektor tanaman pangan (NTPP) didorong oleh meningkatnya harga gabah dan palawija, sedangkan nilai tukar petani subsektor perkebunan rakyat (NTPR) turun akibat melemahnya harga karet, kopi, dan sawit, serta nilai tukar petani subsektor Peternakan (NTPPT) naik akibat kenaikan harga ayam ras dan telur ayam. Di sisi lain, NTP hortikultura mengalami penurunan tajam -3,87%, akibat jatuhnya harga cabai merah, kacang panjang, dan ketimun, yang tidak sebanding dengan naiknya biaya konsumsi dan produksi.

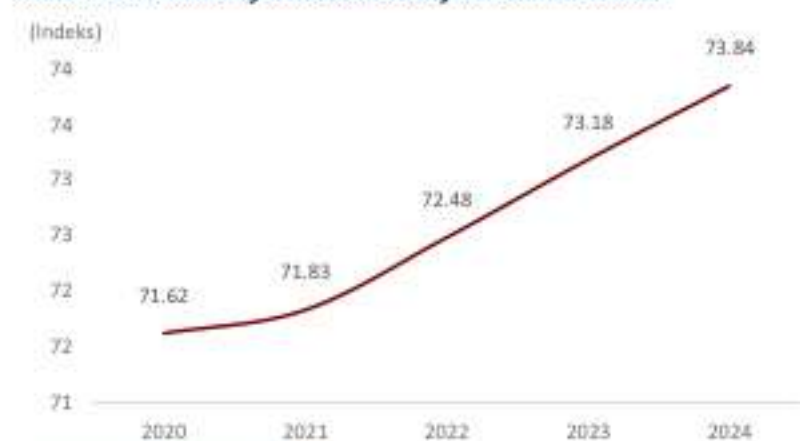
Dari sisi komponen pengeluaran petani, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) meningkat didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan dan energi rumah tangga, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) relatif stabil. Ini memperlihatkan bahwa inflasi yang dialami petani di sisi konsumsi relatif lebih tinggi dibanding biaya produksi, namun masih mampu diimbangi oleh pendapatan hasil produksi pertanian.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa daya beli dan kesejahteraan petani di Sumsel sedang mengalami pelemahan, terutama bagi petani hortikultura dan perkebunan, yang merupakan tulang punggung perekonomian pedesaan. Meski demikian, tantangan tetap hadir di subsektor hortikultura dan perikanan yang sensitif terhadap gejolak harga dan biaya distribusi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah untuk stabilisasi harga, penguatan kelembagaan petani, dan efisiensi rantai pasok tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan petani ke depan.

1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kinerja perekonomian Sumsel. IPM Sumsel tahun 2024 berada diangka 73,84, meningkat 0,90% dibandingkan tahun 2023. Namun demikian, IPM Sumsel dibawah IPM Nasional yang sebesar 74,29.

Grafik 1.30. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Dari dimensi pembentuk IPM, peningkatan terjadi disemua dimensi. Kenaikan tertinggi pada dimensi Pengeluaran Perkapita yang meningkat 3,26% (yoy), diikuti Rata-rata Lama Sekolah 1,55% (yoy), Angka Harapan Hidup 0,38% (yoy), dan Harapan Lama Sekolah meningkat 0,63% (yoy).



Boks 1

Analisis Perubahan Luas Lahan Terhadap Produksi Padi di Beberapa Kabupaten Provinsi Sumsel Hesti (Universitas Bina Darma)

LUAS LAHAN PADI DI LIMA KABUPATEN SUMSEL (2018-2024)



PRODUKSI PADI DI LIMA KABUPATEN SUMSEL (2018-2024)



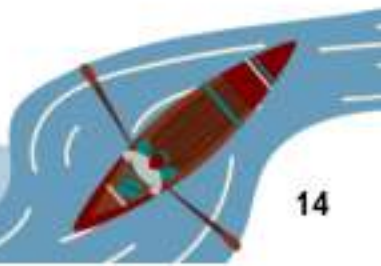
Sumatera Selatan memegang peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional, namun tekanan konversi lahan membuat produksi padi rentan menurun. Kontribusi Sumsel banyak ditopang kabupaten sentra Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, dan Musi Rawas (BPS Sumsel, 2025). Seiring pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur, persaingan pemanfaatan ruang mendorong alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian (Aryani, 2024). Secara deskriptif, Banyuasin mengalami penurunan luas sawah dari 212.648,57 ha (2018) menjadi 177.667,00 ha (2023) atau -16,5%, diiringi turunnya produksi dari 1.038.489,34 ton ke 920.413,00 ton (-11,4%). Musi Banyuasin bahkan menyusut dari 39.039,08 ha (2018) menjadi 25.001,00 ha (2024) (-35,9%), dengan produksi turun dari 176.385,25 ton ke 124.111,00 ton (-29,6%) (Mediana, 2021). Temuan ini menegaskan pernyataan bahwa luas areal panen, di samping produktivitas, adalah penentu utama produksi padi (Sutanto, 2023).

Dengan latar belakang dan studi pendahuluan tersebut, kajian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh perubahan luas panen terhadap produksi padi di Sumsel. Kajian dilakukan dengan menggunakan data BPS 2018–2024 pada kabupaten sentra. Variabel terikat adalah produksi padi (ton), sedangkan variabel penjelas utama adalah luas panen (hektare). Hubungan keduanya diestimasi dengan regresi linear sederhana (OLS), dengan uji t untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan luas panen terhadap produksi padi di Sumsel.

Hasil pada kajian ini menunjukkan bahwa luas panen berpengaruh signifikan terhadap produksi. Koefisien sebesar 2,750331 berarti setiap tambahan 1 hektare lahan panen berkaitan dengan kenaikan produksi sekitar 2,75 ton (ceteris paribus). Nilai $p = 0,0004$ ($<0,05$) menegaskan pengaruh ini signifikan secara statistik, dan $R^2 = 0,993654$ (=99,37%) menunjukkan hampir seluruh variasi produksi dalam sampel dijelaskan oleh perubahan luas panen. Temuan kuantitatif ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ketika lahan menyusut seperti di Banyuasin dan Musi Banyuasin produksi ikut turun, sementara daerah yang menjaga atau menambah lahan relatif lebih stabil.

Meski dominan, luas panen bukan satu-satunya faktor; komponen lain tetap menentukan hasil akhir. Masih ada sekitar 0,63% variasi produksi yang tidak dijelaskan model, yang mengindikasikan peran iklim/cuaca dan ketersediaan air, mutu dan pemeliharaan irigasi, varietas benih dan pemupukan, tingkat mekanisasi, serta manajemen budidaya (Ramadhan, 2023). Dengan demikian, strategi peningkatan produksi perlu menjaga luas lahan sekaligus mengerek produktivitas per hektare.

Implikasi kebijakan yang langsung dapat ditempuh adalah melindungi lahan pangan dan memperkuat faktor penunjang produktivitas. Pertama, perlu untuk dilakukan pengendalian alih fungsi melalui penetapan/penegakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) khususnya di kabupaten sentra. Kedua, perlunya percepatan perbaikan irigasi saluran tersier/kuarter agar musim tanam tidak hilang. Ketiga, perlunya untuk memastikan input pertanian (benih unggul, pupuk, dan mekanisasi) tersedia tepat waktu dan lokasi. Keempat, perlunya menerapkan manajemen risiko iklim (kalender tanam adaptif, peringatan dini banjir/kekeringan, dan asuransi usaha tani). Untuk riset lanjutan, masukkan variabel-variabel iklim, irigasi, dan input ke dalam model penelitian agar hasil semakin baik dan aplikatif bagi perumusan kebijakan.





Perkembangan Fiskal Regional

Pada Triwulan II tahun 2025, kinerja pelaksanaan anggaran di Provinsi Sumatera Selatan mencerminkan kondisi fiskal yang relatif stabil di tengah dinamika kebijakan nasional dan transisi pemerintahan. Baik dari sisi APBN maupun APBD, pengelolaan pendapatan dan belanja menunjukkan upaya menjaga keseimbangan fiskal, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural seperti penurunan pendapatan dan tekanan efisiensi anggaran.

- Kinerja pelaksanaan APBN di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp6,63 triliun atau 37,06% dari target tahunan, dengan pertumbuhan 4,07% (yoy). Penerimaan perpajakan tumbuh positif, meskipun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami penurunan akibat penurunan pendapatan negara bukan Pajak badan layanan umum (PNBP BLU) sebagai dampak dari perubahan status satker pada Universitas Sriwijaya dari BLU menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH). Apabila mengecualikan perhitungan transformasi PNBP BLU Universitas Sriwijaya, kinerja PNBP BLU untuk lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,99%. Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp19,92 triliun atau 40,31% dari pagu, menurun 11,50% (yoy). Walaupun demikian, peran daripada belanja transfer ke daerah mampu mengimbangi perlambatan pada belanja barang dan belanja modal, turut menjaga kinerja belanja negara di Sumatera Selatan agar tetap stabil di tengah upaya efisiensi yang sedang berlangsung.
- Kinerja APBD Sumatera Selatan cukup terkendali. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp18,42 triliun atau 38,90% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 5,44% (yoy). Walaupun pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan sebesar 81,97% menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan belanja di daerah. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat senilai Rp13,97 triliun atau 28,56% dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan negatif sebesar 20,38% (yoy).
- Penurunan kinerja belanja yang terjadi pada pelaksanaan APBN dan APBD di Sumatera Selatan disebabkan oleh perlambatan realisasi dan penurunan alokasi anggaran belanja akibat dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara melalui mekanisme pemotongan langsung, pengalihan anggaran dari kegiatan nonprioritas ke yang lebih prioritas (program prioritas pemerintah), dan blokir anggaran.



2.1. Pelaksanaan APBN Sumsel

APBN merupakan instrumen fiskal yang berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pada tahun 2025, fungsi ini dijalankan melalui kebijakan fiskal yang mengusung tema "Akselerasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Fokus kebijakan mencakup peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, transisi ekonomi hijau, optimalisasi pendapatan negara, penguatan perlindungan sosial, serta efisiensi dan stabilisasi anggaran. Melalui APBN, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya tahan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Salah satu fokus kebijakan fiskal tahun 2025 adalah penguatan fondasi fiskal secara holistik melalui pendekatan *collecting more*, yaitu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN. Di Provinsi Sumatera Selatan, target pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp17,88 triliun (data per 30 Juni 2025), turun 20,39% dibanding periode yang sama pada tahun 2024. Target pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp15,21 triliun, penerimaan negara bukan pajak

(PNBP) sebesar Rp2,40 triliun, serta penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp258,10 miliar.

Selain penguatan dari sisi pendapatan, fondasi fiskal juga diperkuat melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) sebagai upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan ketidakpastian global dan domestik. Hingga 30 Juni 2025, alokasi belanja negara di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp49,43 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp15,79 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp33,64 triliun. Dibandingkan tahun 2024, terjadi penurunan total alokasi belanja sebesar 7,36%, yang terutama disebabkan oleh turunnya alokasi belanja pemerintah pusat. Penurunan paling signifikan terjadi pada jenis belanja modal, yang tercatat

Hingga triwulan II 2025, kinerja belanja negara di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan masih ditopang oleh kuatnya realisasi belanja pegawai dan TKD. Walaupun kinerja realisasi belanja negara mengalami kontraksi, realisasi belanja pegawai dan realisasi TKD mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Optimalnya penyerapan belanja pegawai dan TKD mampu mengimbangi perlambatan pada belanja barang dan belanja modal, serta turut menjaga kinerja belanja negara di Sumatera Selatan agar tetap stabil di tengah upaya efisiensi yang tengah berlangsung.

Tabel 2.1. Laporan Realisasi APBN Lingkup Wilayah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024-2025 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2024			TA 2025			% Growth	
	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	22.455,30	6.366,56	28,35	17.877,44	6.625,50	37,06	-20,39	4,07
Penerimaan Perpajakan	20.074,82	4.904,87	24,43	15.471,69	5.300,61	34,26	-22,93	8,07
Penerimaan Pajak	19.743,59	4.753,68	24,08	15.213,59	5.043,64	33,15	-22,94	6,10
Penerimaan Kepabeanan & Cukai	331,22	151,19	45,65	258,10	256,97	99,56	-22,08	69,97
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.380,48	1.461,69	61,40	2.405,74	1.324,89	55,07	1,06	-9,36
PNBP Lainnya	506,36	491,29	97,02	487,96	531,58	108,94	-3,63	8,20
Pendapatan Badan Layanan Umum	1.874,12	970,40	51,78	1.917,78	793,31	41,37	2,33	-18,25
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Negara	53.355,15	22.510,99	42,19	49.429,22	19.923,17	40,31	-7,36	-11,50
Belanja Pemerintah Pusat	21.097,86	8.181,86	38,78	15.789,68	5.381,90	34,08	-25,16	-34,22
Belanja Pegawai	5.796,34	3.167,92	54,65	6.290,77	3.408,00	54,17	8,53	7,58
Belanja Barang	8.964,06	3.122,15	34,83	7.275,83	1.770,91	24,34	-18,83	-43,28
Belanja Modal	6.308,73	1.877,73	29,76	2.195,48	188,66	8,59	-65,20	-89,95
Belanja Bantuan Sosial	28,73	14,06	48,94	27,61	14,34	51,94	-3,91	1,97
Transfer Ke Daerah	32.257,30	14.329,13	44,42	33.639,54	14.541,27	43,23	4,29	1,48
Dana Bagi Hasil	11.205,62	1.467,03	13,09	11.120,57	1.897,46	17,06	-0,76	29,34
Dana Alokasi Umum	13.648,50	6.825,67	50,01	14.005,31	6.698,98	47,83	2,61	-1,86
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.430,07	93,95	6,57	927,04	38,10	4,11	-35,18	-59,45
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4.246,84	2.155,93	50,77	5.016,96	2.406,97	47,98	18,13	11,64
Dana Desa	2.594,87	1.280,86	49,36	2.495,22	1.285,28	51,51	-3,84	0,34
Dana Insentif Fiskal	246,51	36,74	14,90	74,43	37,22	50,00	-69,81	1,30
Hibah ke Daerah	120,88	4,79	3,96	-	-	-	-100,00	-
Surplus/Defisit Anggaran	(30.899,85)	(16.144,43)	52,25	(31.551,79)	(13.297,67)	42,15	2,11	(17,63)

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim, dan Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, Babel (diolah)





2.1.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Kinerja realisasi pendapatan negara secara agregat terpantau tumbuh positif, meskipun terdapat penurunan dari sisi realisasi pendapatan pajak penghasilan dan realisasi PNBP. Realisasi pendapatan negara di Sumsel mencapai Rp6,63 triliun atau tumbuh 4,07% dan mencapai 37,06% dari pagu.

Grafik 2.1. Perkembangan Pendapatan Negara Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)

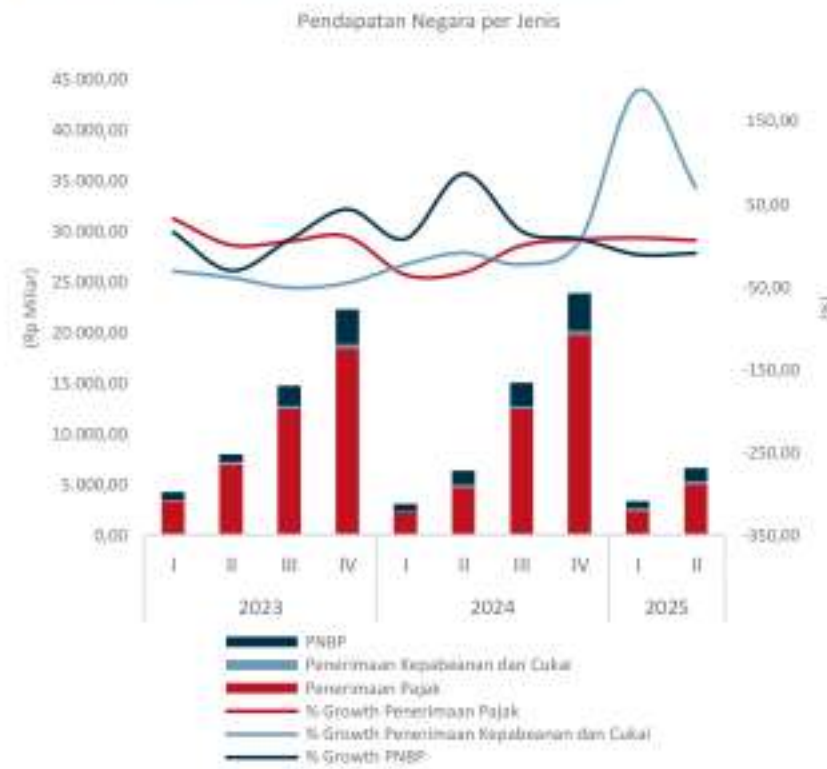


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim, dan Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, Babel (diolah)

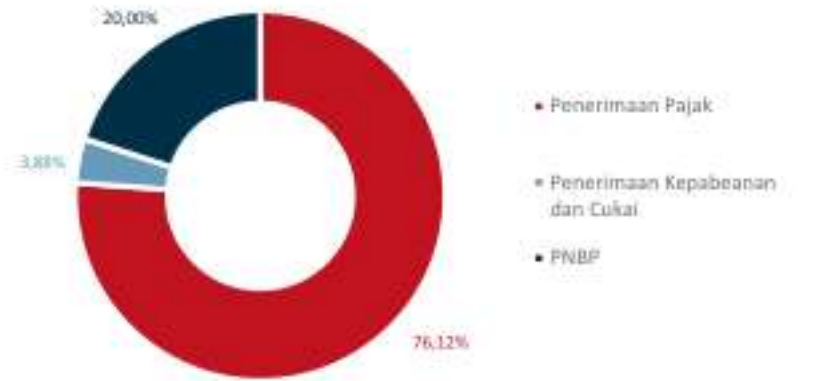
Pendapatan negara di Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan, terutama didorong oleh meningkatnya kinerja penerimaan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Badan serta penerimaan Bea Keluar/Pungutan Ekspor. Penerimaan pajak masih menjadi kontributor utama pendapatan negara di Sumsel, dengan kontribusi mencapai 76,12%. Secara tahunan (y o y), penerimaan pajak di Sumsel tumbuh positif sebesar 6,10%, didorong oleh peningkatan setoran masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Badan dari komoditas unggulan, serta ditopang oleh kenaikan harga patokan ekspor (HPE) dan meningkatnya volume ekspor produk CPO dan turunannya.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kontraksi sebesar 9,36%, dengan capaian sebesar Rp1,32 triliun atau 55,07% dari target. Penurunan terutama disebabkan oleh melemahnya kinerja pendapatan BLU, yang dipengaruhi oleh transisi kelembagaan yaitu perubahan status Universitas Sriwijaya dari BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang berdampak pada mekanisme pencatatan dan pengesahan pendapatan, terutama pada sektor pendidikan, serta kendala dalam proses klaim BPJS di sektor layanan kesehatan. Walaupun demikian, PNBP tetap menjadi kontributor kedua terbesar terhadap pendapatan negara di Sumsel dengan porsi sebesar 20,00%.

Grafik 2.2. Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Negara per Jenis Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)

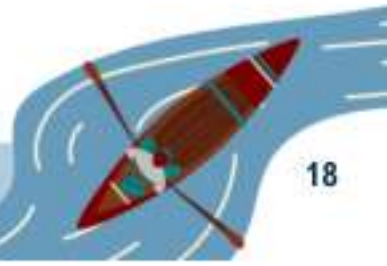


Kontribusi Pendapatan Negara s.d. Triwulan II 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Penerimaan kepabebean dan cukai secara keseluruhan mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun terjadi kontraksi pada sisi penerimaan bea masuk. Total penerimaan kepabebean dan cukai terealisasi sebesar Rp256,97 miliar, tumbuh sebesar 69,97% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kinerja ekspor Sumatera Selatan yang membaik, kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE) dibandingkan periode sebelumnya pada tahun yang sama, serta peningkatan volume ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, yang mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 10,12% (yoy). Namun demikian, peningkatan aktivitas ekspor tidak diikuti oleh kinerja impor yang sejalan, penerimaan dari bea masuk justru mengalami kontraksi sebesar 71,42%, terutama disebabkan oleh penurunan impor beberapa jenis barang seperti beras dan bahan baku karet. Secara keseluruhan penerimaan kepabebean dan cukai menyumbang sebesar 3,87% terhadap total pendapatan negara di Sumatera Selatan.

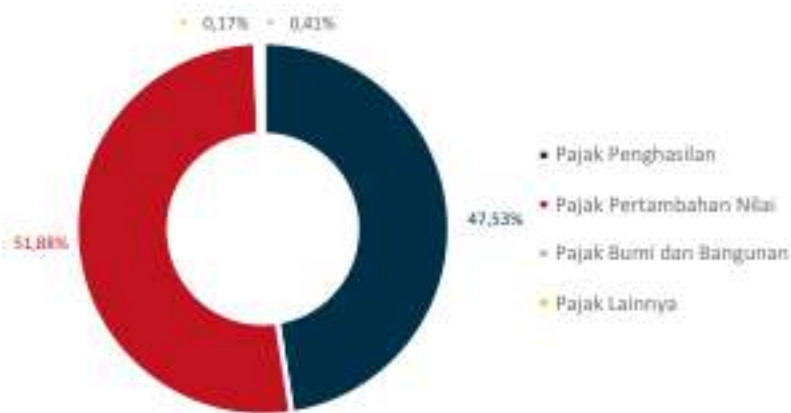




2.1.1.1. Penerimaan Pajak

Pertumbuhan penerimaan pajak di Sumatera Selatan mencerminkan bahwa perekonomian daerah berada dalam perkembangan yang positif. Hingga triwulan II 2025, total penerimaan pajak mencapai Rp5,04 triliun dengan target Rp15,21 triliun atau 33,15% dari target yang ditetapkan, tumbuh sebesar 6,10% secara tahunan (yoy). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar untuk total penerimaan pajak lingkup Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi penyumbang signifikan dengan kontribusi terbesar sebagai dampak dari penerapan tarif TER dan sisanya menjadi kontribusi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pendapatan Pajak Lainnya.

Grafik 2.3. Kontribusi per Jenis Pajak Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Kelompok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor utama dalam total penerimaan pajak di Sumatera Selatan. Hingga triwulan II 2025, penerimaan dari kelompok PPN mencapai Rp2,62 triliun atau 27,92% dari target tahunan. Kinerja positif ini didorong oleh meningkatnya setoran masa PPN yang bersumber dari aktivitas sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Kedua komoditas unggulan ini mencatat pertumbuhan signifikan, seiring tingginya permintaan dan harga komoditas global, serta meningkatnya volume ekspor. Selain itu, penyesuaian perpindahan penerimaan dari wajib pajak akibat implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis *Coretax* (PMK/81/2024) turut mendorong peningkatan penerimaan pada kelompok ini. Walaupun secara keseluruhan kinerja PPN Positif, PPN Impor mengalami kontraksi senilai 12,6%, implikasi dari menurunnya

aktivitas impor bahan baku, konsumsi, dan modal dengan kontribusi terbesar dari komoditas karet dan perdagangan besar.

Kelompok Pajak Penghasilan (PPh) menjadi kontributor kedua terbesar dalam total penerimaan pajak di Sumatera Selatan. Hingga triwulan II 2025, penerimaan dari kelompok PPh mencapai Rp2,40 triliun atau 42,31% dari target tahunan, terkontraksi sebesar 5,73% . Kinerja positif ini didorong oleh meningkatnya setoran PPh Tahunan atas Badan (1,7%) terkait aktivitas komoditas kelapa sawit dan karet dan disusul oleh PPh 23 (43,3%) karena kenaikan setoran masa atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atas aktivitas pengelolaan kehutanan dan penebangan, kenaikan PPh atas orang pribadi (36,9%) sebagai peningkatan atas pembayaran tahunan wajib pajak orang pribadi dan profesi tenaga kesehatan dan karyawan BUMN, serta setoran PPh 22 (28,4%) yang juga dikarenakan pembelian barang hasil pertanian dari industri komoditas karet dan kelapa sawit (unggulan). Selain itu, kontraksi terbesar untuk komponen PPh terjadi pada PPh 21 sebesar 33, 8% dikarenakan perubahan administrasi pembayaran sertifikasi guru yang semula dibayarkan pada Dinas Pendidikan Provinsi dan sekarang dialihkan ke Kementerian Pendidikan Pusat, diikuti oleh PPh Final sebesar 19,5% akibat dari adanya kegiatan pelaksanaan jasa konstruksi yang sudah selesai tahun lalu serta dampak kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.

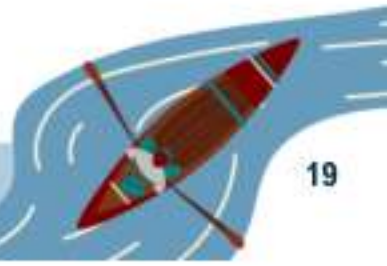
Kelompok Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan juga mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data, pendapatan pajak bumi dan bangunan baru terealisasi senilai Rp20,71 triliun dengan target Rp155,81 triliun atau senilai 13,29%. Pertumbuhan komponen penerimaan ini mencapai 14,26%(yoy).

Kelompok Pendapatan Pajak Lainnya cukup mengalami kontraksi. Pendapatan Pajak Lainnya terdiri dari komponen bea meterai, penjualan benda meterai, pajak tidak langsung lainnya (PTLL), bunga penagihan PPh, bunga penagihan PPN, bunga penagihan PPNBM, bunga penagihan PTLL, pemberitahuan impor barang (PIB), dan PPN batu bara. Berdasarkan capaian, angka realisasi pendapatan pajak lainnya berada pada angka Rp8,79 triliun dengan target Rp19,83 triliun, atau senilai 44,33%. Kontraksi yang terjadi mencapai angka 54,15% (yoy). Adapun rincian mengenai penerimaan per kelompok pajak tergambar pada Tabel 2.2 sebagaimana berikut.

Tabel 2.2 Penerimaan Per Kelompok Pajak Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)

Kelompok Pajak (Rp Miliar)	2024			2025			Growth (%)	Share Kelompok Pajak TA 2025 (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Pajak Penghasilan (PPh)	8.832,22	2.543,22	28,79	5.666,91	2.397,42	42,31	-5,73	47,53%
PPN & PPNBM	8.484,68	2.173,17	25,61	9.371,04	2.616,72	27,92	20,41	51,88%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	2.268,48	18,12	0,80	155,81	20,71	13,29	14,26	0,41%
Pendapatan Pajak Lainnya	158,20	19,17	12,12	19,83	8,79	44,33	-54,15	0,17%
Total Penerimaan Pajak	19.743,59	4.753,68	24,43	15.213,59	5.043,64	33,15	69,97	100,00%

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)





2.1.1.1.1 Analisis Kinerja Perpajakan menurut Sektor /Lapangan Usaha

Hingga triwulan II 2025, **Sektor Perdagangan Besar dan Eceran memiliki kontribusi penerimaan Perpajakan terbesar** yaitu sebesar Rp1.596,90 miliar dengan kontribusi sebesar 31,66% diikuti oleh Industri Pengolahan dan pertanian, kehutanan, dan perikanan secara berturut-turut yaitu senilai Rp915,92 miliar dan Rp914,67 miliar atau sebesar 18,16% dan 18,14%. Selanjutnya ada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan

jaminan sosial wajib senilai Rp751,68 miliar (14,90%), pengangkutan dan pergudangan senilai Rp367,36 miliar (7,28%), aktivitas keuangan dan asuransi senilai Rp293,64 miliar (5,82%), aktivitas badan internasional, badan ekstra internasional lainnya senilai Rp185,99 miliar (3,69%), dan konstruksi senilai Rp90,02 miliar (1,78%). Sedangkan selebihnya merupakan gabungan dari penerimaan perpajakan diluar sektor dominan yang telah disebutkan sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)

Nama Sektor (Rp Miliar)	Realisasi		Growth (%)	Kontribusi
	s.d. Juni 2024	s.d. Juni 2025		
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.247,06	1.596,90	28,05	31,66%
Industri Pengolahan	472,14	915,91	93,99	18,16%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	515,76	914,68	77,34	18,14%
Administrasi Pemerintahan, Petahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.105,32	751,68	-31,99	14,90%
Pengangkutan dan Pergudangan	288,82	367,36	27,19	7,28%
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	305,03	293,64	-3,743	5,82%
Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	145,29	185,99	28,01	3,69%
Konstruksi	87,96	90,02	2,34	1,78%
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	73,56	76,92	4,56	1,53%
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	65,22	63,15	-3,17	1,25%
Real Estate	45,49	48,74	7,15	0,97%
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Sampah, dan Aktivitas Remediasi	28,36	32,96	16,21	0,65%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	25,75	26,65	3,49	0,53%
Aktivitas Jasa Lainnya	33,59	17,37	-48,29	0,34%
Pendidikan	9,74	9,88	1,43	0,20%
Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	3,86	4,24	9,89	0,08%
Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	4,77	3,98	-16,49	0,08%
Informasi dan Komunikasi	2,57	2,79	8,47	0,06%
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0,72	0,52	-26,99	0,01%
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	122,75	-30,08	-124,51	-0,60%
Tidak Diketahui	0,09	-31,01	-34.535	-0,61%
Pertambangan dan Penggalian	169,82	-298,63	-275,85	-5,92%
Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan	-	-	-	-
Total	4.753,68	5.043,64	6,10	100,00%

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)



2.1.1.2. Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Aktivitas ekspor-impor di Sumatera Selatan memberikan dampak langsung terhadap penerimaan kepabeanaan dan cukai. Hingga triwulan II 2025, penerimaan dari bea keluar mencatatkan realisasi sebesar Rp226,30 miliar, tumbuh signifikan sebesar 375,15% secara tahunan (yoy), dan menjadi kontributor utama dalam penerimaan kepabeanaan di wilayah Sumsel. Sementara itu, penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp45,93 miliar, namun, karena adanya restitusi sebesar Rp16,36 miliar, maka realisasi bersih bea masuk sampai dengan 30 Juni 2025 menjadi Rp29,57 miliar. Kondisi ini mencerminkan penurunan sebesar 71,41% (yoy) atau hanya mencapai 17,94% dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, penerimaan cukai mencatatkan realisasi sebesar Rp1,11 miliar walaupun tidak ada target pada periode 2025.

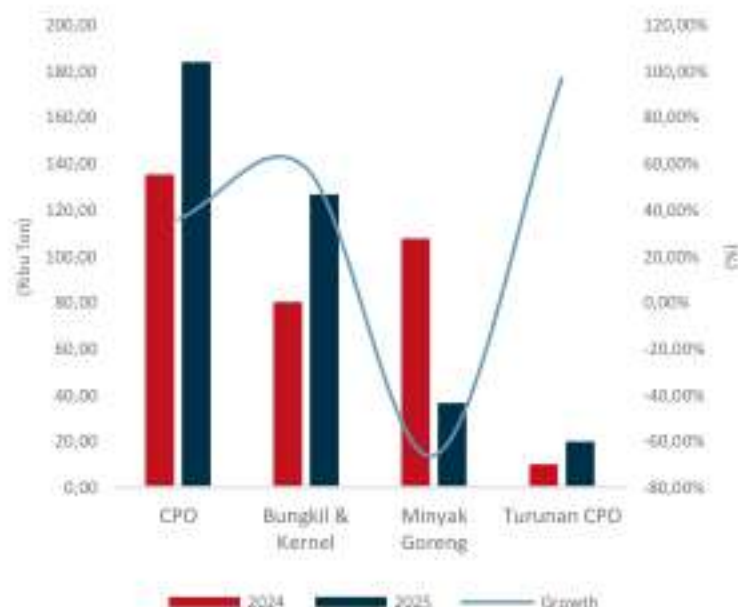
Grafik 2.4. Perkembangan Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtlim (diolah)

Penerimaan bea keluar tumbuh positif dan tercapai diatas target. Capaian bea keluar pada triwulan II 2025 mencapai 242,58% dan tumbuh positif 375,15% (yoy) dipengaruhi oleh kenaikan harga patokan ekspor (HPE) serta peningkatan volume ekspor CPO dan turunannya. Komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar s.d. 30 Juni 2025 didominasi Produk CPO, dari beberapa komoditas yang dapat dikenakan bea keluar sesuai PMK 4/2025.

Grafik 2.5. Perkembangan Volume Ekspor CPO & Turunannya Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)

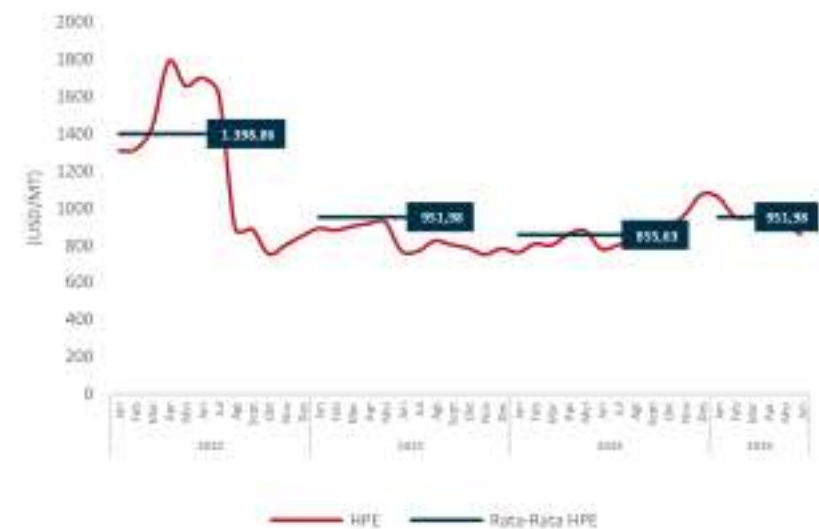


Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtlim dan Kementerian Perdagangan (diolah)

Penerimaan Bea Keluar Tumbuh Positif Didukung Kenaikan Volume dan Harga Ekspor CPO. Peningkatan volume ekspor

serta kenaikan harga patokan ekspor (HPE) komoditas CPO dan produk turunannya menjadi faktor utama pertumbuhan penerimaan bea keluar di Sumatera Selatan., volume ekspor CPO dan turunannya tercatat tumbuh sebesar 35,96% (yoy), dari 135,31 ribu ton menjadi 183,97 ribu ton.

Grafik 2.6. Perkembangan Harga Patokan Ekspor CPO & Turunannya Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtlim dan Kementerian Perdagangan (diolah)

Selain itu, rata-rata HPE untuk produk CPO juga mengalami kenaikan signifikan, yakni sebesar 11,26% (yoy), dari sebelumnya USD 855,63/MT menjadi USD 951,98/MT. Kombinasi antara peningkatan volume ekspor dan kenaikan harga ini mendorong penerimaan bea keluar melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga mencatatkan kinerja yang sangat positif sepanjang periode berjalan.

Tabel 2.4. Realisasi Impor dan Bea Masuk per Komoditas Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025

Top 10 Komoditas Impor		Top 10 Komoditas terkena Bea Masuk	
Komoditi	Jumlah (Juta USD)	Komoditi	Jumlah (Rp Miliar)
Mesin	181,28	Mesin	7,99
Kayu Kasar	54,41	Semi-Manufaktur; Barang Dari Plastik	4,20
Pupuk	52,61	Barang Dari Keramik	4,18
Reaktor, Turbin, Generator	39,36	Parts Alat Berat	2,84
Mesin Perkakas	27,68	Sereal	2,16
Tungku dan Oven	19,10	Reaktor, Turbin, Generator	1,91
Mcb, Stop Kontak, Tusuk Kontak	10,73	Baja Lembaran Lapis	1,86
Barang dari Batu	10,36	Parts Mesin	1,76
Pulp	8,72	Alat Elektronik Lainnya	1,71
Mobil	8,72	Pompa	1,37

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtlim (diolah)

Penurunan Aktivitas Impor Berdampak pada Penerimaan Bea Masuk di Sumsel. Tren penurunan aktivitas impor di Sumatera Selatan berdampak langsung pada penurunan penerimaan



bea masuk. Hingga triwulan II 2025, nilai penerimaan bea masuk mengalami penurunan hingga 71,41% (yoy). Bahkan, realisasi penerimaan bea masuk hanya masih di angka 17,94% dari target yang telah ditetapkan.

Komoditas mesin tercatat sebagai penyumbang utama aktivitas impor di Sumsel dengan nilai mencapai USD 78,84 juta. Namun demikian, tidak semua impor mesin dikenakan bea masuk, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PMK 188/2015 yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk keperluan pengembangan industri.

Menurunnya penerimaan bea masuk di Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan II 2025 sejalan dengan penurunan impor, terutama pada kelompok sereal dan parts mesin, kontribusi mesin menjadi yang terbesar. Komoditas mesin tercatat memberikan kontribusi penerimaan bea masuk sebesar Rp7,99 miliar, naik sebesar 27,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Sedangkan untuk komoditas sereal mengalami penurunan signifikan sebesar 93,5% dibanding periode sebelumnya dengan nilai hanya Rp2,16 miliar. Sementara itu, untuk komoditas lainnya kebanyakan mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya seperti mesin, semi manufaktur, barang dari keramik, parts alat berat, reaktor, turbin, generator, baja lembaran lapis, dan lain-lain.

Penerimaan cukai di Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan II 2025 tidak memiliki target khusus, karena umumnya berasal dari sanksi administratif cukai (*ultimum remedium*) atas pelanggaran ketentuan peredaran barang kena cukai. Total penerimaan cukai tercatat sebesar Rp1,1 miliar, yang bersumber dari beberapa komponen. Kontribusi terbesar berasal dari sanksi administratif atas penindakan rokok ilegal (hasil tembakau) sebanyak 66.720 batang, dengan nilai penerimaan mencapai Rp990,81 juta. Selain itu, terdapat penerimaan dari denda atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp110 juta, serta denda administratif Etil Alkohol (EA) sebesar Rp5,18 juta. Total penerimaan ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 901,28% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini mengindikasikan adanya peningkatan peredaran rokok ilegal dan MMEA ilegal di wilayah Sumatera Selatan, yang memicu intensifikasi penindakan dan penerapan sanksi administratif oleh otoritas terkait.

2.1.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumsel tumbuh negatif yang dipengaruhi menurunnya PNBP BLU. Hingga akhir triwulan II 2025, total PNBP di Sumsel terealisasi Rp1.324,89 miliar (25,07% dari target) atau tumbuh negatif 9,36% (yoy). Berdasarkan jenisnya, PNBP BLU mencatatkan realisasi sebesar Rp793,31 miliar (41,37% dari target) dan tumbuh negatif 18,25% (yoy). PNBP BLU berkontribusi lebih besar dengan *share* 57,41% dibandingkan PNBP Lainnya yang berkontribusi 42,59% mencatatkan penerimaan mencapai Rp531,38 miliar (108,94% dari target).

PNBP BLU utamanya berkontribusi dari PNBP jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa pelayanan barang dan jasa lainnya. PNBP Jasa Pelayanan Pendidikan mencatatkan realisasi mencapai Rp 146,08 miliar dan tumbuh negatif -54,66% (yoy) yang disebabkan adanya perubahan status satker pada Universitas Sriwijaya dari BLU menjadi PTN-BH

(Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) sehingga pendapatannya tidak lagi disetorkan ke kas negara. Namun demikian, apabila pendapatan dari Universitas Sriwijaya dikecualikan, PNBP BLU tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,99% (yoy). Selain itu, PNBP jasa pelayanan barang dan jasa lainnya juga mencatatkan realisasi mencapai Rp10,16 miliar dan tumbuh negatif 26,12% (yoy) hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan pada satker Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan serta perubahan status pada satker Universitas Sriwijaya

Grafik 2.7. Realisasi per Jenis PNBP Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

PNBP Lainnya utamanya berkontribusi dari PNBP di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu Jasa Kepelabuhan. PNBP pada Jasa Kepelabuhan di Sumsel mencatatkan realisasi mencapai Rp101,37 miliar dan tumbuh positif 9,15% (yoy). Selanjutnya penyumbang lain yang cukup besar pada PNBP lainnya yaitu berasal dari berbagai macam pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp93,6 miliar. Data dari Kantor Wilayah DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung merincikan PNBP lingkup wilayah Sumsel di luar PNBP BLU menjadi PNBP Aset, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang dengan rincian target dan realisasi sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5. Perkembangan PNBP Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)

Uraian	Target	Realisasi	%	Growth
PNBP Aset	29,58	24,05	81,30	-0,93%
PNBP Piutang Negara	0,007	0,04	562,55	251,53%
PNBP Lelang	25,40	25,40	100,00	105,85%
Total	54,98	49,48	90,00	35,12

Sumber: Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung (diolah)

Hingga akhir triwulan II 2025, realisasi PNBP berada angka 90% dari target, didominasi oleh PNBP Lelang dan diikuti oleh PNBP Aset dengan realisasi masing-masing sebesar 100% dan 81,30% daripada target. Hanya PNBP Aset yang mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya (0,93%) akibat penurunan penerimaan dari penjualan barang rampasan dan BLU. Walaupun demikian, terjadi peningkatan pada PNBP Sewa.





2.1.1.4. Penerimaan Hibah

Tidak ada penerimaan Hibah pada lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II 2025.

2.1.1.5. Prognosis Pendapatan Negara

Kanwil DJPB Sumatera Selatan melakukan prognosis atas Pendapatan Negara yang dibagi ke dalam Perpajakan, Bea dan Cukai, dan PNBP yang dibagi ke dalam rincian-rincian sebagai berikut.

2.1.1.5.1. Proyeksi Penerimaan Perpajakan

Proyeksi Penerimaan Perpajakan pada triwulan II sebesar Rp2.401,63 miliar dengan realisasi sebesar Rp2.504,26 sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp102,62 miliar dengan deviasi kumulatif Rp145,22 miliar. Setelah tumbuh kuat hingga April, kinerja penerimaan perpajakan mulai menurun di bulan Mei dan Juni dikarenakan penurunan PPh NonMigas dan PPN akibat pengaruh daripada kebijakan PMK 81 Tahun 2024 sehingga terdapat kompensasi lebih bayar serta peralihan NPWP pemungut BUMN ke pusat.

Tabel 2.6. Proyeksi Penerimaan Perpajakan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Triwulan	Proyeksi	Realisasi	Deviasi
Tw I	2.387,58	2.430,18	42,60
Tw II	2.401,63	2.504,26	102,62
Tw III	3.029,37	0,00	
Tw IV	4.898,43	0,00	

Sumber: Kanwil DJPB Sumsel (diolah)

Secara sektoral, pertanian dan industri pengolahan mencatat pertumbuhan tertinggi, sementara sektor administrasi berkontraksi cukup tajam. Perlunya penguatan ekstensifikasi dan monitoring pada sektor dominan guna menjaga kinerja pada semester berikutnya.

2.1.1.5.2. Proyeksi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Proyeksi Bea Cukai pada triwulan II sebesar Rp88,22 miliar dengan realisasi sebesar Rp69,53 miliar dengan deviasi negatif sebesar Rp18,69 miliar. Walaupun terdapat deviasi negatif terdalam yang terjadi pada bulan mei, secara keseluruhan deviasi masih cenderung positif sebesar Rp102,79 hal ini dikarenakan ketergantungan pada ekspor menimbulkan volatilitas sehingga berpengaruh terhadap angka nilai ekspor.

Tabel 2.7. Proyeksi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Triwulan	Proyeksi	Realisasi	Deviasi
Tw I	81,54	203,02	121,48
Tw II	88,22	69,53	-18,69
Tw III	114,09	0,00	
Tw IV	96,94	0,00	

Sumber: Kanwil DJPB Sumsel (diolah)

2.1.1.5.3. Proyeksi Penerimaan PNBP

Proyeksi PNBP pada triwulan II sebesar Rp512,32 miliar dengan realisasi sebesar Rp607,07 miliar sehingga deviasi pada triwulan ini berada di angka Rp94,75 miliar dengan deviasi kumulatif sebesar Rp89,96 miliar. Kinerja yang ditopang oleh PNBP lainnya, terkhusus pada sektor sektor Pelabuhan dan tol laut. Konsistensi ditunjukkan dengan peningkatan volume bongkar muat serta efektivitas pemungutan di pelabuhan strategis. Sedangkan pada sektor jasa pelayanan dan pendidikan mengalami penurunan signifikan dikarenakan transformasi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH yang berimplikasi terhadap penurunan PNBP BLU secara keseluruhan. Perlunya dilakukan penyesuaian pelaporan fiskal secara komprehensif agar tetap mencerminkan kontribusi sektor secara tepat.

Tabel 2.8. Proyeksi Penerimaan PNBP Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)

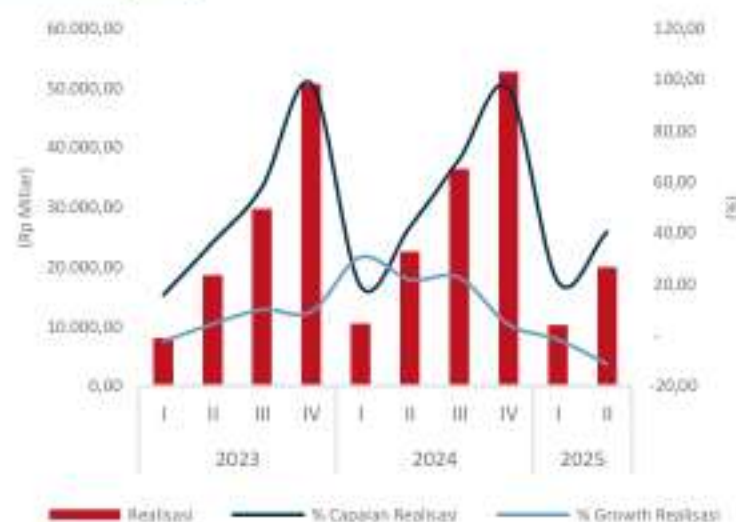
Triwulan	Proyeksi	Realisasi	Deviasi
Tw I	702,64	697,85	-4,79
Tw II	512,32	607,07	94,75
Tw III	713,29	0,00	
Tw IV	477,50	0,00	

Sumber: Kanwil DJPB Sumsel (diolah)

2.1.2. Belanja Negara

Belanja Negara dalam hal ini merupakan belanja pemerintah pusat untuk lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari empat komponen belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Adapun perkembangan realisasi belanja negara wilayah Sumatera Selatan yang tergambar dalam Grafik 2.8 sebagaimana berikut.

Grafik 2.8. Perkembangan Realisasi Belanja Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPB Sumsel (diolah)

Belanja negara secara umum berkontraksi sebesar 11,50%, berdampak pada kondisi pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) di Sumsel. Hingga triwulan II 2025, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp19.923,17 miliar dengan realisasi pada belanja pemerintah pusat (BPP) Rp5.381,90 miliar dan TKD Rp14.541,27 miliar. Dari sisi BPP menunjukkan kinerja

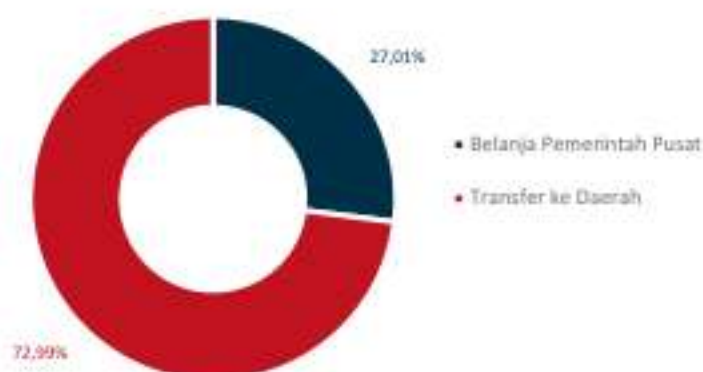


yang negatif yaitu berkontraksi sebesar 34,22% (yoy), namun dari sisi TKD menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,48% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pada belanja negara.

Grafik 2.8. Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Belanja Negara Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Kontribusi Belanja Negara s.d. Triwulan II 2025



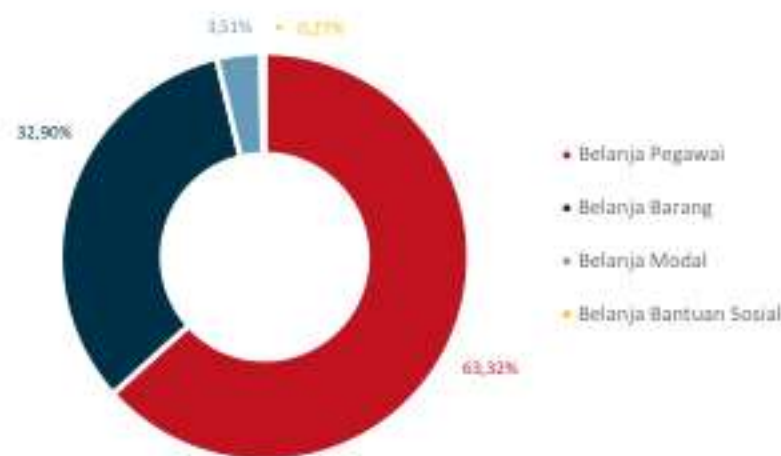
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja negara di Sumsel utamanya dimanfaatkan untuk mendukung APBD melalui penyaluran TKD. Hal ini terlihat dari proporsi realisasi belanja TKD yang memiliki *share* 72,99% dari total belanja negara. Sementara itu, realisasi BPP berkontribusi sebesar 27,01% dari total belanja negara. BPP mencapai 34,08% dari pagu, sedangkan untuk belanja TKD mencapai 43,23% dari pagu. Realisasi belanja TKD diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan di daerah sehingga dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian.

2.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Dari Empat Jenis BPP yang disalurkan oleh KPPN di Wilayah Sumsel, Proporsi terbesar terdapat pada Belanja Pegawai yaitu sebesar 63,32%. Hal ini disebabkan oleh pola penyerapan Belanja Pegawai yang relatif konstan setiap bulan sepanjang tahun dan tidak termasuk ke dalam jenis belanja yang diblokir untuk keperluan efisiensi dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2025. Sejalan dengan itu, realisasi belanja barang juga berkontribusi besar bagi total BPP Sumsel dengan *share* 32,90%. Sementara itu untuk Belanja Modal kontribusinya masih relatif rendah yang berkontribusi 3,51% dari total BPP. Hal ini mengingat sebagian alokasi Belanja Modal masih dalam blokir dan pekerjaan konstruksi yang masih jatuh tempo kontraknya menjelang akhir tahun anggaran.

Grafik 2.10. Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Jenis Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja pegawai Sumsel tumbuh positif dan berperan krusial mendukung peningkatan produktivitas ASN serta melanjutkan proses reformasi birokrasi. Penggunaan Belanja Pegawai ini untuk pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan Kinerja ASN, TNI dan Polri, Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS, serta uang makan, honorarium, uang lembur, THR dan Gaji ke-13. Realisasi Belanja Pegawai di Sumsel mencapai Rp3.408,00 miliar atau 54,17% dari pagu, tumbuh positif 7,58% (yoy). Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja pegawai dipengaruhi adanya pembayaran THR ASN dan Gaji ke-13 sesuai PP Nomor 11 Tahun 2025 (komponen tunjangan kinerja dibayarkan 100%).

Grafik 2.11. Perkembangan Belanja Pegawai Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



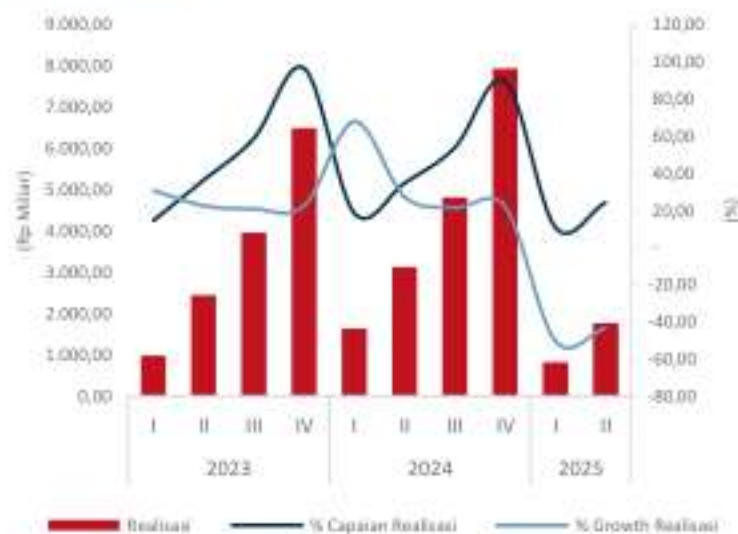
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja barang tumbuh negatif karena adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah dan kegiatan Pemilukada di tahun anggaran sebelumnya. Realisasi belanja barang sebesar Rp1.770,91 miliar atau 24,34%, mengalami kontraksi sebesar 43,28% (yoy). Hal ini tidak terlepas dari adanya blokir anggaran sebesar 33,64% dari pagu sebagai imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah serta adanya alokasi belanja untuk Pemilukada di tahun sebelumnya. Belanja Barang utamanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pelayanan Kesehatan dan jaminan Kesehatan nasional (JKN), infrastruktur konektivitas, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan dukungan operasional kantor. Rincian mengenai perkembangan belanja barang yang ada di wilayah Sumatera Selatan dapat dilihat pada Grafik 2.12 sebagaimana berikut.





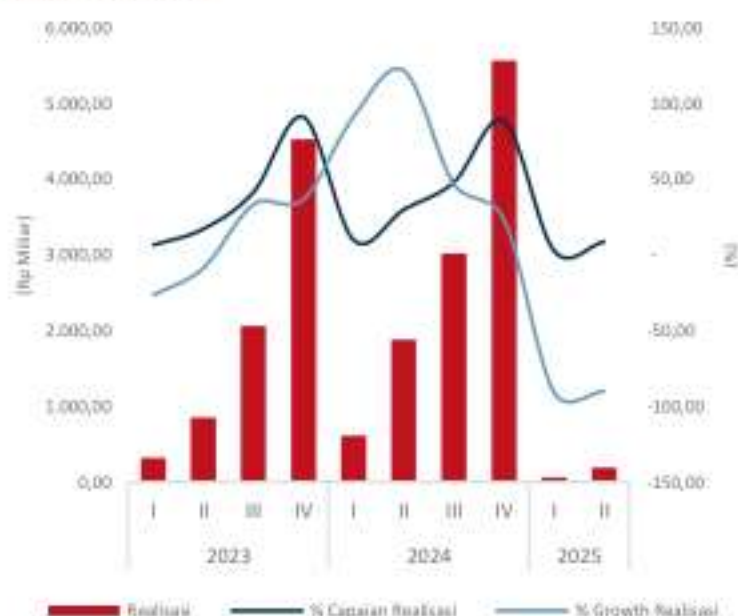
Grafik 2.12. Perkembangan Belanja Barang Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja modal Sumsel tumbuh negatif yang disebabkan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp188,66 miliar atau 8,59% dari pagu, mengalami pertumbuhan negatif sebesar 89,95% (yoy). Capaian realisasi belanja modal dipengaruhi adanya blokir anggaran sehubungan kebijakan efisiensi anggaran pada proyek-proyek PSN yang bersifat *multiyears*, utamanya dipengaruhi realisasi pengeluaran pemerintah untuk beberapa proyek yang tidak lagi menjadi PSN ditahun 2025. Penggunaan Belanja Modal utamanya untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan sumber daya air, infrastruktur konektivitas, dan dukungan operasional kantor.

Grafik 2.13. Perkembangan Belanja Modal Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja Bantuan Sosial Sumsel tumbuh positif dan terus dijaga agar tetap optimal dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial mencapai Rp14,34 miliar (51,94% dari pagu) dan tumbuh positif 1,97% (yoy). Capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial yang optimal tidak terlepas dari realisasi pembayaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Satker Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dan Bantuan Program ATENSI Disabilitas dan Kelompok Rentan pada Kementerian Sosial.

Grafik 2.14. Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.1.1. Belanja Berdasarkan Kementerian Negara/ Lembaga (K/L)

Berdasarkan unit organisasi, BPP di Sumsel dengan 10 pagu belanja terbesar terdapat pada Kementerian Pertanian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kemen PU, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan MA yang menyumbang sebesar 87,61% pagu BPP di Sumsel TA 2025. Dari 10 kementerian tersebut, kinerja realisasi belanja pada Kejaksaan RI menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 52,62%. Diikuti oleh Kementerian Agama sebesar 51,56% dan Kementerian Pertahanan sebesar 50,36%. Hal ini tidak terlepas dari jumlah blokir anggaran yang relatif kecil pada ketiga kementerian tersebut sehingga tetap mampu mengoptimalkan belanja. Sementara itu, Kementerian Pertanian yang memiliki pagu tertinggi namun realisasinya masih sangat rendah yaitu sebesar 2,54% dari pagu. Hal ini tidak terlepas dari blokir efisiensi belanja sebesar 40,61%.

Grafik 2.15. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Unit Organisasi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (Rp Miliar)

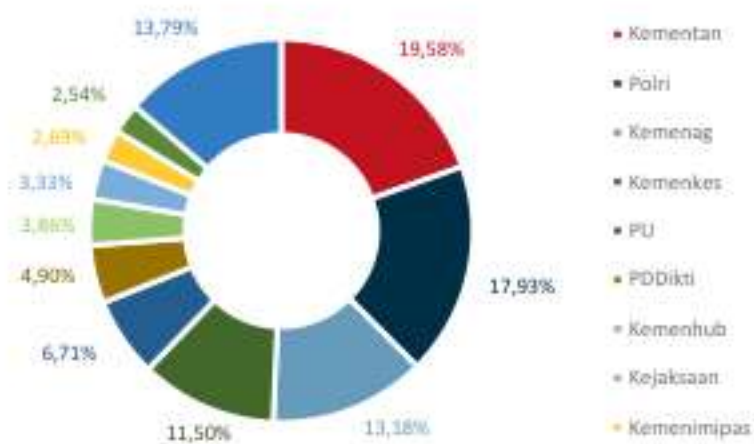


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Ditinjau dari capaiannya, kontribusi tertinggi BPP di Sumsel ada pada Kementerian Pertanian sebesar 19,58%, Kepolisian Negara RI sebesar 17,93%, dan Kementerian Agama 13,18%. Selain blokir efisiensi yang relatif lebih kecil belanja pegawai yang cukup tinggi juga menjadi pendukung optimalisasi belanja pada ketiga Kementerian tersebut.



Grafik 2.16. Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Unit Organisasi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.1.2. Belanja Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsi, BPP di Sumsel pagu terbesar berasal dari belanja fungsi ekonomi. Realisasi belanja fungsi ekonomi mencapai Rp769,36 miliar atau menyumbang 14,30% dari total BPP Sumsel di triwulan II 2025. Meskipun menjadi pagu terbesar, capaian belanja fungsi ekonomi relatif belum optimal dengan persentase capaian 14,17% dari pagu dipengaruhi adanya blokir efisiensi sebesar 27,19% yang merupakan blokir terbesar bila dibandingkan dengan fungsi yang lain. Fungsi ekonomi sebagian besar ada pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dimana beberapa kegiatan belum terlaksana dengan maksimal.

Grafik 2.17. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Ditinjau dari capaiannya, fungsi agama memiliki persentase realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp19,97 miliar atau 57,61% dari pagu. Fungsi ini sebagian besar ada pada Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Ekonomi sebagai penyumbang dengan kontribusinya sebagai pagu terbesar belum menunjukkan kinerja yang optimal yaitu sebesar 14,30%. Penyumbang kontribusi terendah berdasarkan fungsi yaitu berasal dari fungsi Perumahan Dan Fasilitas Umum yang hanya berkontribusi sebesar 0,07%, fungsi ini sebagian besar ada pada Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Grafik 2.18. Kontribusi BPP per Fungsi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.1.3. Proyeksi Belanja Negara

Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat triwulan II 2025 sebesar Rp3.555,71 miliar dengan realisasi sebesar Rp2.854,13, terjadi deviasi negatif Rp702,58 miliar sehingga deviasi kumulatif hingga triwulan II 2025 menjadi negatif Rp1.124,03 miliar. Kondisi ini dapat terjadi karena realisasi belanja modal baru menyentuh angka 8,59% daripada sebagai implikasi dari adanya efisiensi anggaran serta keterlambatan proses pelaksanaan proyek fisik dan infrastruktur K/L, khususnya pekerjaan BBWS Sumatera VIII dan pembangunan rusun mahasiswa. Selain itu juga akibat dari belanja barang yang belum optimal (24,34% dari pagu) karena adanya penyesuaian belanja pada Kementerian Kesehatan dan Polisi Republik Indonesia.

Tabel 2.9. Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Triwulan	Proyeksi	Realisasi	Deviasi
Tw I	2.950,22	2.528,77	-421,44
Tw II	3.555,71	2.853,13	-702,58
Tw III	4.121,54	0,00	
Tw IV	5.157,69	0,00	

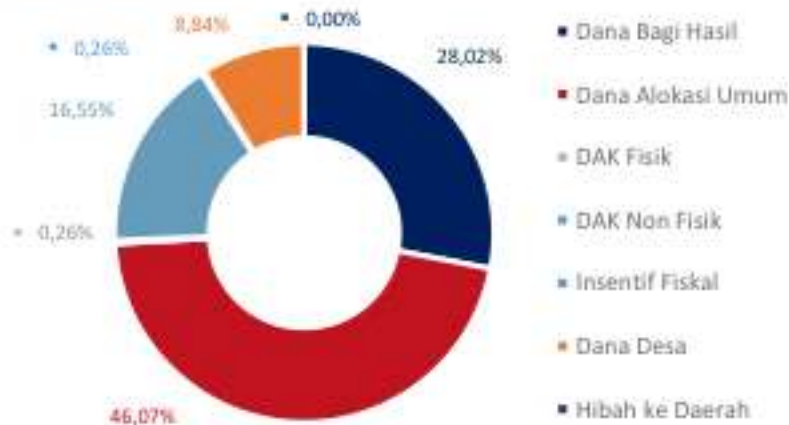
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.2. Transfer ke Daerah (TKD)

Kinerja realisasi TKD di Sumsel tumbuh positif untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Hingga triwulan II tahun 2025, realisasi TKD mencapai Rp14.541,27 miliar dan mengalami kenaikan 1,48% (yoy). Dari sisi capaiannya mencatatkan kinerja yang cukup baik pada triwulan II yaitu mencapai 43,23% dari pagu untuk mendukung kinerja APBD Sumsel. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh percepatan pemenuhan syarat salur pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun Satker OPD pada penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.



Grafik 2.19. Kontribusi Transfer ke Daerah per Jenis Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025



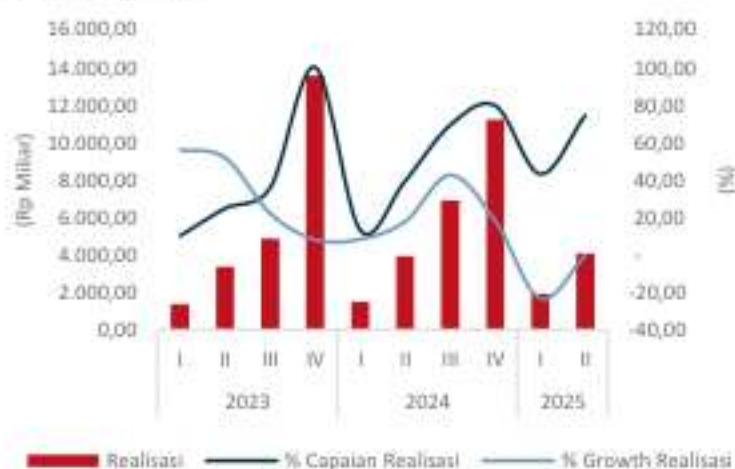
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Berdasarkan jenisnya, TKD di Sumsel didominasi oleh penyaluran DAU. Realisasi DAU mencapai 46,07% dari total realisasi TKD Sumsel di tahun 2025. Hal ini lumrah terjadi karena alokasi DAU selalu menjadi yang paling tinggi sejalan dengan kebijakan *hold harmless* sampai tahun 2027 yang mengharuskan alokasi DAU tidak berkurang dari tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran DAU *block grant* yang dilakukan setiap bulan sesuai rekomendasi salur sebesar sepertiga dari pagu tahunan, menjadi pendorong realisasi DAU lebih cepat dari jenis TKD lainnya sebagai dampak percepatan pemda/pemdes dalam memenuhi syarat salur sesuai batas waktu.

2.1.2.2.1. Dana Bagi Hasil

Penyaluran DBH Sumsel optimal dan berperan penting mengurangi *vertical imbalance*, menanggulangi eksternalitas negatif, serta meningkatkan pemerataan di Sumsel. Hingga triwulan II tahun 2025, realisasi DBH mencapai Rp4.074,72 triliun (36,64% dari pagu) dan mengalami peningkatan 3,65% (yoy). Capaian tersebut naik dibandingkan tahun 2024 disebabkan tingkat ketaatan pembayaran pajak dan rekonsiliasi pajak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya untuk periode triwulan II TA 2025.

Grafik 2.20. Perkembangan Dana Bagi Hasil Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Meskipun penyaluran DBH dari segi capaiannya telah optimal, namun masih terdapat isu dalam pelaksanaan penyaluran DBH yang terjadi di Sumsel antara lain:

- Keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi Pajak Semester II 2024 berdampak pada realisasi penyaluran DBH Pajak.
- Untuk Kabupaten OKI dan Prabumulih belum salur DBH Pajak bulan Februari April dan Juni karena terlambat/belum selesai Rekonsiliasi Pajak Semester II 2023.
- Terdapat Potensi keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi pajak Semester I imbas implementasi Coretax.

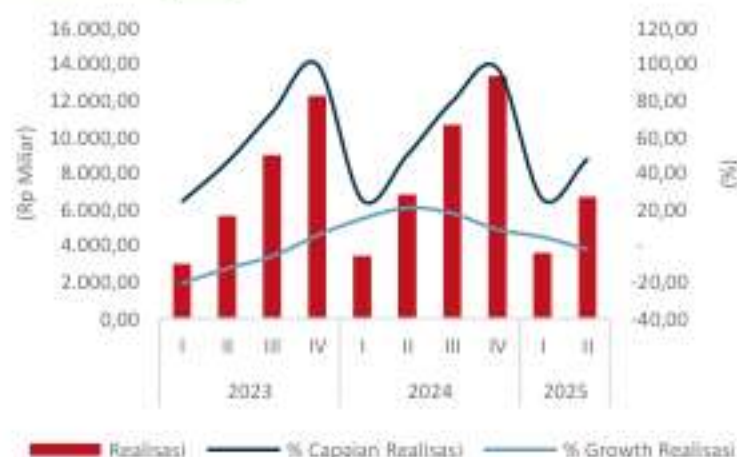
- Kurangnya pemahaman Pemda tentang kebijakan penyaluran DBH Kurang Bayar melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Beberapa permasalahan tersebut berpengaruh pada efektivitas penyaluran DBH di Provinsi Sumsel yang digunakan untuk mendukung pendanaan APBD.

2.1.2.2.2. Dana Alokasi Umum

Kinerja Penyaluran DAU Sumsel mengalami sedikit penurunan. Penyaluran DAU Sumsel dilakukan untuk menjaga pemerataan keuangan daerah serta memperkuat kebijakan penggunaan yang telah ditentukan sebagai upaya memperbaiki kualitas layanan publik di Sumsel. Hingga triwulan II tahun 2025 realisasi DAU mencapai Rp6.698,98 miliar, dengan realisasi kinerja yang sedikit terkontraksi sebesar 1,86% (yoy). Untuk realisasinya telah tercapai sebesar 47,83% dari pagu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keterlambatan realisasi pengangkatan PPPK. Selain itu, Pemda juga terlambat dalam melakukan proses penyerapan DAU *earmark* Tahap I untuk memenuhi ketentuan minimal serap yang berimplikasi terhadap penyaluran DAU *Earmark* tahap berikutnya.

Grafik 2.21. Perkembangan Dana Alokasi Umum Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Meskipun kinerja penyaluran DAU dinilai cukup baik, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran DAU antara lain:

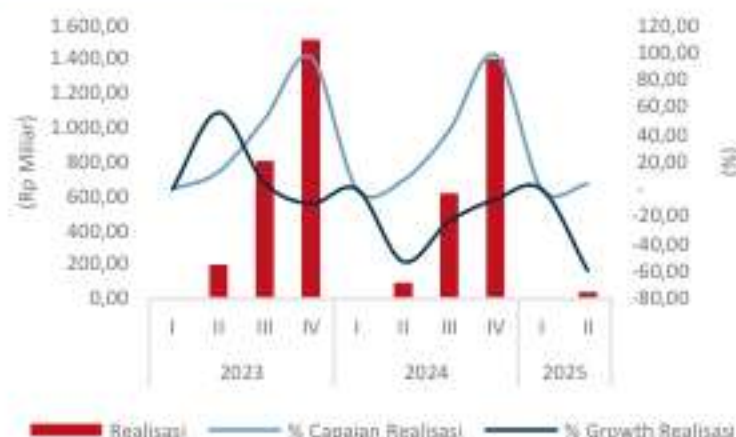
- Realisasi penyaluran DAU untuk dukungan PPPK masih rendah disebabkan beberapa pemda baru melaksanakan pengangkatan PPPK pada bulan Juni dan Juli.
- Masih kurang optimalnya peran Pemda dalam proses penyerapan dana Tahap I untuk memenuhi ketentuan minimal serap untuk salur DAU *Earmark* Tahap berikutnya.
- Belum terdapat salur DAU PPPK pada Pemprov Sumsel dikarenakan BKD Sumsel belum merekam data PPPK Dinas Pendidikan melalui aplikasi BKN.
- Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kelurahan untuk mengelola DAU Pendanaan Kelurahan.

2.1.2.2.3. Dana Alokasi Khusus Fisik

Penyaluran DAK Fisik pada triwulan II 2025 sudah mulai terealisasi dengan kinerja yang terkontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga triwulan II tahun 2025, realisasi DAK Fisik mencapai Rp38,10 miliar dengan kinerja yang terkontraksi sebesar 59,45% (yoy). Realisasi DAU yang terjadi baru menyentuh angka 4,11% dari pagu. Penurunan tersebut disebabkan karena efisiensi/pencadangan DAK Fisik bidang Konektivitas, Pangan dan Irigasi, keterlambatan dalam pemrosesan kontrak dan keterlambatan pengajuan penyaluran oleh Pemda.



Grafik 2.22. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Terdapat beberapa isu dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik yang terjadi di Sumsel antara lain:

- Terlambat diterbitkannya Perpres DAK Fisik.
- Pemda menunggu RK Definitif sebelum berkontrak.
- Terdapat pergantian operator/pejabat OPD pengelola DAK Fisik.
- Perekaman data kontrak masih rendah (11,02% dari RK Efektif) disebabkan pemda masih dalam proses lelang dan sebagian
- Sebagian dokumen kontrak masih dalam tahap reviu APIP.
- Terdapat gagal lelang pada beberapa subbidang DAK Fisik disebabkan minimnya penawaran dari penyedia. Gagal lelang menyebabkan pemda harus melakukan tender ulang dan menambah waktu penyelesaian dokumen kontrak.
- Juknis dari KL (khususnya dari Kemendikdasmen) terlambat diterbitkan sehingga mengakibatkan proses lelang DAK Fisik bidang Pendidikan juga terlambat.
- Pemko Palembang belum menyelesaikan Pelaporan TAYL sebagai syarat salur DAKF yaitu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output TAYL, LHR APIP TAYL dan Laporan Sisa DAK TAYL.
- Koordinasi internal pemda dan peran BPKAD yang masih belum optimal turut menjadi penghambat realisasi penyaluran DAK Fisik.

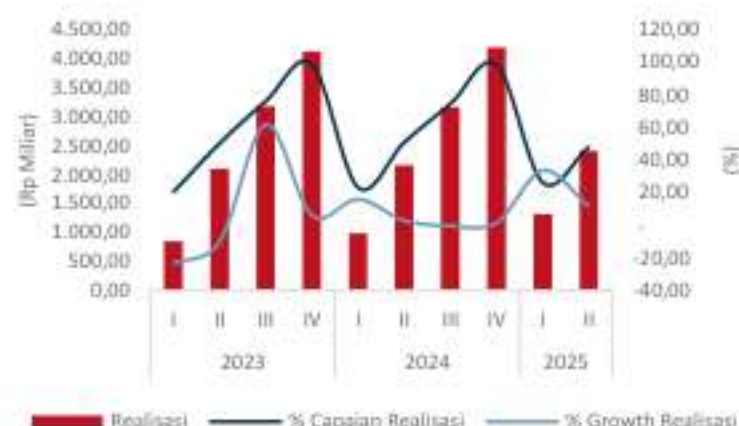
2.1.2.2.4. Dana Alokasi Khusus NonFisik

Penyaluran DAK Non Fisik Sumsel tumbuh positif, Hingga triwulan II tahun 2025 realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp2.406,97 miliar atau 47,98% daripada pagu dan naik sebesar 11,64% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun realisasi dinilai cukup baik, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan proses penyaluran sebagai berikut:

- Belum adanya penyaluran bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) Tahap II dikarenakan menunggu rekomendasi dari Kemendikdasmen (paling cepat bulan Juli).
- Inkonsistensi data *supplier* pada Kemendikdasmen jika dibandingkan dengan data SPAN berdampak pada peningkatan jumlah retur terutama dalam penyaluran dana tunjangan profesi guru (TPG) ASN Daerah.
- Pemda belum melakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) Kesehatan sebesar 1% atas TPG ASND triwulan I 2025. Pemda agar melakukan pemotongan tunggakan 1% JKN Kesehatan atas penyaluran TPG ASND triwulan I dilaksanakan melalui

mekanisme pemotongan langsung dan dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran pada triwulan tersisa.

Grafik 2.23. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.2.5. Dana Insentif Fiskal

Penyaluran Insentif Fiskal mencatat nilai positif di tahun 2025. Hingga triwulan II 2025, realisasi insentif fiskal mencapai Rp37,22 miliar (50,00% dari pagu) dan mencatat pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,30% (yoy). Terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaan penyaluran insentif fiskal yang terjadi di Sumsel dimana belum terdapat penyaluran Insentif fiskal tahap II disebabkan pemda masih memproses tender PBJ dan dalam proses penyerapan dana insentif fiskal untuk memenuhi ketentuan minimal serap untuk penyaluran DAU *earmark* tahap berikutnya.

Grafik 2.24. Perkembangan Insentif Fiskal Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.2.6. Dana Desa

Penyaluran Dana Desa Sumsel tumbuh positif dan optimal 2025. Hingga triwulan II tahun 2025, realisasi dana desa mencapai Rp1.285,28 miliar atau setara 51,51% dari pagu dan tumbuh positif 0,34% (yoy). Hal ini didorong oleh percepatan penyaluran dana desa yang diinisiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup wilayah Sumatera Selatan. Penyaluran dana desa berjalan secara optimal sampai dengan triwulan II tahun 2025 dengan capaian yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang mencatat realisasi 49,36% dari pagu pada tahun sebelumnya.





Grafik 2.20. Perkembangan Dana Desa Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

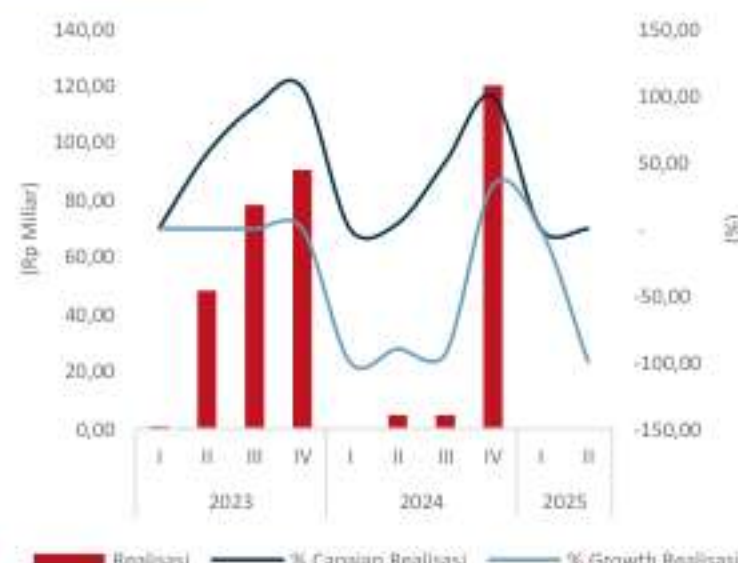
Meskipun penyaluran dana desa dari segi capaiannya sudah baik dan dalam tren yang positif, masih terdapat isu pelaksanaan penyaluran dana desa yang terjadi di Sumsel antara lain:

- Belum optimalnya pemahaman operator pada Pemda terhadap aplikasi *online monitoring span* transfer keuangan daerah (OMSPAN TKD).
- Terdapat *minus growth* penyaluran Dana Desa sebesar 33,46% yang disebabkan oleh penurunan pagu Dana Desa dan perlambatan penyaluran Dana Desa Tahap II.
- Syarat salur Dana Desa tahun anggaran 2025 berupa ADK APBDes mengakibatkan perlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I dan mempengaruhi kecepatan penyerapan DD Tahap I dan pengajuan DD Tahap II.
- Terlambatnya penyaluran Dana Desa Tahap II yang seharusnya dapat mulai disalurkan 1 April disebabkan *deploy* Aplikasi OMSPAN TKD Dana Desa, menunggu penetapan kebijakan guna mengakomodir Inpres 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
- Adanya keterlambatan dalam perekaman pagu *earmark*.
- Interkoneksi sistem keuangan desa (Siskeudes) dan OMSPAN TKD masih dalam proses.
- Aplikasi Siskeudes belum terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD) Teman Desa.
- Akta Notaris dan Surat Komitmen Penganggaran APBDes untuk dukungan KDMP masih diproses.

2.1.2.2.7. Hibah ke Daerah

Tidak terdapat alokasi penyaluran hibah ke Daerah Sumatera Selatan pada triwulan II 2025. Bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu pada periode yang sama, untuk triwulan II tahun yang lalu sudah terdapat realisasi sebesar Rp4,79 miliar atau senilai 3,96% dari pagu. Dapat disampaikan bahwa mekanisme penyaluran hibah ke daerah bersifat *reimbursement* sehingga pemerintah daerah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu dengan dana APBD (*prefinancing*). Kemudian, setelah kegiatan selesai dan telah diverifikasi teknis oleh kementerian negara/lembaga, *reimbursement* dapat diajukan oleh daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

Grafik 2.21. Perkembangan Hibah ke Daerah Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.2.8. Proyeksi Transfer ke Daerah

Proyeksi Transfer ke Daerah pada triwulan II 2025 diproyeksikan mencapai Rp7.435,15 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp6.865,40 sehingga menyebabkan deviasi proyeksi sebesar negatif Rp569,75 dan menjadikan deviasi kumulatif menjadi negatif Rp869,32. Hal ini disebabkan kinerja penyaluran yang masih tertahan pada komponen dana bagi hasil dan DAK fisik. Lebih spesifik lagi mengenai keterlambatan penyampaian dokumen syarat penyaluran oleh pemda dan penjadwalan penyaluran DAK fisik yang belum dimulai. Disparitas capaian antar komponen jenis TKD perlu diwaspadai agar tidak memengaruhi kelancaran belanja pada semester II.

Tabel 2.10. Proyeksi Transfer ke Daerah s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Triwulan	Proyeksi	Realisasi	Deviasi
Tw I	7.795,44	7.675,87	-299,57
Tw II	7.435,15	6.865,40	-569,75
Tw III	9.851,29	0,00	
Tw IV	8.377,67	0,00	

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.3. Surplus/Defisit APBN

Sampai dengan triwulan II 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 13,30 triliun, atau senilai 42,15% dari target. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 17,63% (yoy), mencerminkan perbaikan kinerja fiskal, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Penurunan defisit ini didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Di sisi lain, belanja negara mengalami penurunan terutama pada belanja pemerintah pusat. Pertumbuhan minus defisit anggaran hingga akhir Juni 2025 menunjukkan kinerja APBN masih *on-track* dan bekerja keras untuk membiayai program prioritas pemerintah. Capaian ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta menerapkan pengendalian belanja yang lebih disiplin dan terukur.



Grafik 2.22. Perkembangan Surplus/Defisit APBN Sumsel Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.2. Pelaksanaan APBD Sumsel

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan hingga Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif di tengah pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mendorong seluruh pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi anggaran, khususnya dengan membatasi alokasi belanja pada kegiatan nonprioritas. Meskipun terdapat penyesuaian pada sisi belanja, pengelolaan fiskal daerah tetap berjalan stabil dan menunjukkan arah yang konstruktif.

Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang sehat, ditopang oleh peningkatan signifikan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga akhir Triwulan II 2025, pendapatan daerah di lingkup Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp18,43 triliun, atau mencapai 38,90% dari total target pendapatan tahun anggaran berjalan. Secara tahunan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 5,44% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipengaruhi oleh penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, memberikan andil terhadap pertumbuhan tersebut.

Realisasi belanja daerah mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi belanja, realisasi hingga Triwulan II 2025 mencapai Rp13,97 triliun, atau sekitar 28,56% dari total pagu anggaran. Kinerja belanja daerah mengalami perlambatan sebesar -20,38% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan tersebut terjadi pada semua jenis belanja daerah, kecuali jenis belanja bantuan sosial yang mengalami pertumbuhan sebesar 60,34% (yoy). Hal ini terjadi dikarenakan penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Di dalam Inpres tersebut menekankan kepada seluruh Pemda di Sumsel untuk melakukan rasionalisasi anggaran, khususnya dengan membatasi alokasi belanja pada kegiatan non-prioritas seperti seremoni, kajian, studi banding, publikasi dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Perlambatan belanja daerah turut berkontribusi terhadap peningkatan surplus anggaran secara signifikan. Surplus anggaran tercatat sebesar Rp4,45 triliun, berbalik dari posisi defisit pada tahun sebelumnya. Lonjakan surplus ini mencerminkan efisiensi belanja yang berhasil diterapkan, sekaligus membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja pada semester berikutnya, terutama untuk program-program prioritas yang bersifat produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan pertumbuhan PAD yang kuat dan surplus anggaran yang meningkat, Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan memiliki peluang strategis untuk memperkuat pembangunan daerah. Kinerja APBD yang positif menjadi fondasi penting dalam mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan, peningkatan layanan publik, dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Jika momentum ini dapat dipertahankan, Sumatera Selatan berpotensi mencapai tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri, sehat, dan berkelanjutan. Rincian mengenai pelaksanaan APBD Sumatera Selatan tergambar pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11. Laporan Realisasi APBD Konsolidasian Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024-2025 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2024			TA 2025			% Growth 2024-2025
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Daerah	45,136.90	17,475.62	38.72%	47,372.54	18,425.83	38.90%	5.44%
Pendapatan Asli Daerah	9,342.77	2,302.96	24.65%	9,989.65	4,190.71	41.95%	81.97%
Pajak daerah	6,765.01	1,603.57	23.70%	7,060.69	2,999.33	42.48%	87.04%
Retribusi daerah	245.01	29.58	12.07%	641.80	150.49	23.45%	408.67%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	430.89	254.65	59.10%	418.65	196.59	46.96%	-22.80%
Lain-lain PAD yang sah	1,901.87	415.16	21.83%	1,868.51	844.31	45.19%	103.37%
Pendapatan Transfer	35,222.46	15,102.04	42.88%	37,227.72	14,166.51	38.05%	-6.19%
Transfer Pemerintah Pusat	32,686.04	14,002.62	42.84%	35,113.81	13,798.27	39.30%	-1.46%





I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2024			TA 2025			% Growth 2024-2025
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Transfer Antar Daerah	2,536.41	1,099.42	43.35%	2,113.91	368.24	17.42%	-66.51%
Lain-lain Pendapatan yang sah	571.67	70.62	12.35%	155.17	68.62	44.22%	-2.83%
Pendapatan Hibah	67.01	3.74	5.59%	12.55	0.00	0.00%	-100.00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	504.66	66.87	13.25%	142.62	68.62	48.11%	2.61%
Belanja Daerah	46,988.52	17,552.35	37.35%	48,933.22	13,974.40	28.56%	-20.38%
Belanja Operasi	29,887.82	12,008.36	40.18%	31,821.64	10,781.73	33.88%	-10.21%
Belanja Pegawai	15,514.85	7,691.43	49.57%	17,780.33	7,176.13	40.36%	-6.70%
Belanja Barang dan Jasa	12,291.69	3,451.99	28.08%	12,519.17	3,304.52	26.40%	-4.27%
Belanja Bunga	36.46	17.10	46.89%	23.81	9.94	41.75%	-41.86%
Belanja Subsidi	17.07	11.21	65.65%	29.10	8.48	29.15%	-24.31%
Belanja Hibah	1,962.11	822.05	41.90%	1,348.39	259.28	19.23%	-68.46%
Belanja Bantuan sosial	65.62	1.00	1.52%	120.85	3.58	19.34%	258.34%
Belanja Modal	8,342.62	2,837.29	34.01%	8,667.31	871.05	10.05%	-69.30%
Belanja Tidak Terduga	241.68	8.87	3.67%	476.12	2.50	0.52%	-71.84%
Belanja Transfer	8,516.40	2,697.84	31.68%	7,968.16	2,319.12	29.10%	-14.04%
Surplus/Defisit	-1,851.61	-76.73	4.14%	-1,560.68	4,451.44	-285.22%	-5901.39%
Pembiayaan	1,338.73	-57.84	-4.32%	1,560.68	1,203.21	77.10%	-2180.37%
Penerimaan Pembiayaan	1,649.35	0.00	0.00%	1,754.92	1,251.34	71.30%	-
Pengeluaran Pembiayaan	310.61	57.84	18.62%	194.24	48.13	24.78%	-16.79%
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		-211.30			10,106.09		-4882.87%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan Didorong oleh Kinerja PAD. Pendapatan daerah Sumatera Selatan menunjukkan tren positif hingga akhir Triwulan II 2025, dengan realisasi mencapai Rp18,42 triliun atau 38,90% dari target APBD TA 2025. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian ini tumbuh sebesar 5,44% (yoy). Meskipun pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menandakan bahwa daerah di Sumatera Selatan sudah lebih mandiri dibandingkan dengan periode yang sebelumnya.

Grafik 2.23. Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi per Jenis Pendapatan Daerah Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)





Penurunan Dana Transfer Pusat menjadi tantangan fiskal yang dihadapi oleh daerah. Kontraksi terbesar terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang meskipun masih menyumbang 76,88% dari total pendapatan daerah, nilainya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berkaitan erat dengan kebijakan efisiensi fiskal nasional yang mengatur ulang skema dan besaran penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Dampaknya terasa langsung pada kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga daerah dituntut untuk lebih mengoptimalkan sumber pendapatan mandiri.

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menguat dipengaruhi oleh kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pertumbuhan PAD Sumatera Selatan mencapai Rp4,19 triliun atau 41,95% dari target tahunan, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 81,97% (yoy). Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 22,74%, memperkuat peran strategisnya dalam pembiayaan pembangunan. Kinerja ini terutama ditopang oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang masing-masing tumbuh sebesar 87,04% dan 408,67% (yoy).

Kebijakan Opsi Pajak dan Simplifikasi Retribusi Mendorong Peningkatan PAD. Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terlepas dari implementasi UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan opsi pajak kendaraan bermotor, yang sebelumnya dibagi hasilkan ke kabupaten/kota, kini langsung dicatat sebagai penerimaan pajak daerah. Selain itu, simplifikasi jenis retribusi turut memperluas basis penerimaan daerah. Komponen Lain-lain PAD yang Sah juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 103,37% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh pendapatan dari BLUD serta penerimaan berupa komisi, potongan, dan selisih kurs rupiah, yang menunjukkan potensi besar dari pengelolaan unit layanan daerah secara mandiri.

Grafik 2.24. Pertumbuhan Realisasi per Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

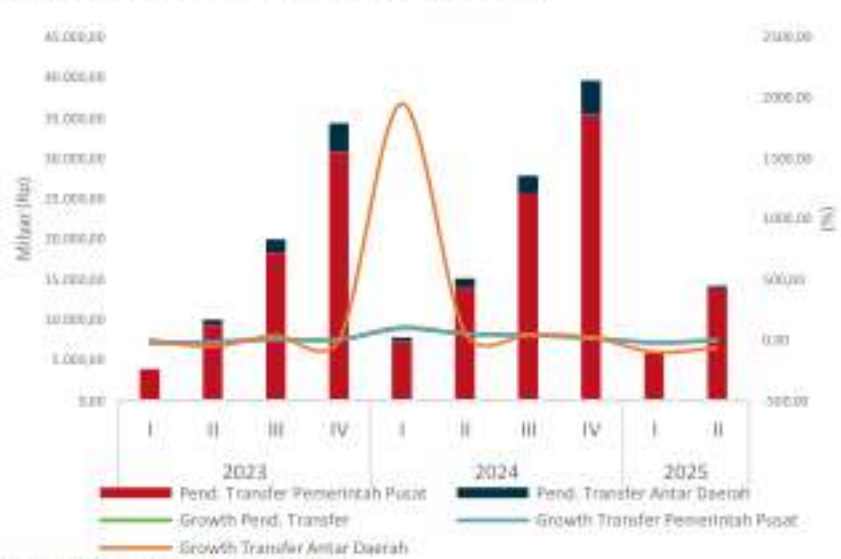
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kontraksi. Di sisi lain, kontraksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 22,8% (yoy). Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa Pemda di Sumatera Selatan yang belum mencatatkan penerimaan tersebut a.l Kab.

Lahat, Kab. Musi Rawas, Kab. OKU Selatan, Kab. PALI, Kab. Muratara dan Kota Lubuklinggau.

2.2.1.2. Pendapatan Transfer

Perlambatan Dana Transfer Menjadi Tantangan Utama Pendapatan Daerah. Pendapatan dari dana transfer mengalami perlambatan signifikan pada Triwulan II 2025. Realisasi tercatat sebesar Rp14,16 triliun, atau 38,05% dari target APBD, dan berkontribusi sebesar 76,88% terhadap total pendapatan daerah. Meskipun masih menjadi komponen dominan, kontribusinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Grafik menunjukkan tren penurunan yang konsisten, terutama pada Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,46% dan 66,51% (yoy). Kebijakan efisiensi fiskal nasional menjadi faktor utama perlambatan pendapatan transfer. Penyesuaian skema dan waktu penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menyebabkan keterlambatan pencairan dan perbedaan pencatatan teknis antar daerah. Grafik menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan transfer secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar 6,19% (yoy), memperkuat bukti bahwa kebijakan pusat berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.

Grafik 2.25. Pertumbuhan Realisasi per Jenis Pendapatan dari Dana Transfer Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Kebijakan Opsi Pajak Mempengaruhi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah. Kontraksi tajam pada Transfer Antar Daerah juga dipengaruhi oleh kebijakan opsi pajak yang mengubah mekanisme pencatatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sebelumnya, penerimaan ini dibagi hasilkan ke kabupaten/kota, namun kini langsung dicatat sebagai Pajak Daerah oleh pemerintah provinsi. Akibatnya, alokasi bagi hasil menurun, dan realisasi Transfer Antar Daerah hanya mencapai Rp368,24 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.12. Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Wilayah Sumatera Selatan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025

Pemerintah Daerah	IKF	Kategori
Provinsi Sumatera Selatan	0.47	Menuju Kemandirian
Kab. Musi Banyuasin	0.17	Belum Mandiri
Kab. Ogan Komering Ulu	0.10	Belum Mandiri
Kab. Muara Enim	0.10	Belum Mandiri
Kab. Lahat	0.09	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas	0.10	Belum Mandiri





Pemerintah Daerah	IKF	Kategori
Kab. Ogan Komering Ilir	0.11	Belum Mandiri
Kab. Banyuasin	0.13	Belum Mandiri
Kab. OKU Timur	0.08	Belum Mandiri
Kab. OKU Selatan	0.02	Belum Mandiri
Kab. Ogan Ilir	0.09	Belum Mandiri
Kab. Empat Lawang	0.05	Belum Mandiri
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0.04	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas Utara	0.06	Belum Mandiri
Kota Palembang	0.39	Menuju Kemandirian
Kota Prabumulih	0.21	Belum Mandiri
Kota Pagar Alam	0.14	Belum Mandiri
Kota Lubuklinggau	0.16	Belum Mandiri

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Daerah. Pendapatan daerah di Sumatera Selatan masih didominasi oleh dana transfer, mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Hingga Juni 2025, dari 18 pemerintah daerah, sebanyak 16 daerah masih berada dalam kategori “Belum Mandiri” berdasarkan indeks kemandirian fiskal. Hanya dua daerah yang masuk kategori “Menuju Kemandirian”, yaitu Kota Palembang dengan indeks 0,39, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan indeks 0,47. Tingginya ketergantungan pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadikan sebagian besar daerah di Sumatera Selatan rentan terhadap perubahan kebijakan nasional. Ketergantungan ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai belanja publik secara mandiri. Dalam konteks efisiensi fiskal nasional dan penyesuaian skema TKD, daerah dengan indeks kemandirian rendah berisiko mengalami gangguan dalam pelaksanaan program pembangunan.

2.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDys)

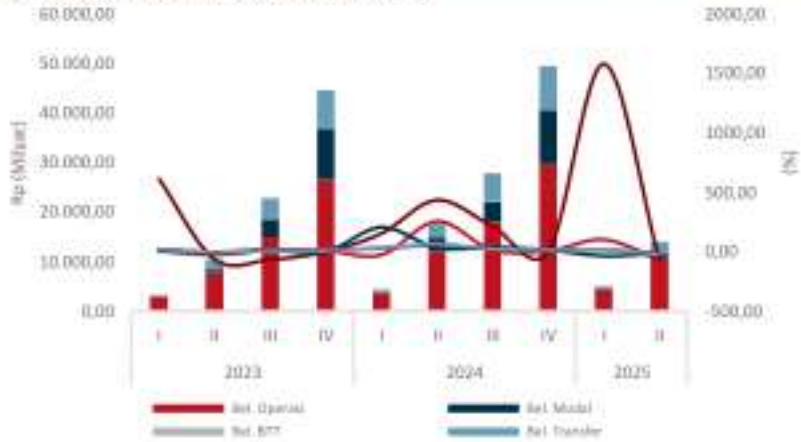
Lain-lain Pendapatan Daerah Mengalami Kontraksi di Triwulan II 2025. Realisasi lain-lain pendapatan daerah pada Triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp68,62 miliar, atau 44,22% dari target tahunan. Kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sangat kecil, yaitu hanya 0,37%, dan mengalami kontraksi sebesar 2,83% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seluruh realisasi lain-lain pendapatan daerah pada periode ini berasal dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, menunjukkan bahwa sumber-sumber lain seperti hibah belum memberikan kontribusi.

2.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Sumatera Selatan Mengalami Perlambatan di Triwulan II 2025. Kinerja belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perlambatan hingga akhir Juni 2025. Realisasi belanja tercatat sebesar Rp13,97 triliun, atau 28,56% dari total pagu APBD TA 2025, dengan kontraksi tahunan sebesar 20,38% (yoy). Penurunan ini terjadi di seluruh jenis

belanja, termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, mencerminkan dampak dari kebijakan efisiensi fiskal sebagaimana yang tergambar dalam Grafik 2.26 berikut.

Grafik 2.26. Pertumbuhan Realisasi per Jenis Belanja Daerah Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Operasi

Belanja Operasi Menjadi Komponen Dominan Meski Terkontraksi. Belanja operasi tetap menjadi kontributor terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan realisasi mencapai Rp10,78 triliun atau 33,38% dari pagu, dan menyumbang 77,15% terhadap total belanja. Namun, secara tahunan, belanja operasi mengalami kontraksi sebesar 10,21% (yoy). Komponen terbesar dalam belanja operasi adalah belanja pegawai, yang mengalami kontraksi 6,70% (yoy).

Grafik 2.27. Pertumbuhan Realisasi per Jenis Belanja Operasi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja Pegawai

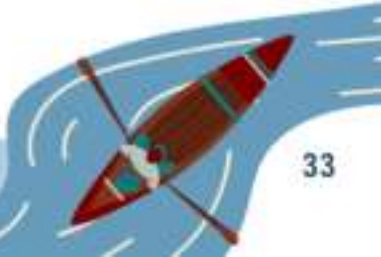
Belanja Pegawai sedikit terkontraksi sebesar 6,70% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp7,17 triliun atau 40,36% dari pagu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembayaran gaji dan tunjangan PNS Daerah, termasuk anggota dan pimpinan DPRD, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 4,27% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp3,30 triliun atau 26,40% dari pagu. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi yang membatasi belanja perjalanan dinas, pemeliharaan, dan honorarium.

Belanja Bunga

Belanja Bunga juga mengalami penurunan signifikan sebesar -41,86% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp9,94 miliar atau





41,75% dari pagu. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pembayaran bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi berkontraksi sebesar 24,31% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp8,48 miliar atau 29,15% dari pagu. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya alokasi subsidi pada awal tahun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Hibah hingga di semester I 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja Hibah

Belanja Hibah juga mengalami kontraksi sebesar 68,46% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp259,28 miliar atau 19,23% dari pagu. Peningkatan ini terutama berasal dari belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial menunjukkan tren yang sangat positif, dengan pertumbuhan sebesar 60,34% (yoy). Realisasi mencapai Rp23,37 miliar atau 19,34% dari pagu, mencerminkan meningkatnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial terdiri dari kartu Indonesia pintar (KIP) yang diberikan kepada 1.925 Mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan bantuan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) disabilitas dan kelompok rentan.

Belanja Modal

Selain belanja operasi, **kinerja belanja modal turut mengalami kontraksi**. Belanja modal menunjukkan perlambatan dengan realisasi sebesar Rp871,05 miliar atau 10,05% dari pagu. Secara y.o.y, belanja modal berkontraksi 69,30% (yoy). Perlambatan ini terutama dikonstruksikan belanja infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan.

Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga mencapai Rp2,50 miliar atau 0,53% dari pagu, dengan kontraksi sebesar 71,84% (yoy). Peningkatan ini terjadi di beberapa daerah, seperti Pemprov Sumatera Selatan, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara enim, Kab. OKU Selatan, Kab. Ogan Ilir, Kab. Empat lawang, Kab. PALI, Kota Prabumulih dan Kota Lubuklinggau.

Belanja Transfer

Belanja transfer berkontraksi di triwulan II 2025. Realisasi belanja transfer sebesar Rp2,31 triliun atau 29,10% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja transfer berkontraksi sebesar 14,04% (yoy) dikonstruksikan oleh realisasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota oleh provinsi dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa oleh kabupaten.

2.2.3. Surplus/Defisit APBD

APBD Sumsel mencatatkan surplus di triwulan II 2025. Realisasi APBD Sumsel tercatat surplus sebesar Rp 4,45 triliun atau dibandingkan dengan periode sama dengan tahun sebelumnya mengalami defisit Rp76,73 miliar. Surplus ini mencerminkan pengendalian belanja yang relatif efektif di tengah kebijakan efisiensi dan transisi pemerintahan, serta menunjukkan upaya menjaga stabilitas fiskal. Namun, melihat realisasi belanja secara konsolidasi sebesar 28,56%, perlu dilakukan akselerasi belanja dengan menggunakan surplus di periode selanjutnya.

2.2.4. Pembiayaan Daerah

Realisasi pembiayaan daerah mengalami pertumbuhan di triwulan II tahun 2025. Realisasi pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp1,20 triliun atau 77,10 % dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pembiayaan daerah berkontraksi sebesar 2180,37%% (yoy) dikonstruksikan dari penurunan penerimaan pembiayaan dan penurunan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp1,25 triliun yang utamanya dikonstruksikan dari penggunaan SILPA tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tercatat Rp48,13 miliar yang dikonstruksikan oleh pembayaran pokok pinjaman dalam negeri.

2.2.5. Proyeksi APBD

Pada Triwulan III Tahun 2025, proyeksi realisasi pendapatan daerah diperkirakan sebesar 69,40% dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer menunjukkan kinerja yang relatif baik, masing-masing mencapai 66,18% dan 63,12%. Sementara itu, terdapat lonjakan signifikan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang mencapai 1715,37%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penerimaan insidental atau koreksi anggaran yang bersifat satu kali.

Di sisi proyeksi belanja, realisasi hingga akhir Triwulan III baru mencapai 58,40%, yang menunjukkan perlunya percepatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Operasi dan Belanja Modal masing-masing terealisasi sebesar 55,96% dan 61,44%, sedangkan Belanja Tidak Terduga masih rendah di angka 11,91%. Defisit anggaran yang tercatat sebesar 223,12% pada periode ini lebih mencerminkan realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan peningkatan pendapatan. Dari sisi pembiayaan, penerimaan telah mencapai 115,02% dari target, menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup mengandalkan pembiayaan untuk menutup kebutuhan fiskal jika pendapatan daerah masih melambat. Secara umum, kinerja anggaran pada Triwulan III masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal optimalisasi belanja agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Tabel 2.13. Proyeksi Realisasi APBD Lingkup Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2025

I-Account	%Q1 (Real)	%Q2 (Real)	%Q3 (Proy)	%Q4 (Proy)
Pendapatan Daerah	15.83%	27.16%	69.40%	94.40%
Pendapatan Asli Daerah	15.53%	41.95%	66.18%	89.63%
Pendapatan dari Dana Transfer	15.93%	38.05%	63.12%	85.59%
Lain-Lain Pendapatan Daerah	10.97%	44.22%	1715.37 %	2421.9%
Belanja Daerah	10.30%	28.56%	58.40%	81.92%
Belanja Operasi	13.64%	33.88%	55.96%	77.44%
Belanja Modal	2.77%	10.05%	61.44%	90.56%
Belanja Tidak Terduga	7.89%	0.52%	11.91%	12.25%
Belanja Transfer	5.33%	29.10%	67.43%	94.73%
Surplus/(Defisit)	157.48%	71.12%	223.13%	237.70%
Pembiayaan Daerah	15.21%	83.26%	131.98%	160.57%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	14.45%	71.30%	115.02%	137.97%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.34%	24.78%	61.72%	97.60%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)





2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dilakukan eliminasi akun-akun resiprokal. Dalam hal ini eliminasi dilakukan terhadap belanja transfer ke daerah dari sisi LRA pemerintah pusat di eliminasi dengan pendapatan transfer dari sisi LRA pemerintah daerah.

2.3.1. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan konsolidasian wilayah Sumsel sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp11,7 triliun atau terkontraksi sebesar 16,82% (yoy). Pendapatan Konsolidasian masih didominasi Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp7,16 triliun atau 61,18% dari total pendapatan konsolidasian. Pada aspek pendapatan yang bersumber dari perpajakan, Pemerintah Pusat masih mendominasi dengan porsi 66,04% dari total pendapatan perpajakan konsolidasian. Penurunan Pendapatan konsolidasian s.d. Triwulan II Tahun 2025 tersebut mayoritas terdapat pada penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian yang turun hingga 41,21% yoy.. Angka PNBP pada pemerintah daerah dan Belanja Transfer pada pemerintah pusat merupakan angka setelah dilakukan eliminasi akun resiprokal antara pendapatan transfer pemda dan belanja transfer pempus. Hal ini mengindikasikan peran dana transfer sangat mendominasi sebagai sumber pendapatan daerah di Sumsel. Sementara itu, di sisi Pendapatan hibah konsolidasi menunjukkan kontraksi sebesar 100% (yoy) dibandingkan pendapatan hibah pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp8,53 miliar rupiah

2.3.2. Belanja Konsolidasian

Belanja konsolidasian wilayah Sumsel hingga Triwulan II tahun 2025 sebesar 20,07 triliun dan terkontraksi sebesar 18,58% (yoy). Belanja Konsolidasian terdiri atas Belanja Pemerintah Konsolidasian Rp17,09 triliun atau 85,17% dari keseluruhan Belanja Konsolidasian dan Transfer sebesar Rp2,98 triliun atau 14,83% dari keseluruhan Belanja Konsolidasian. Dari sisi belanja dan transfer, kontribusi dari belanja pemerintah daerah lebih dominan dibandingkan pemerintah pusat hingga periode triwulan II 2025. Pemerintah daerah berkontribusi sebesar 67,45% sementara Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar 32,55% dalam menggerakkan aktivitas perekonomian melalui kebijakan fiskal di Sumsel. Belanja pegawai masih mendominasi belanja s.d. Triwulan II tahun 2025 dengan proporsi sebesar 52,73% dari keseluruhan belanja pemerintah konsolidasian.

2.3.3. Surplus/Defisit

Hingga triwulan II tahun 2025, defisit konsolidasian sebesar Rp8,37 triliun terkontraksi 20,92% (yoy). Defisit dikontribusi oleh pemerintah daerah sebesar Rp8,99 triliun dan di sisi lain pemerintah pusat mengalami Surplus sebesar Rp0,62 triliun. Hal tersebut didorong oleh tingginya belanja pemerintah pada pemerintah daerah yang tidak diikuti peningkatan dari sisi Pendapatan s.d. Triwulan II 2025.

2.3.4. Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan konsolidasian di wilayah Sumsel sebesar Rp1,20 triliun, meningkat hingga 143,65% (yoy). Realisasi penerimaan pembiayaan Rp1,25 triliun atau naik hingga 123,35% (yoy) dan pengeluaran pembiayaan Rp0,05 triliun atau terkontraksi sebesar 27,55% (yoy). Pembiayaan konsolidasian seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah yang berasal dari penggunaan SiLPA di sisi penerimaan dan pembayaran pokok utang di sisi pengeluaran.

Tabel 2.14. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024-2025 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	2024	2025					Growth 2024-2025
	Konsolidasian	Konsolidasian	Pusat	Daerah	Kontribusi		
					Pusat	Daerah	
A. PENDAPATAN	14,067.49	11.701.41	7,158.34	4,543.07	61,18%	38,82%	-16,82%
I. Perpajakan	9,179.08	8,832.77	5,833.44	2,999.33	66,04%	33,96%	-3,77%
II. PNBP	4,879.88	2,868.64	1,324.90	1,543.74	46,19%	53,81%	-41,21%
III. Hibah	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-100,00%
B. BELANJA	24,652,52	20,071.91	6,534.37	13,537.54	32,55%	67,45%	-18,58%
I. Belanja Pemerintah	22,553.36	17,094.28	5,439.01	11,655.28	31,82%	68,18%	8,93%
II. Transfer	2,099.16	2,977.63	1,095.36	1,882.26	36,79%	63,21%	41,85%
C. SURPLUS/DEFISIT	-10,585.03	-8,370.50	623.97	-8,994.47	-7,45%	107,45%	-20,92%
D. PEMBIAYAAN	493.82	1,203.21	0.00	1,203.21	0,00%	100,00%	143,65%
I. Penerimaan	560,25	1,251.34	0.00	1,251.34	0,00%	100,00%	123,35%
II. Pengeluaran	66,43	48,13	0.00	48.13	0,00%	100,00%	-27,55%
E. SILPA (SIKPA)	-10,091.21	-7,167.29	623.97	-7,791.26	-8,01%	108,71%	-28,97%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)





2.4. Progress Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mempunyai tujuan menyediakan akses terhadap makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan kualitas SDM, serta mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini utamanya dilatarbelakangi oleh permasalahan gizi buruk dan prevalensi stunting yang masih tinggi karena tingkat kemiskinan yang tinggi. Kurangnya daya beli masyarakat miskin menyebabkan ketidakmampuan mengakses makanan dengan gizi seimbang sehingga program ini menjadi salah satu strategi memotong rantai kemiskinan melalui perbaikan gizi anak, khususnya dari keluarga miskin dan rentan, dengan harapan akan tumbuh generasi yang sehat dan cerdas, seiring dengan akses pendidikan yang memadai.

Implementasi Program MBG secara nasional dimulai pada 6 Januari 2025 dan sampai dengan akhir bulan Juni 2025 terdapat 72 SPPG aktif dari target sebanyak 969 SPPG (7,4%) dengan total penerima manfaat 233.067 orang dari target 2.047.861 orang (11,38%). Dari 17 Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan, hanya Kabupaten OKU Selatan yang belum melaksanakan program MBG dikarenakan belum ada SPPG pada wilayah OKU Selatan.

Grafik 2.28. Realisasi Penerima MBG Per Kelompok Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025



Sumber: Sintesa Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dan KPPN di wilayahnya secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan dengan mengadakan kunjungan ke SPPG di Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan juga telah mengadakan *Focus Group Discussion* dengan SPPG di seluruh Sumatera Selatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Terlihat jelas bahwa cakupan penerima manfaat program yang semakin luas di seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan akhir bulan Juni 2025. Selain itu, peningkatan penerima manfaat juga merata baik dari balita, anak sekolah pada jenjang PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs/PKBM, SMA/MA, SLB, santri sampai dengan ibu hamil dan ibu menyusui. Dari hasil FGD dan monev juga diketahui bahwa kualitas layanan terus mengalami perbaikan mulai dari tingkat higienitas dapur, penyusunan menu sampai dengan dokumentasi laporan. Beberapa SPPG juga telah

mengembangkan *dashboard* harga bahan pangan dan sistem *shift* kerja dapur sebagai inovasi lokal.

Tingkat inflasi Sumatera Selatan pada bulan Juni 2025 mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, masih terkendali pada rentang sasaran target inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi Sumsel pada Januari 2025 berada di angka 0,92% (yoy) dengan andil terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selanjutnya pada Februari 2025 inflasi Sumsel tercatat di angka 0,49% (yoy) dengan andil terbesar dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (emas perhiasan). Demikian juga yang terjadi pada bulan Maret 2025, angka inflasi Sumsel tercatat 1,77% (yoy). Bahan makanan yang termasuk dalam komoditas utama penyumbang inflasi di Sumsel pada triwulan I tahun 2025 adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Dari data tersebut, beras sebagai bahan pangan utama masih terjaga, baik harga maupun pasokannya, karena Sumsel masih merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Sedangkan pada triwulan II tahun 2025, inflasi Sumatera Selatan bulan April 2025 berada pada angka 2,74% (yoy), bulan Mei 2025 pada angka 2,33% (yoy), dan pada bulan Juni tercatat 2,48% (yoy). Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (emas perhiasan) memberikan andil terbesar di sepanjang triwulan II tersebut.

Pada triwulan I tahun 2025, NTP Tanaman Pangan selalu mengalami peningkatan bahkan pada Maret 2025 mencapai di atas 100 yang berarti bahwa petani tanaman pangan mengalami surplus karena harga hasil produksinya. Pada triwulan II tahun 2025 terdapat penurunan dibandingkan periode sebelumnya walaupun masih tetap diatas 100. Peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan MBG berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel dalam tiga bulan terakhir mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. NTP merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani. Nilai yang semakin tinggi semakin mencerminkan tingkat kesejahteraan petani yang membaik. Meningkatnya NTP mencerminkan adanya peningkatan daya beli petani yang diperoleh dari kenaikan harga hasil produksi pertanian, utamanya pada beberapa komoditas utama. Pada Juni 2025, NTP Sumsel mencapai 122,38 dimana terdapat penurunan dibanding dengan akhir periode triwulan I tahun 2025. Hal ini disebabkan penurunan NTP pada beberapa subsektor diantaranya subsektor hortikultura sebesar 3,87%, subsektor perkebunan 2,8%, subsektor perikanan 0,06% dan perikanan tangkap sebesar 0,25%.

Tabel 2.15. Data NTP per SubSektor Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025

NTP Subsektor	April 2025	Mei 2025	Juni 2025
Tanaman Pangan (NTPP)	98,44	100,95	122,61
Hortikultura (NTPH)	95,24	94,27	90,62
Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	133,8	135,21	131,42
Peternakan (NTPT)	99,7	103,43	103,58
Perikanan (NTNP)	105,59	105,82	105,76





NTP Subsektor	April 2025	Mei 2025	Juni 2025
1. Nelayan (NTN)	115,03	115,2	114,92
2. Pembudidaya Ikan (NTPi)	93,33	93,65	93,88
NTP	123,47	125,01	122,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumsel (diolah)

Terdapat berbagai studi yang membuktikan bahwa MBG dapat memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM. Salah satu studi oleh *United Nation World Food Programme* (2023) menunjukkan bahwa pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan makanan bergizi gratis ini berhasil meningkatkan produksi dan membuka lapangan kerja baru. Langkah-langkah pemberdayaan dalam implementasi program MBG selain akan berdampak pada ketahanan pangan, juga akan meningkatkan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan II tahun 2025 tercatat 5,42%, tertinggi kedua di Sumatera dan melampaui pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 5,12%.

Isu-Isu Dalam Implementasi Program MBG

Terlepas dari banyaknya kajian terkait dampak positif MBG pada berbagai aspek, baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, implementasi MBG di Indonesia pada umumnya dan secara khusus di Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2025, isu pelaksanaan program MBG adalah kualitas makanan yang disajikan. Pada 5 Mei 2025, terdapat 174 siswa mengalami gejala mual, muntah dan pusing setelah menyantap makanan MBG di Kabupaten PALI. Pemda PALI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyelidikan dan penghentian sementara program MBG.

Rekomendasi

Menindaklanjuti permasalahan berupa keluhan terkait kualitas makanan yang disajikan maka direkomendasikan beberapa langkah perbaikan yaitu pemilihan bahan baku yang berkualitas, waktu pemasakan yang efisien, pengiriman yang tepat waktu dan uji kelayakan sebelum makanan didistribusikan. Selain itu, diperlukan pula peningkatan pengawasan, penggunaan tenaga kerja yang profesional, dan penekanan pada kualitas dan kebersihan bahan baku oleh SPPG.





Boks 2

Pengaruh Angka Melek Huruf Dan Realisasi Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Selatan Tahun 2020-2023

Adelia Rahmawati (Universitas Sriwijaya)

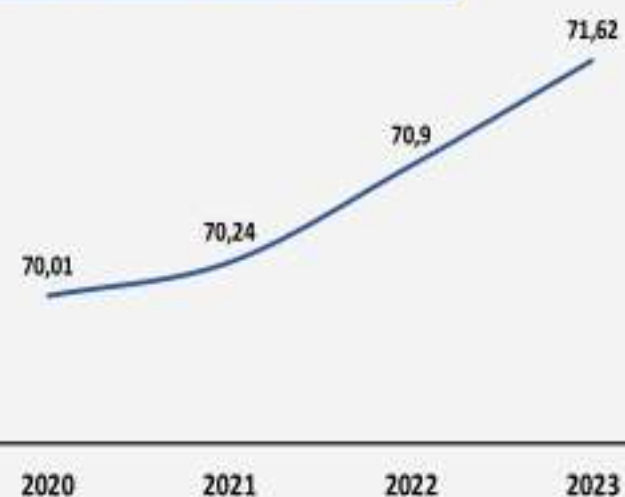
Disparitas pembangunan manusia antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi persoalan strategis yang memerlukan perhatian serius dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah. Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan mencolok dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merepresentasikan kualitas hidup masyarakat. IPM yang belum merata menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara adil oleh seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

IPM merupakan indikator komposit yang mencerminkan capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Di Sumatera Selatan, tren IPM selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan arah yang positif dan berkelanjutan. Pada 2020, IPM tercatat sebesar 70,01 dan meningkat berturut-turut menjadi 70,24 pada tahun 2021, 70,90 pada tahun 2022, hingga 71,62 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses terhadap layanan dasar.

Dari persebaran wilayah, Kabupaten OKU Selatan secara konsisten mencatat IPM tertinggi, mencapai 80,02 pada 2023. Sebaliknya, Kabupaten OKU Timur memiliki IPM terendah di tahun yang sama, yaitu 66,60. Kesenjangan ini menandakan masih adanya ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah yang perlu direspons melalui perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih adil dan berbasis kebutuhan.

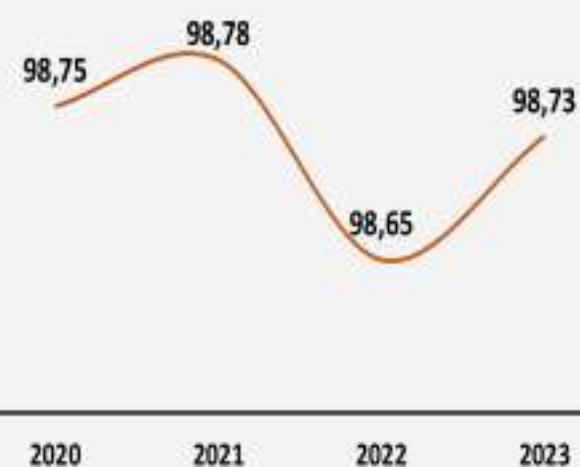
Salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan IPM adalah angka melek huruf. Indikator ini sangat relevan dalam menilai keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dasar. Berdasarkan penelitian (Megantara & Budhi, 2020) menyatakan, Angka Melek Huruf (AMH) secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data Selama periode 2020–2023, tingkat melek huruf di Sumatera Selatan cenderung stabil pada angka yang tinggi, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, angka melek huruf mencapai 98,75%, kemudian naik menjadi 98,78% pada 2021. Namun, terjadi sedikit penurunan pada 2022 menjadi 98,65%, sebelum kembali naik ke 98,73% pada 2023. Penurunan di tahun 2022 meskipun kecil, tetap menjadi catatan penting dalam mengevaluasi efektivitas program keaksaraan dan pendidikan dasar. Secara spasial, Kabupaten OKU Selatan terus mencatat tingkat melek huruf tertinggi, mencapai 99,63% pada 2023, sementara Kota Pagar Alam memiliki tingkat terendah sebesar 97,1%.

Indeks Pembangunan Manusia



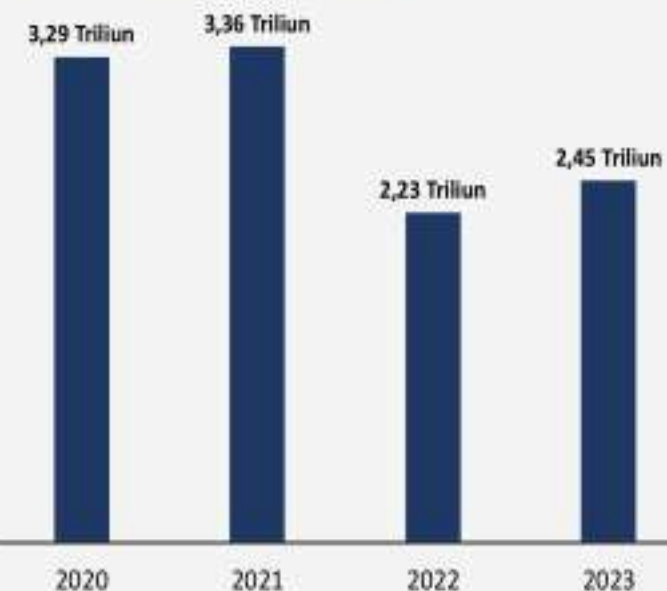
Sumber: BPS, 2020-2023

Angka Melek Huruf (%)



Sumber: BPS, 2020-2023

Realisasi Belanja Pendidikan



Sumber: DJP, 2020-2023





Selain angka melek huruf, belanja pendidikan juga berperan penting dalam mendorong peningkatan IPM. Berdasarkan penelitian (Renaldi & Agustina, 2024), Realisasi belanja Pendidikan secara keseluruhan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di antara ketiga sektor tersebut, pengeluaran di sektor Pendidikan memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan IPM, lebih besar dibandingkan sektor Kesehatan dan Ekonomi. Selama empat tahun terakhir, tren belanja pendidikan di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, anggaran pendidikan berada pada kisaran Rp3,29 hingga Rp3,36 triliun. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis menjadi Rp2,23 triliun, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penyesuaian kebijakan fiskal nasional pascapandemi. Kendati demikian, pada tahun 2023 terlihat adanya upaya pemulihan dengan meningkatnya alokasi anggaran menjadi Rp2,45 triliun. Kabupaten Musi Banyuasin mencatat belanja pendidikan tertinggi pada tahun 2023, mencapai Rp914 miliar, sedangkan Kota Pagar Alam tercatat sebagai daerah dengan belanja pendidikan terendah yaitu Rp169 miliar. Ketimpangan alokasi ini menjadi sinyal perlunya pendekatan perencanaan berbasis kebutuhan lokal agar distribusi anggaran lebih proporsional dan berdampak.

PENGARUH REALISASI BELANJA PENDIDIKAN DAN ANGKA MELEK HURUF TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2023

Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup 18 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020 hingga 2023, dengan total 72 observasi yang merupakan kombinasi dari 18 wilayah dan 4 tahun pengamatan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh belanja pemerintah dan angka melek huruf terhadap capaian pembangunan manusia di tingkat daerah, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis bagi pembangunan manusia di Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil analisis statistik panel, ditemukan bahwa sektor pendidikan memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas manusia. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM), yang dipilih berdasarkan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM).

Berdasarkan hasil uji t, angka melek huruf (X_1) memiliki nilai t-statistik sebesar -0,406666 dengan nilai probabilitas sebesar 0,6855. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($\alpha=0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel angka melek huruf tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Sedangkan Realisasi belanja Pendidikan memiliki nilai t-statistik sebesar -0,406666 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0100. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($\alpha=0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Realisasi belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F-statistic sebesar 3,8477 dengan nilai probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,0260. Karena p-value < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan artinya, variabel Angka Melek Huruf dan Realisasi Belanja Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun nilai R-squared yang diperoleh sebesar 0,10 atau setara dengan 10%. Artinya, variabel independen dalam model mampu menjelaskan sekitar 10% variasi yang terjadi.

Hasil temuan ini sejalan dengan studi terdahulu yang menekankan pentingnya investasi pendidikan dalam pembangunan manusia. Penelitian Hasibuan dan Syahbudi (2022) menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan dapat mendorong akses terhadap layanan pendidikan yang lebih luas dan berkualitas, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas tenaga kerja, peningkatan pendapatan per kapita, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan merata di seluruh wilayah.

Dengan memperhatikan hasil analisis statistik, sinergi antara peningkatan IPM, fluktuasi belanja pendidikan, dan stabilitas angka melek huruf menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sumatera Selatan telah berada pada jalur yang positif. Namun demikian, tantangan dalam hal pemerataan, efektivitas kebijakan, dan penyalarsan anggaran masih perlu terus diatasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang relevan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan jumlah fasilitas pendidikan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi IPM. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat kebijakan berbasis data dan memperluas cakupan intervensi pembangunan manusia, terutama di wilayah dengan capaian IPM yang masih rendah. Peningkatan alokasi belanja pendidikan yang lebih adil, merata, dan berbasis kebutuhan nyata menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.





Peran dan Strategi Pengembangan KDMP/KKMP di Sumatera Selatan

Pada tahun 2023, tercatat sejumlah 4.257 koperasi yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Instruksi Presiden, serentak pada 12 Juli 2025 seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Terdapat 17 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1.683 desa dan 327 kelurahan, dan terbentuk 3.258 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

- Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tanggal 21 Juli 2025 di 38 Provinsi seluruh Indonesia terdapat 92 KDMP/KKMP yang menjadi *mock up*. Terdapat 4 KDMP/KKMP yang menjadi *mock up* di Provinsi Sumatera Selatan, yakni KDMP Surya Adi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, KDMP Muara Beliti Baru serta KKMP Mangun Harjo di Kabupaten Musi Rawas, dan KKMP Sukodadi di Kota Palembang.
- Dalam pembentukan KDMP/KKMP, terdapat tiga bentuk yakni pertama pembentukan koperasi baru. Yang kedua adalah dengan model pengembangan koperasi yang sudah ada dan yang ketiga revitalisasi koperasi, dimana koperasi sudah ada namun kurang aktif atau tidak aktif. Konsep revitalisasi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali koperasi tersebut.
- KDMP/KKMP bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, setiap KDMP/KKMP dapat menerima pinjaman sebesar maksimal Rp. 3 milyar dengan tingkat suku bunga 6% pertahun dan jangka waktu pinjaman maksimal selama 72 bulan dengan grace periode selama paling lama 8 bulan. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 250 Triliun untuk program KDMP/KKMP dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp 3 milyar setiap koperasi. Penyaluran ini dilakukan melalui Bank Himbara melalui skema pembiayaan ke KDMP/KKMP.
- Dalam proses pengembangan KDMP/KKMP, terdapat 18 BUMN yang terdiri dari tujuh sektor usaha, yang siap membantu perkembangan KDMP/KKMP sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan KDMP/KKMP di daerah melalui perspektif fiskal. Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil DJPb dapat berkontribusi dalam pengembangan KDMP/KKMP.



3.1 Pendahuluan

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah bagian dari strategi nasional yang bertujuan menyentuh langsung basis ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sama dengan pembentukan koperasi pada umumnya yaitu dengan berlandaskan pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Hal ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam UU tersebut, pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini diperkuat dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa Koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kemandirian. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian diatur lebih lanjut dengan Permenkop UKM No.9 Tahun 2018. Dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara pada tanggal 3 Maret 2025 dengan tujuan membentuk 70.000-80.000 koperasi desa/kelurahan yang dinamakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Selanjutnya Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada hari Senin tanggal 12 Juli 2025, bertepatan dengan hari Koperasi Nasional. Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) ini diharapkan akan memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong perekonomian. Penggunaan nama merah putih merujuk pada bendera merah putih yang menekankan pada semangat nasionalisme dan kedaulatan ekonomi rakyat berbasis pada gotong royong, kemandirian, dan solidaritas nasional.. KDMP/KKMP memiliki tujuan sebagai pemutus rantai kemiskinan di desa/kelurahan, mengurangi praktik tengkulak, rentenir, dan pinjaman online, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal desa. Layanan KDMP/KKMP meliputi unit simpan pinjam, Gudang pangan, klinik/apotik desa, dan fasilitas digital seperti marketplace. Isu pendirian KDMP/KKMP menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Jumlah anggota KDMP/KKMP bervariasi dimana rata-rata jumlah anggota koperasi adalah 25 orang. Sementara pemerintah menargetkan KDMP/KKMP dapat memiliki 20 juta anggota. Anggota KDMP/KKMP sendiri diproyeksikan tidak menerima bantuan sosial karena diharapkan KDMP/KKMP dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan menjadi penyedia produk yang dibutuhkan. KDMP/KKMP bukan bagian dari BUMDes, melainkan berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi KDMP/KKMP, Kepala Desa/Lurah secara ex-officio merupakan pengawas koperasi..

Dalam rangka mengetahui efektivitas peran koperasi dan evaluasi strategi pengembangannya di tingkat daerah, diperlukan suatu pendekatan analisis yang sistematis dan berbasis data. Kajian ini bertujuan untuk menilai capaian peran KDMP/KKMP dalam pembangunan ekonomi lokal, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pengembangan koperasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah, pengurus koperasi maupun pemerintah pusat. Hasil analisis diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan kontekstual sesuai karakteristik wilayah.

3.2 Analisis Tematik

3.2.1 Perkembangan KDMP/KKMP di Sumatera Selatan

3.2.1.1 Perkembangan KDMP/KKMP Aktif di Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2023, tercatat sejumlah 4.257 koperasi yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Instruksi Presiden, serentak pada 12 Juli 2025 seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Terdapat 17 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1.683 desa dan 327 kelurahan, dan terbentuk 3.258 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tabel 3.1 Jumlah KDMP Lingkup Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Desa /Kel sudah bentuk KMP	Jumlah KDMP		Jumlah Modal
			Desa	Kel	
1	Banyuasin	313	289	24	945.189.000
2	Empat Lawang	156	147	9	3.859.460.000
3	Lahat	377	360	17	577.655.000
4	Muara Enim	256	246	10	336.365.000
5	Musi Banyuasin	242	229	13	2.322.840.000
6	Musi Rawas	199	186	13	444.097.000
7	Musi Rawas Utara	89	82	7	159.555.000
8	Ogan Ilir	241	227	14	490.450.000
9	Ogan Komerling Ilir	327	311	16	154.705.000
10	Ogan Komerling Ulu	157	143	14	159.493.000
11	Ogan Komerling Ulu Selatan	259	251	8	20.425.000
12	Ogan Komerling Ulu Timur	312	305	7	572.714.000
13	PALI	71	65	6	5.260.000
14	Lubuk Linggau	72	0	72	132.000.000
15	Pagar Alam	35	0	35	54.610.000
16	Palembang	107	0	107	243.820.000
17	Prabumulih	45	12	33	140.327.000
Total		3.258	2.853	405	10.618.965.000

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

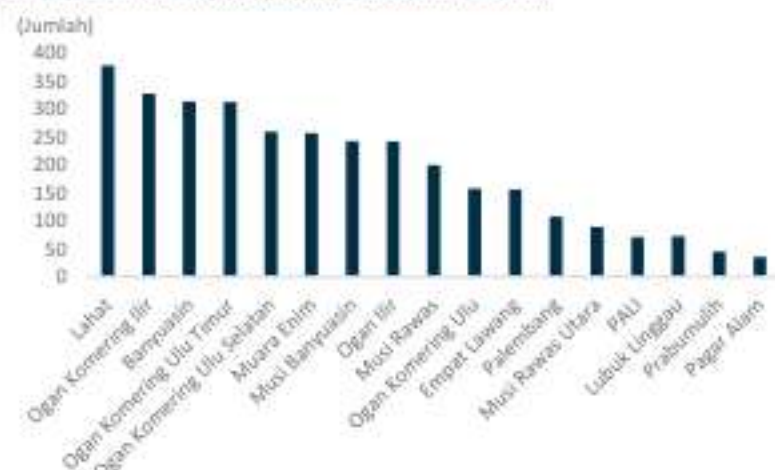
Berdasarkan data pada tabel diatas, Pemda Lahat memiliki jumlah KDMP/KKMP terbanyak sejumlah 377 koperasi, diikuti oleh Pemda Ogan Komerling Ilir sejumlah 327 koperasi, Pemda Banyuasin dengan 313 koperasi. Sedangkan Pemda Pagar Alam memiliki jumlah sedikit yaitu sejumlah 35 koperasi, diikuti oleh Kota Prabumulih sejumlah 45 koperasi, dan terakhir adalah Pemda PALI dengan 71 koperasi. Untuk Koperasi Kelurahan paling banyak berada di Kota Palembang sejumlah 107 koperasi. Selanjutnya Kota Lubuk Linggau





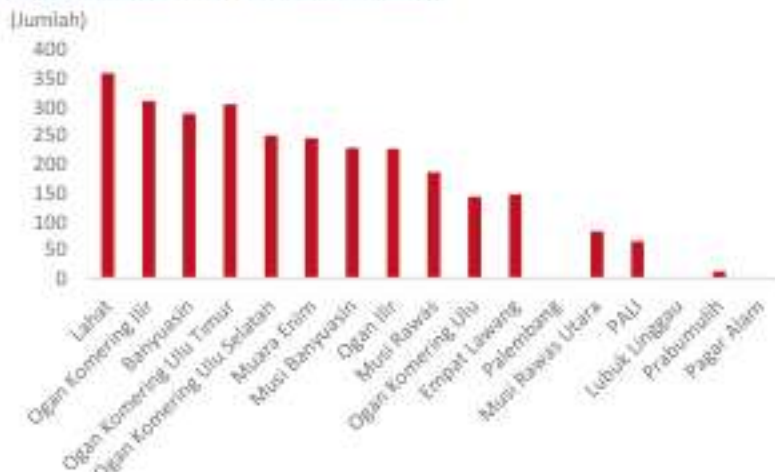
sejumlah 72 koperasi dan Kota Pagar Alam berjumlah 35 koperasi. Untuk Kabupaten yang memiliki Koperasi Desa Merah Putih terbanyak berada di Kabupaten Lahat sejumlah 360 koperasi, Kabupaten Ogan Komering Ilir sejumlah 311 koperasi dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sejumlah 305 koperasi.

Grafik 3.1 Jumlah Total KDMP/KKMP di Sumatera Selatan



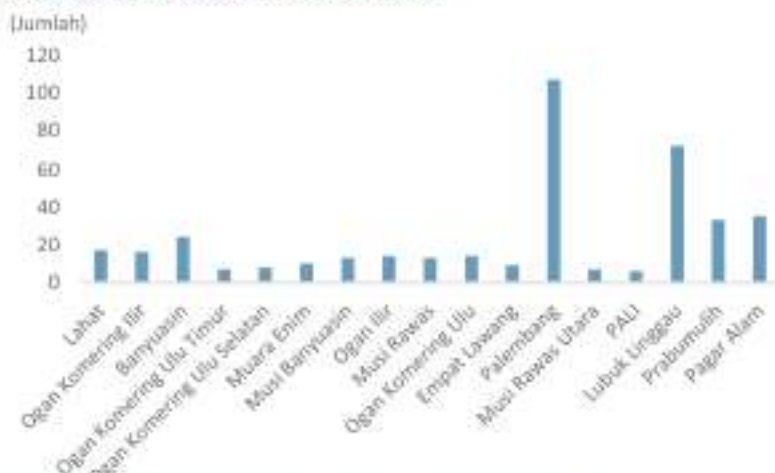
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Grafik 3.2 Jumlah KDMP di Sumatera Selatan



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

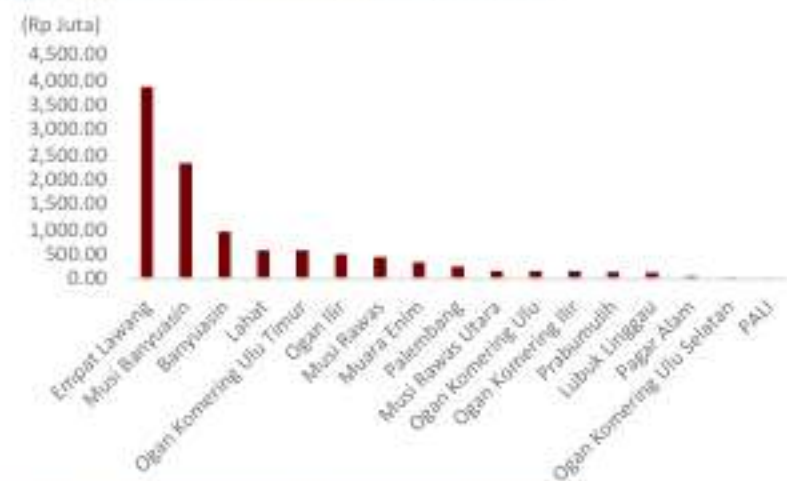
Grafik 3.3 Jumlah KKMP di Sumatera Selatan



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai modal awal pembentukan koperasi, Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan modal sejumlah Rp 3.859.460.000,- Kabupaten Musi Banyuasin Rp 2.322.840.000,- dan Kabupaten Banyuasin Rp 945.189.000,-. Ketiga kabupaten tersebut mengeluarkan modal awal terbesar dalam rangka pembentukan KDMP/KKMP. Sedangkan Kabupaten PALI mengeluarkan modal awal paling kecil yaitu Rp 5.260.000,-. Pemda Ogan Komering Ulu Selatan Rp 20.425.000,- dan Kota Pagar Alam Rp 54.610.000,-. Ketiga Kabupaten/Kota tersebut adalah pemerintah daerah yang paling sedikit mengeluarkan modal awal pembentukan KDMP/KKMP.

Grafik 3.4 Modal Awal KDMP/KKMP di Sumatera Selatan



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

3.2.1.2 Jumlah KDMP/KKMP Mock Up awal di Provinsi Sumatera Selatan

Mock up KDMP/KKMP adalah bentuk atau model awal Koperasi percontohan yang akan beroperasi secara intensif dan terukur. Program ini adalah bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi pada area tempat KDMP berada. KDMP yang ditunjuk sebagai mock up menjadi percontohan pelaksanaan program KDMP. Tujuan mock up KDMP adalah memberikan contoh atau demonstrasi bentuk program KDMP yang akan beroperasi di desa/kelurahan, identifikasi masalah dan pelaksanaan perbaikan program KDMP. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tanggal 21 Juli 2025 di 38 Provinsi seluruh Indonesia terdapat 92 KDMP/KKMP yang menjadi mock up.

Kriteria KDMP mock up (percontohan) harus memiliki kantor dan unit usaha seperti sembako, simpan pinjam, obat murah (apotek), klinik desa/kelurahan, Gudang (cold storage), sarana logistik, dan dapat memiliki usaha lain sesuai dengan penugasan pemerintah, memiliki kearifan lokal, dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa/kelurahan setempat sesuai karakteristik wilayah. KDMP/KKMP yang akan menjadi mock up mendapat persetujuan dari Bupati/walikota untuk diusulkan menjadi kopdes/kel percontohan/mock up kepada Menteri Koperasi.

Terdapat 4 KDMP/KKMP yang menjadi mock up di Provinsi Sumatera Selatan, yakni KDMP Surya Adi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, KDMP Muara Beliti Baru dan KKMP Mangun Harjo di Kabupaten Musi Rawas, serta KKMP Sukodadi di Kota Palembang. Keempat KDMP mock up tersebut didukung oleh dua bank yakni Bank Mandiri dan Bank BNI.

3.2.1.3 Struktur SDM dan Organisasi pada KDMP/KKMP

Pendirian KDMP/KKMP mengikuti syarat pendirian koperasi pada umumnya. KDMP dapat berupa badan usaha baru atau perubahan dari koperasi yang sudah ada. Secara umum, syarat-syarat pendirian KDMP meliputi hasil dari musyawarah desa/kelurahan, adanya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta memiliki akte pendirian koperasi yang disahkan oleh notaris. Dalam proses pembentukan KDMP/KKMP, pihak desa/kelurahan harus mengadakan musyawarah desa/kelurahan sehingga terdapat kesepakatan pendirian, kesepakatan kebutuhan modal yang harus dikeluarkan dan jenis usaha koperasi yang akan dijalankan. Selanjutnya anggota melakukan penyusunan AD/ART yang





dibahas dalam rapat dan disetujui oleh anggota. Dalam AD/ART mencakup kepengurusan, keanggotaan, lini usaha, dan aturan lain yang disepakati untuk disusun. Selanjutnya pengurus koperasi mengajukan pembuatan akta pengesahan pendirian koperasi kepada notaris. Akta pendirian tersebut diajukan ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Dalam pembentukan KDMP/KKMP, terdapat tiga bentuk yakni pertama pembentukan koperasi baru. Yang kedua adalah dengan model pengembangan koperasi yang sudah ada dan yang ketiga revitalisasi koperasi, dimana koperasi sudah ada namun kurang aktif atau tidak aktif. Konsep revitalisasi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali koperasi tersebut.

Pengurus KDMP/KKMP terdiri dari pengurus (inti), pengawas, dan pengelola. Pengurus inti KDMP/KKMP terdiri dari ketua, wakil ketua (Bidang usaha), wakil ketua (bidang anggota), sekretaris, dan bendahara. Pengawas KDMP/KKMP terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Desa/Lurah secara ex-officio dan anggota minimal dua orang. Dan terakhir pengelola KDMP/KKMP yang bertugas untuk menjalankan kegiatan operasional KDMP/KKMP. Keanggotaan KDMP/KKMP paling tidak berjumlah 20 orang. Dalam hal keanggotaan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan pengawas KDMP/KKMP. Hal ini termaktub dalam Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2019 dan SE Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025.

3.2.1.4 Pendanaan dan Pembiayaan KDMP/KKMP di Provinsi Sumatera Selatan

KDMP/KKMP bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, setiap KDMP/KKMP dapat menerima pinjaman sebesar maksimal Rp. 3 miliar dengan tingkat suku bunga 6% pertahun dan jangka waktu pinjaman maksimal selama 72 bulan dengan grace periode selama paling lama 8 bulan..

Selain bank umum, Badan Layanan Umum (BLU) dapat memberikan pembiayaan kepada KDMP/KKMP. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) adalah salah satu BLU yang memberikan komitmen memberikan pembiayaan kepada KDMP/KKMP. LPDB memberikan keleluasaan berupa pemberian bunga sebesar 3% pertahun dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dan dapat diberikan grace period maksimal 12 bulan. Adapun pinjaman yang diberikan LPDB paling tinggi sebesar Rp 5 miliar. Dalam pengajuan pembiayaan, terdapat beberapa persyaratan diantaranya harus ada jaminan yang dapat dijaminkan, pengurus dan pengawas KDMP/KKMP tidak memiliki kolektibilitas macet pada Lembaga keuangan. LPDB saat ini dalam proses pembiayaan untuk KDMP Babat di Kabupaten PALI sebesar Rp 2,9 miliar.

Menteri Keuangan melalui Konferensi Pers hasil rapat berkala KSKS tanggal 28 Juli 2025, pemerintah berkomitmen mendukung KDMP/KKMP. Dukungan tersebut berupa jaminan pinjaman KDMP/KKMP tidak akan mengganggu likuiditas perbankan. Dimana pembiayaan KDMP/KKMP ini tidak akan menarik Dana Pihak Ketiga (DPK). Pemerintah telah mempersiapkan skema pembiayaan melalui dana APBN yang disalurkan ke perbankan yang ditunjuk pemerintah.

3.2.1.5 Jenis Usaha KDMP/KKMP

KDMP/KKMP dalam pelaksanaan kegiatannya menyediakan bahan untuk memutus rantai tengkulak dan menyediakan kebutuhan dasar dari anggota yang ada disekitar koperasi tersebut. Jenis usaha KDMP/KKMP meliputi ketersediaan kebutuhan pokok, layanan Kesehatan, pergerakan ekonomi lokal, sampai dengan jasa keuangan. Dalam bidang usaha penyediaan gerai sembako dimana KDMP/KKMP menyediakan kebutuhan pokok dan produk sehari-hari (retail) bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Sebagai apotek desa/kelurahan, koperasi menyediakan obat-obatan yang dapat dibeli tanpa resep atau dengan resep apabila koperasi bekerja sama dengan apoteker. Koperasi juga dapat berperan sebagai klinik desa dengan menyediakan layanan kesehatan dasar bagi anggota atau warga sekitar dengan bekerjasama dengan dokter. Selain itu, KDMP/KKMP juga dapat melaksanakan kegiatan penyediaan unit simpan dengan biaya administrasi dan bunga yang lebih ringan. Penyediaan gudang/logistik menjadi salah satu syarat bagi KDMP/KKMP.

KDMP/KKMP pada tempat tertentu dapat juga mengelola usaha peternakan, pertanian dan perkebunan untuk peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi desa bagi anggotanya. KDMP/KKMP juga wajib menyediakan tempat usaha bagi anggota koperasi yang memiliki usaha UMKM untuk memasarkan produknya di koperasi. Selain itu, koperasi juga diminta untuk membantu memasarkan produk olahan makanan dan kerajinan dari masyarakat desa tempat KDMP/KKMP berlokasi. KDMP/KKMP wajib hadir sebagai salah satu tempat untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan jasa di area anggota koperasi dan lingkungan koperasi. Selain itu salah satu fungsi KDMP/KKMP adalah berperan sebagai penyalur bantuan sosial dari pemerintah dan sebagai penyangga harga pangan desa/kelurahan. Fungsi KDMP/KKMP ini selaras dengan ucapan Gubernur Sumatera Selatan pada acara peluncuran serentak KDMP/KKMP, bahwa koperasi harus menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan hanya etalase sembako.

Sebagai contoh KDMP Sukodadi di Kota Palembang yang menjadi koperasi mock up membuka lini usaha antara lain budidaya jamur tiram, pembenihan ikan, pembesaran ikan, budidaya kambing, bank sampah, usaha sembako, produksi sabun cuci, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga. KDMP Muara Beliti Baru di Kabupaten Musi Rawas sebagai mock up membuka lini usaha simpan pinjam, penyediaan sembako, penyediaan pupuk, penyediaan sarana pertanian, penyediaan bahan jenis usaha lain yang dilakukan anggota dan masyarakat sekitar. KDMP Babat dari Kabupaten Muara Enim bergerak pada unit usaha simpan pinjam, perdagangan sembako, perdagangan kebutuhan rumah tangga, unit jasa pertanian, unit jasa perkebunan, unit jasa produksi, unit jasa kerajinan, unit jasa keuangan mikro, usaha layanan, dan usaha pemasaran produk lokal.

3.2.2 Dukungan Pemerintah untuk Pengembangan KDMP/KKMP di Provinsi Sumatera Selatan

3.2.2.1 Kebijakan Pemerintah terkait Pengembangan KDMP/KKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 250 Triliun untuk program KDMP/KKMP dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp 3 milyar setiap koperasi. Penyaluran ini dilakukan melalui Bank Himbara melalui skema





pembiayaan ke KDMP/KKMP. Kementerian Koperasi dan UKM bekerja dengan pihak terkait melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus dan anggota KDMP/KKMP untuk membangun dan mengelola KDMP/KKMP. Kemenkop dan UKM juga berperan dalam menentukan arah KDMP/KKMP setempat dalam melakukan usahanya.

3.2.2.2 Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pengembangan KDMP di Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengumumkan bahwa pendirian KDMP/KKMP sudah selesai 100% sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan di lingkup Provinsi Sumatera Selatan yakni 3.258 koperasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Kanwil Hukum Sumatera Selatan bekerja sama dalam percepatan legalisasi KDMP/KKMP dengan mendorong notaris lingkup Provinsi Sumatera Selatan agar tidak terlalu membebani Koperasi. Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan secara berkala melakukan diskusi dengan perwakilan Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan terkait kemajuan KDMP/KKMP lingkup Sumatera Selatan. Pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga telah memberikan bantuan modal awal dengan total nilai Rp.10.618.965.000 dimana Kabupaten Empat Lawang menjadi pemberi modal awal terbesar senilai Rp. 3.859.460.000 untuk 147 KDMP dan 9 KKMP.

3.2.2.3 Dukungan BUMN untuk Pengembangan KDMP/KKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Dalam proses pengembangan KDMP/KKMP, terdapat 18 BUMN yang terdiri dari tujuh sektor usaha, yang siap membantu perkembangan KDMP/KKMP sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BUMN akan melakukan kerja sama melalui beberapa kegiatan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) seperti pelatihan, distribusi produk, sampai pada mitra dalam berusaha. Pada sektor farmasi, KDMP/KKMP dapat bekerja sama dengan Indofarma, Kimia Farma, dan Biofarma untuk penyediaan obat. Untuk sektor perbankan, Bank Himbara dan Bank BSI telah siap untuk membantu KDMP/KKMP dalam melaksanakan programnya seperti menjadi Payment Point Online Bank (PPOB).

KDMP/KKMP dapat menjalin Kerjasama dengan ID Food, Perkebunan Nusantara, Pupuk Indonesia, dari bidang usaha sektor pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi maupun non subsidi termasuk kebutuhan pertanian dan perkebunan lainnya. Selain itu, PT. Pusri berkomitmen mendukung suksesnya program KDMP/KKMP di Sumatera Selatan. PT. Pusri melalui program rumah BUMN Sumatera Selatan, aktif mendorong pemberdayaan UMKM dan generasi muda, serta mendukung Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) melalui kolaborasi dengan Bank BRI. PT. Pusri berkomitmen dalam penyediaan pupuk di lingkup Sumatera Selatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu koperasi yang telah mendapatkan dukungan oleh PT. Pusri adalah KDMP Mangunharjo di desa Mangunharjo

PT. Pos Indonesia, Nindya Karya, dan Pelindo ditugaskan untuk membantu KDMP/KKMP dari sektor logistik. KDMP/KKMP di sektor energi dapat menjalin kerja sama dengan PLN dan Pertamina untuk penjualan Gas Subsidi dan alat kelistrikan. Sedangkan pada sektor digital, PT. Telkom akan menjadi garda terdepan yang bekerja sama dengan KDMP/KKMP untuk

meningkatkan akses koperasi secara digital. Perum Bulog berkomitmen untuk mensuplai tiga komoditas pangan ke KDMP/KKMP Sumatera Selatan yakni beras, gula, dan minyak goreng. Selain jenis usaha tersebut diatas, KDMP/KKMP juga dapat bekerja sama dengan P.T Pertamina yang akan menyediakan Gas LPG, baik Gas LPG yang bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi.

3.2.2.4 Dukungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Provinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 5 September 2024, LPDB membuat Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan nota kesepahaman tersebut adalah memperkuat sinergi dalam pendampingan dan inkubasi koperasi dalam bentuk Unbara Business Park sebagai inkubator lokal. Dengan nota kesepahaman tersebut diharapkan KDMP/KKMP dapat mengembangkan kapabilitas kelembagaan dan mengakses pembiayaan dana bergulir lebih mudah. Pada tanggal 25 April 2025, LPDB mengadakan sosialisasi program nasional "Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih" termasuk didalamnya pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi KDMP/KKMP. LPDB berkomitmen memberikan pembiayaan kepada KDMP/KKMP dengan bunga 3% per tahun. Menindaklanjuti hal tersebut, salah satu KDMP di Sumatera Selatan mencoba mendapatkan pembiayaan LPDB, yaitu KDMP Babat di Kabupaten Muara Enim yang mengajukan pembiayaan senilai Rp.2,9 M.

3.2.3 Tantangan dalam Pengembangan Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan

Walaupun jumlah KDMP/KKMP di Sumatera Selatan telah mencapai 100% sesuai dengan jumlah kelurahan dan desa akan tetapi terdapat tantangan yang cukup signifikan dalam pengembangannya. Adapun kendala yang ada saat ini antara lain:

1. Perekrutan Pengurus dan Anggota KDMP

Dengan pembentukan KDMP/KKMP di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdapat masalah lanjutan berupa belum maksimalnya proses rekrutmen anggota koperasi. Selain itu terdapat penunjukan pengurus koperasi yang belum sesuai kompetensinya hal ini menyebabkan koperasi belum dapat bergerak cepat. Selain itu persyaratan legalitas yang masih belum lengkap dimana masih dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses administrasi legalitas koperasi.

2. Kapasitas/Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keterbatasan kemampuan pengurus dan pengelola koperasi menjadi kendala klasik. KDMP/KKMP didirikan dengan tenggat waktu yang relatif singkat, namun pengurusnya belum memiliki keahlian manajerial memadai. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kompetensi dalam hal pembukuan, manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, hingga inovasi bisnis. KDMP/KKMP seharusnya dikelola oleh SDM yang membutuhkan usaha dan memerlukan pelatihan SDM dari Dinas Koperasi UKM maupun dari koperasi yang telah menjalankan usaha secara profesional.

3. Sektor Usaha yang Terbatas

Struktur KDMP/KKMP Sumatera Selatan didominasi lini usaha simpan pinjam, yang meski bermanfaat memenuhi kebutuhan kredit mikro anggota, namun tidak banyak menyerap tenaga kerja baru. KDMP/KKMP diharuskan memiliki berbagai lini usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan berupa konsinyasi dengan



pihak pihak lain menjadi kendala bagi KDMP/KKMP di daerah hal ini terkait dengan belum adanya pengalaman.

4. Permodalan dan Akses Pembiayaan

Koperasi menghadapi kendala permodalan, terutama banyaknya lini yang ditentukan dalam jenis usaha KDMP/KKMP. Modal awal koperasi biasanya bersumber dari simpanan anggota yang terbatas jumlahnya. Untuk tumbuh, KDMP/KKMP memerlukan akses kredit/pembiayaan, namun tak semua KDMP/KKMP mampu memenuhi syarat perbankan. Meskipun ada LPDB dan CSR BUMN, masih banyak KDMP/KKMP di Sumatera Selatan yang belum memahami dan mengetahui skema berkenaan. Keterbatasan modal membuat aset stagnan dan banyak yang belum berani beroperasi.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Pemasaran Modern yang perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut

Di era digital, KDMP/KKMP diharapkan mampu mengelola dan mengadopsi teknologi informasi dalam operasionalnya. Beberapa BUMN menyediakan kerja sama usaha dengan menggunakan teknologi informasi atau aplikasi sebagai basis layanannya. Konsep aplikasi seperti yang dikeluarkan Telkom, PLN, Pos, maupun perbankan membutuhkan kemampuan pengurus dan pengelola KDMP/KKMP untuk selalu update terhadap perkembangan teknologi informasi. Literasi KDMP/KKMP kepada anggotanya untuk mengembangkan bisnis melalui e-commerce, branding, dan kemitraan perlu ditingkatkan. Rendahnya adopsi digital ini sebagian karena keterbatasan SDM serta belum meratanya infrastruktur pendukung (akses internet) di wilayah desa terpencil Sumatera Selatan. Keterbatasan pengetahuan juga menghambat penggunaan teknologi informasi.

6. Tantangan Kelembagaan di Tingkat Desa/Kelurahan

Meskipun di Sumatera Selatan terdapat ribuan desa/kelurahan, tidak semuanya memiliki koperasi aktif. Pendirian KDMP/KKMP di tingkat lokal masih menghadapi kendala seperti minimnya inisiatif masyarakat, kurangnya dukungan teknis, atau persaingan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang perannya hampir sama. Sinergi antara BUMDes, KUD, Koperasi non KDMP/KKMP dengan KDMP/KKMP belum terumuskan jelas, sehingga masih belum terbentuk sinergi diantara badan usaha tersebut. KDMP/KKMP yang dapat dipastikan aktivitasnya adalah empat KDMP yang menjadi mock up. Saat ini sedang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat mock up versi Sumatera Selatan dengan jumlah maksimal 5 KDMP setiap Pemda.

7. Regulasi dan Pengawasan

Di tengah upaya penguatan hukum, KDMP/KKMP masih memerlukan peraturan tambahan guna mempercepat proses pemenuhan modal. Selain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, juga masih diperlukan pengaturan lanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan. Selain itu diperlukan juga bentuk konsinyasi yang seragam untuk jenis usaha yang sama sehingga memiliki kemudahan dalam pengawasan. Misalnya kesepakatan konsinyasi penjualan beras antara Bulog dan koperasi, maka diperlukan pengaturan sehingga tidak terdapat perbedaan harga jual antar koperasi. Diperlukan juga SOP yang pasti dalam bidang usaha tertentu. Proses edukasi kepada pengurus dan anggota koperasi juga perlu dilakukan sehingga pengurus koperasi dapat melaksanakan kegiatan dengan tenang.

Berbagai tantangan di atas saling terkait dan membutuhkan strategi penanganan komprehensif yang melibatkan banyak pihak. Keberhasilan koperasi akan membuat dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah.

3.2.4 Strategi Pengembangan KDMP/KKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dan pelaku KDMP/KKMP di Sumatera Selatan telah dan perlu menerapkan berbagai strategi pengembangan. Upaya strategis yang ditempuh mencakup:

1. Peningkatan Pembinaan dan Pendampingan.

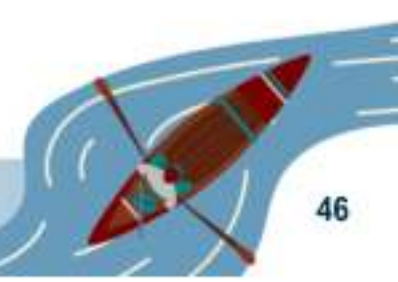
Pemerintah daerah secara simultan menggiatkan program pembinaan KDMP/KKMP di 17 kabupaten/kota. Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan secara berkala melakukan koordinasi dengan pemda-pemda terkait dan melakukan move ke beberapa KDMP/KKMP, terutama yang dinilai kurang aktif, untuk diberikan pendampingan. Materi pembinaan meliputi tata kelola organisasi, penyusunan laporan keuangan, sampai pada penyelenggaraan RAT. Pendampingan usaha diberikan agar KDMP/KKMP dapat menjalankan lini-lini usahanya secara simultan. Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan bertujuan memberdayakan koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Pemprov juga mendorong agar KDMP/KKMP segera mandiri dalam berusaha dengan membuat mock up/koperasi percontohan di seluruh Sumatera Selatan dengan target maksimal 5 KDMP/KKMP setiap pemda.

2. Mendorong Pengembangan Unit Usaha dan Inovasi Bisnis.

KDMP/KKMP didirikan dengan berbagai lini usaha dalam satu koperasi. Dalam hal ini pemerintah mendorong koperasi untuk tidak bergerak pada satu jenis usaha saja. Pengurus koperasi "dipaksa" melakukan pengembangan kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Contohnya, KDMP/KKMP selain memiliki lini simpan pinjam juga diharuskan mengelola lini usaha lain seperti usaha ritel (toko koperasi) atau penyediaan alat-alat pertanian. Dengan model ini, diharapkan KDMP/KKMP mampu menjadi salah satu penopang perekonomian di desa tersebut.

3. Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif dan Pengembangan Koperasi existing.

Dalam upaya pergerakan berbagai lini usaha, pembentukan KDMP/KKMP selain membangun koperasi baru juga dimungkinkan dengan pengembangan koperasi existing dan revitalisasi koperasi agar bisnis usaha koperasi dapat kembali sehat. KDMP/KKMP dalam berbagai lini usaha mampu membuat KDMP/KKMP menjadi salah satu penggerak ekonomi desa dan menjadi strategi "reformasi total koperasi". Koperasi tidak aktif didorong untuk revitalisasi melalui musyawarah anggota (RAT khusus) di desa/kelurahan. Bila masih memiliki potensi, koperasi tersebut dibangkitkan kembali dengan restrukturisasi pengurus atau penggabungan dengan koperasi lain. Sebaliknya, koperasi yang vakum/dorman diusulkan untuk dibubarkan sesuai prosedur agar tidak membebani statistik. Pemerintah provinsi sangat mendukung pembentukan KDMP/KKMP di setiap desa dan kelurahan sebagai suatu model koperasi yang dekat dengan kegiatan ekonomi dasar anggota koperasi.





4. Permodalan dan Akses Finansial.

Strategi lain adalah meningkatkan akses koperasi pada sumber modal. Pemprov Sumatera Selatan bekerja sama dengan LPDB-KUMKM untuk menjangkau koperasi potensial yang layak mendapat pinjaman dana bergulir. Koperasi juga difasilitasi dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kolektif bagi anggotanya. Sebagai contoh, KDMP yang berada di sektor pertanian didorong menjadi penyalur pupuk atau sarana produksi dengan dukungan kredit distributor, sehingga memperoleh margin usaha. Selain itu, terdapat inisiatif membentuk koperasi sekunder atau KDMP/KKMP yang dapat menghimpun modal lebih besar lintas koperasi. Koperasi sekunder tingkat provinsi dapat bertindak layaknya lembaga keuangan mikro skala besar yang melayani koperasi primer (misal menyediakan kredit antar koperasi). Dengan strategi ini, diharapkan koperasi kecil yang tergabung bisa mendapat permodalan yang lebih baik. Pemerintah pusat mendorong skema pembiayaan dengan penyaluran melalui bank Himbara.

5. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Koperasi.

Menyadari tantangan era 4.0, strategi digitalisasi koperasi gencar dilakukan. Advokasi dan pelatihan digitalisasi telah dijalankan di Sumatera Selatan untuk mengedukasi koperasi menggunakan aplikasi pembukuan, *platform marketplace*, hingga pembayaran digital. KDMP/KKMP di Palembang mulai mengembangkan sistem informasi keanggotaan dan mobile app untuk mempermudah anggota bertransaksi (misal aplikasi koperasi simpan pinjam untuk cek saldo dan pengajuan pinjaman online). Dinas Koperasi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Diskominfo melakukan bimbingan teknis IT bagi pengelola koperasi, sesuai arahan Gubernur bahwa koperasi Sumatera Selatan harus mengikuti perkembangan zaman agar bisa mensejahterakan anggotanya. Salah satu BUMN yang menyediakan aplikasi yang bermanfaat dalam pergerakan KDMP/KKMP adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom). Telkom berperan aktif dalam mendukung program strategis nasional KDMP/KKMP dengan menghadirkan Digi Koperasi, integrator yang menghubungkan antara koperasi, rantai pasok BUMN, akses ke pasar UMKM, hingga *dashboard* guna melakukan pemantauan kinerja koperasi. Dengan masuk ke ekosistem digital, koperasi diharapkan lebih inovatif, efisien, dan menarik minat generasi muda untuk bergabung.

6. Kemitraan dan Jaringan Usaha.

Strategi pengembangan juga mencakup menjalin kemitraan antara koperasi dengan berbagai pihak. Pemprov Sumatera Selatan memfasilitasi pertemuan koperasi dengan perusahaan swasta dan BUMN untuk membuka peluang kerja sama. Contohnya, koperasi petani karet difasilitasi bermitra dengan pabrik ban, koperasi produsen makanan tradisional diajak kerja sama dengan retail modern dan platform ekspor. Sinergi dan pemberdayaan UMKM melalui koperasi juga menjadi tujuan, karena koperasi bisa bertindak sebagai aggregator produk UMKM untuk menembus pasar yang lebih besar. Kemenkop UKM Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi kerja sama KDMP/KKMP dengan BUMN yang ditunjuk untuk mendukung KDMP/KKMP.

Strategi-strategi di atas, baik yang dijalankan pemerintah maupun internal koperasi, diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan koperasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Kunci utamanya adalah keberlanjutan

pendampingan dan konsistensi kebijakan pro-KDMP/KKMP, sehingga pada akhirnya KDMP/KKMP Sumatera Selatan mampu berperan sebagai penyokong ekonomi rakyat memiliki andil dalam pembangunan ekonomi daerah.

3.2.5 Rekomendasi: Peran Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dalam Pengembangan KDMP/KKMP di Daerah

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan KDMP/KKMP di daerah melalui perspektif fiskal. Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil DJPb dapat berkontribusi dengan langkah-langkah berikut:

1. Memastikan Efektivitas Penyaluran Dana APBN untuk KDMP/KKMP di Sumatera Selatan.

Kanwil DJPb berperan menyalurkan berbagai dana pusat ke daerah, termasuk DAK Non Fisik PK2UMKM dan dana dekonsentrasi Kemenkop UKM. Melalui Instruksi Presiden nomo 9 tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-9/MK/PK/2025, pembentukan KDMP/KKMP menjadi syarat wajib untuk penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah Surat pernyataan Komitmen Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Akta Pendirian KDMP/KKMP atau bukti penyampaian dokumen ke Notaris. Dokumen tersebut harus disiapkan pada saat pencairan dana desa Tahap II, apabila tidak terpenuhi, Dana Desa tidak dapat dicairkan di KPPN. DJPb Sumatera Selatan harus memastikan penyaluran dana tersebut tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam hal ini, KPPN sebagai garda depan pencairan Dana Desa lingkup Sumatera Selatan berkoordinasi secara intensif dengan pemda dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat KDMP/KKMP. KPPN melakukan verifikasi dokumen syarat salur Dana Desa, melakukan penyaluran Dana Desa, dan menjaga validitas data penyerapan Dana Desa. Kanwil DJPb bersama dengan KPPN dapat melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana tersebut bersama Pemda. Dengan memonitor realisasi anggaran pada dana desa, DJPb dapat mengidentifikasi kendala penyerapan anggaran dan membantu mencari solusi. Salah satu Langkah Kementerian Keuangan untuk memastikan KDMP/KKMP benar-benar berdiri di desa lingkup Sumatera Selatan.

2. Fasilitasi Sinergi Pelaksanaan KDMP/KKMP lintas Sektor.

Kanwil DJPb dapat menjadi fasilitator koordinasi lintas instansi di Sumatera Selatan. Misalnya, DJPb menginisiasi dalam Forum Koordinasi Pengembangan KUMKM yang melibatkan Bappeda, Dinas Koperasi, perbankan, dan lembaga pendanaan (LPDB, Jamkrida, dll). Dalam forum ini, Kanwil DJPb dapat menyajikan data fiskal (alokasi APBN dan APBD untuk KDMP) dan mendorong sinergi program. Contohnya, mendorong agar dana bergulir pusat (LPDB) dapat digunakan untuk pembiayaan KDMP/KKMP lingkup Sumatera Selatan. Dalam bentuk lain Kanwil DJPb dapat berkoordinasi dengan dinas Koperasi dan UKM Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk melakukan pendampingan dan atau pelatihan kepada pengelola KDMP/KKMP. Kanwil DJPb juga berkoordinasi dengan Bank Himbara penyalur pembiayaan KDMP agar meningkatkan sosialisasi ke KDMP/KKMP agar lebih memahami persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka mendapatkan pembiayaan. Melalui *Kemenkeu One* di daerah, Kanwil DJPb bersama unit Kemenkeu lain (Kanwil



Ditjen Pajak, Bea Cukai, DJKN maupun BDK) dapat mendukung KDMP antara lain melalui sosialisasi insentif pajak, koordinasi dengan UMKM binaan Kementerian Keuangan regional Sumatera Selatan, dan pelatihan mengenai pengelolaan dana untuk KDMP/KKMP atau fasilitasi ekspor produk KDMP/KKMP.

3. **Pendekatan Kebijakan Berbasis Data (*Data-Driven Policy*).** DJPb memiliki akses pada berbagai data keuangan negara. Kanwil DJPb Sumatera Selatan dapat menyusun analisis fiskal regional tematik (seperti laporan ini) secara rutin mengenai koperasi dan UMKM. Hasil analisis, lengkap dengan data capaian dan kendala, dapat disampaikan ke pemerintah daerah sebagai masukan perumusan kebijakan. Misalnya, jika data menunjukkan dukungan APBD untuk KDMP/KKMP di beberapa kabupaten masih sangat kecil, DJPb bisa merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Begitu pula, jika realisasi DAK PK2UMKM rendah karena SDM pelaksana kurang, DJPb bisa mengusulkan pelatihan bagi pengelola dana. Apabila Dana Desa Tahap II belum bisa terealisasi maksimal karena Kendali KDMP/KKMP, Kanwil dapat Bersama sama dengan pemda terkait untuk Bersama-sama mencari solusi. Dengan data yang kuat, Kanwil DJPb dapat menjadi advisor fiskal bagi Pemda untuk memperkuat program pemberdayaan KDMP/KKMP.

4. **Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan KDMP/KKMP.**

Tugas utama DJPb adalah terkait pengelolaan keuangan negara, namun DJPb dapat berkontribusi secara tidak langsung pada KDMP/KKMP melalui *capacity building*. Kanwil DJPb dapat bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan KUMK mengadakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan akuntabilitas untuk pengurus KDMP/KKMP. Materi seperti penyusunan laporan keuangan sederhana, pengelolaan kas, sampai pada pengelolaan kredit dapat diberikan oleh ASN Kemenkeu atau praktisi yang difasilitasi oleh DJPb. Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan peran KDMP menuju penyangga ekonomi desa yang mandiri.

5. **Mendorong Pemanfaatan Produk/Peran Koperasi dalam Belanja Pemerintah.**

Kanwil DJPb dapat mengidentifikasi peluang keterlibatan KDMP/KKMP dalam belanja negara/daerah. Koordinasi dengan KDMP/KKMP untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia barang/jasa untuk pengadaan pemerintah skala UKM (e-catalog lokal bisa diisi produk UMKM dari KDMP/KKMP). Sosialisasi kepada KDMP/KKMP untuk bersiap apabila ada program penyaluran bantuan sosial atau kredit ultra mikro di lingkup Sumatera Selatan juga perlu dilaksanakan, dan secara berkala berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM perihal kemungkinan KDMP dilibatkan sebagai penyalur (dengan koordinasi instansi terkait). Selain itu, dapat juga dengan membantu mempromosikan produk unggulan KDMP Sumatera Selatan (hasil kerajinan, pertanian, dll) dalam event Kemenkeu Satu atau pameran yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, hal ini semakin memperluas gerak UMKM di lingkup Sumatera Selatan.

6. **Penguatan Akuntabilitas dan Pelaporan pada KDMP/KKMP.**

Kanwil DJPb senantiasa mengawal pencairan dana desa dan selalu berkoordinasi dengan pemda terkait demi kelancaran pencairan dana desa. Didalam dana desa tersebut, ada item KDMP/KKMP yang harus dikawal. Kanwil DJPb dapat menularkan praktik baik ini ke

pengelolaan keuangan koperasi daerah. Misalnya, mendorong Pemda untuk mewajibkan KDMP/KKMP penerima hibah bantuan modal melaporkan penggunaan dana secara transparan dan KDMP/KKMP yang melakukan peminjaman ke perbankan atau LPDB di edukasi untuk lancar dalam pembayaran kreditnya.

Secara keseluruhan, Kanwil DJPb Sumatera Selatan dapat berperan untuk menjembatani kebijakan fiskal dengan pengembangan KDMP/KKMP. Kolaborasi erat dengan Dinas Koperasi, Kanwil Kemenkop UKM, dan stakeholder lainnya akan memaksimalkan dampak. Peran DJPb yang biasanya “di balik layar” dalam penyaluran dana, dapat ditingkatkan menjadi turut aktif memberi solusi atas hambatan penyerapan anggaran dan efektivitas program koperasi. Dengan demikian, dukungan fiskal yang tersedia bagi koperasi dapat dioptimalkan untuk mendorong kebangkitan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Sumatera Selatan.

3.2.6 Potensi Pengembangan KDMP/KKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 3.258 desa/kelurahan dengan berbagai potensi ekonomi lokal, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga kerajinan. Potensi setiap daerah dapat dikembangkan melalui kelembagaan koperasi di tingkat desa/kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Arah pengembangan KDMP/KKMP yang dapat dimaksimalkan dibagi menjadi empat bidang utama yakni kelembagaan, usaha, kemitraan, dan teknologi. Beberapa arah pengembangan KDMP/KKMP yang dapat dioptimalkan antara lain:

1. **Penguatan Kelembagaan KDMP/KKMP.**

Desa-desanya di Sumatera Selatan awal mulanya pernah memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) yang melayani kebutuhan petani (distribusi pupuk, pinjaman, pemasaran hasil panen). Potensi ini bisa dihidupkan kembali dengan model baru yang lebih modern dan serba guna. Model baru yang diinisiasi pemerintah adalah KDMP/KKMP. Penguatan koperasi dengan model KDMP/KKMP yang bergerak di beberapa usaha lini, tidak seperti model koperasi sebelumnya yang bergerak di satu atau dua lini. Kapasitas SDM KDMP/KKMP otomatis harus ditingkatkan dengan pelatihan manajemen, pelatihan pembukuan koperasi, maupun pelatihan pemasaran digital. Langkah berikutnya adalah perbaikan tata Kelola pada KDMP. Dalam diri KDMP/KKMP, hal yang krusial adalah RAT. RAT diupayakan dilaksanakan tepat waktu karena ini berhubungan dengan laporan SHU untuk anggota KDMP/KKMP. RAT ini berhubungan dengan transparansi laporan KDMP/KKMP. Ketika laporan keuangan KDMP/KKMP dinilai transparan oleh anggota koperasi, KDMP/KKMP akan semakin maju. Sebagai ketua pengawas, kepala desa wajib mengawasi KDMP/KKMP secara aktif agar pelaksanaan operasional KDMP/KKMP dapat dipertanggungjawabkan. Dibuat *road map* untuk kaderisasi pengurus KDMP/KKMP agar terjadi kesinambungan visi dan misi KDMP/KKMP sampai kurun waktu yang lama. Nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus selalu melekat pada nama koperasi KDMP/KKMP karena KDMP/KKMP ini adalah branding koperasi nasional yang selalu berada di antara rakyat.

2. **Diversifikasi dan Inovasi Usaha KDMP/KKMP.**

Setiap desa/kelurahan di Sumatera Selatan umumnya memiliki produk unggulan atau komoditas khas sehingga





membuka peluang untuk mendirikan lini usaha KDMP/KKMP sesuai komoditas. KDMP/KKMP memiliki keunggulan support penuh dari pemerintah, BUMN, dan BLU. KDMP/KKMP harus bisa memanfaatkan dukungan dari BUMN dan juga harus menggunakan basis digital untuk lini usaha simpan pinjam. Dengan akses digital tersebut, diharapkan anggota sudah bisa mengakses modal. KDMP/KKMP diharapkan bisa menjadi distributor antara produsen dan konsumen di pasar. Penjualan bahan hasil warga desa bisa dikumpulkan di koperasi dan oleh koperasi bisa dihubungkan ke konsumen. Hal ini akan memangkas rantai distribusi yang panjang.

3. Optimalisasi Kemitraan.

Beberapa desa kini sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan berdasarkan UU Desa. KDMP dapat bersinergi bersama dengan BUMDes dalam mengelola perkembangan ekonomi desa. BUMDes dapat fokus pada usaha komersial milik pemerintah desa, sedangkan KDMP/KKMP menjadi milik warga/anggota yang melayani kebutuhan ekonomi anggota. Kerja sama dengan BUMN juga harus dapat dioptimalkan, seperti penyediaan gas bersubsidi dan gas non subsidi yang terjamin ketersediannya oleh Pertamina. Suplai logistik yang dapat dipastikan waktunya oleh Pelindo dan Pos. Dan diharapkan kedepannya pendanaan UMI dan KUR dapat disalurkan melalui KDMP/KKMP dengan kerja sama dari Bank Himbara, Pegadaian, atau PMN. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa diharapkan dapat memberi dukungan regulasi dalam pengembangan KDMP/KKMP dan pengembangan program pemberdayaan.

4. Transformasi Digital pada KDMP/KKMP.

Selain koperasi sektor riil, kebutuhan permodalan mikro di pedesaan bisa diatasi dengan mendirikan juga lini usaha simpan pinjam atau lini usaha jasa keuangan mikro. Untuk pembayaran digital menggunakan aplikasi untuk memudahkan transaksi antar anggota dan mitra KDMP/KKMP. Untuk manajemen kerja KDMP/KKMP seperti pencatatan akuntansi, stok barang, dan data anggota, pengurus ditingkatkan dengan metode sistem manajemen KDMP/KKMP berbasis online. KDMP/KKMP bisa menggunakan platform *e-commerce* untuk menjual produk yang tersedia. Dengan penggunaan *e-commerce*, pangsa pasar menjadi lebih luas dan dapat menggunakan basis media sosial dalam melakukan promosi.

5. Strategi lima tahun KDMP/KKMP.

Agar KDMP/KKMP dapat berjalan berkelanjutan, diperlukan kader penggerak di tingkat lingkungan desa tersebut. Potensi pemuda desa, terutama yang kembali ke desa dapat diarahkan menjadi penggerak utama koperasi. Pemerintah desa dapat melibatkan Karang Taruna atau pemuda setempat dalam kepengurusan koperasi, sehingga terjadi regenerasi. Dengan penguatan kader KDMP/KKMP akan mampu memetakan arah koperasi minimal dalam lima tahun kedepan. Untuk 1-2 tahun, KDMP/KKMP fokus pada penguatan kelembagaan dan pengelolaan usaha inti (pangan dan simpan pinjam). Menginjak tahun ketiga KDMP/KKMP mulai melakukan diversifikasi usaha dan perluasan pangsa pasar. Pada tahun keempat KDMP/KKMP melakukan implementasi penuh pada system digital dan melakukan perluasan kemitraan nasional baik dengan BUMN, UMKM, maupun perusahaan swasta. Menginjak tahun kelima KDMP/KKMP menjadi pusat distribusi dan produksi di area desa berkenaan dengan pangsa pasar berskala nasional/provinsi.

Melihat berbagai inisiatif tersebut, jelas bahwa pengembangan KDMP/KKMP di level desa/kelurahan merupakan kunci pemberdayaan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemprov Sumatera Selatan sendiri telah menyatakan dukungannya, antara lain dengan launching program “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” yang melibatkan konsorsium dan BUMN. Hal ini menunjukkan model pemberdayaan berbasis komunitas (desa, pesantren, kelompok tani) melalui koperasi mulai digalakkan. Untuk memaksimalkan potensi ini, perlu kesinambungan kebijakan: regulasi yang memudahkan untuk pergerakan KDMP/KKMP, alokasi Dana Desa yang dapat digunakan untuk pengelolaan KDMP/KKMP dan sebagai jaminan pembiayaan KDMP/KKMP, serta pendampingan intensif pasca pembentukan oleh salah satu instansi, seperti Dinas Koperasi dan UKM. Jika setiap desa di Sumatera Selatan memiliki satu KDMP/KKMP yang dikelola baik, akan mempermudah penguatan ekonomi desa yang akan menjadi penguatan sektor pangan, dan gizi dari sektor terkecil. Dengan terbentuknya kekuatan ekonomi di tiap desa, akan menjadi jaringan ekonomi kerakyatan yang kokoh, desa yang mandiri baik dari segi ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat akan lebih mudah tercapai dan ketimpangan ekonomi antar desa akan tidak begitu terasa.





04

Kesimpulan dan Rekomendasi



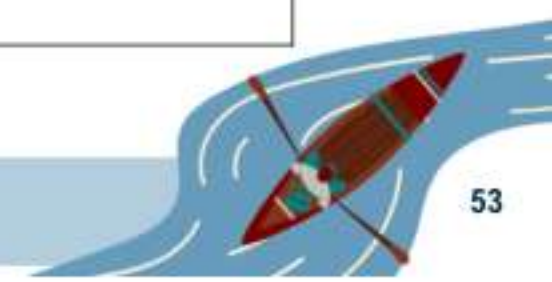


Kesimpulan	Rekomendasi
I. Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Regional	
1. Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh lebih tinggi dari nasional, didorong oleh kuatnya konsumsi domestik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42% (yoy) pada Triwulan II 2025 merupakan yang tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Akselerasi ini dipicu oleh momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha, libur sekolah, dan kenaikan daya beli masyarakat, yang terefleksi pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan mobilitas wisatawan nusantara. Namun demikian, konsumsi pemerintah masih terkontraksi akibat masih lambatnya realisasi belanja barang dan belanja modal, sehingga belum mampu berperan optimal dalam menopang pemulihan. 2. Kinerja ekspor melandai namun tetap menopang sektor eksternal, dengan surplus perdagangan yang masih kuat. Nilai ekspor luar negeri mengalami koreksi akibat turunnya harga dan volume ekspor batubara, pulp, dan CPO. Sementara impor barang modal juga melemah, mencerminkan normalisasi investasi sektor produktif. Struktur ekspor masih sangat bergantung pada Tiongkok dan India, yang menimbulkan risiko eksposur terhadap ketegangan dagang dan fluktuasi global. 3. Kinerja PDRB Lapangan usaha utama mengalami penguatan luas, dengan <i>leading</i> sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Sektor pertambangan tumbuh stabil seiring ekspor batubara yang masih tinggi. Industri pengolahan dan perdagangan meningkat didorong lonjakan produksi olahan sawit dan konsumsi domestik. Sektor konstruksi <i>rebound</i> tajam, mencerminkan mulai bergeraknya proyek infrastruktur dan realisasi belanja modal pemerintah. Namun, sektor pertanian mengalami perlambatan dan mengalami tekanan terhadap kesejahteraan petani akibat turunnya harga komoditas unggulan dan NTP yang mulai melemah. 4. Inflasi mulai meningkat tetapi tetap terkendali, namun tekanan struktural masih kuat. Inflasi tahunan per Juni 2025 tercatat 2,44% (yoy), tertinggi di Pulau Sumatera, terutama didorong oleh lonjakan harga emas perhiasan serta komoditas pangan strategis seperti beras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Tekanan inflasi Sumsel sangat dipengaruhi oleh gejolak global, ketidakseimbangan pasokan domestik, serta efek HBKN dan libur sekolah. Ketimpangan spasial menunjukkan daerah seperti Muara Enim dan OKI lebih rentan terhadap tekanan inflasi dibanding Lubuk Linggau atau Palembang. 5. Tantangan struktural masih membayangi Sumsel ke depan, baik di sisi harga, investasi, maupun daya dorong fiskal. Di sisi pangan, harga beras, bawang merah, cabai merah, dan daging ayam ras diperkirakan mengalami kenaikan tajam akibat faktor musiman, rendahnya produktivitas pertanian, defisit neraca konsumsi, dan keterbatasan input produksi. Sementara itu, tekanan <i>administered price</i> diperkirakan meningkat akibat kenaikan harga LPG 3 kg dan rencana penyesuaian tarif ojek <i>online</i>. Selain itu, realisasi belanja modal pemerintah yang belum optimal dipengaruhi kebijakan efisiensi menyebabkan tertundanya sejumlah proyek infrastruktur strategis. Kondisi ini berdampak pada lemahnya akselerasi	1. Penguatan eksekusi fiskal pada paruh kedua 2025. Pemerintah pusat dan daerah disarankan memfokuskan penyerapan di Semester II pada belanja modal bernilai tambah (infrastruktur dasar, konektivitas, layanan publik) dengan realokasi dari pos non-prioritas dan penyelesaian paket pekerjaan yang telah siap secara teknis, agar kontraksi konsumsi pemerintah tidak berlanjut dan <i>multiplier</i> fiskal kembali mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel. 2. Pengendalian inflasi pangan berbasis 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) pada komoditas terarah. Untuk beras, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras, diperlukan penebalan stok daerah, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta penguatan ekosistem <i>cold chain</i> dan logistik antarkabupaten. Langkah ini sekaligus diharapkan dapat meredam kesenjangan spasial (khususnya Muara Enim dan OKI) dan menjaga inflasi <i>volatile food</i> tetap dalam koridor target. 3. Akselerasi PMTB melalui <i>creative financing</i> berbasis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemda Sumsel dapat mengalihkan proyek-proyek prioritas ke skema KPBU dengan kombinasi <i>availability payment</i> dan <i>user charge</i>, dilengkapi dukungan <i>Viability Gap Fund</i> (VGF) agar <i>bankable</i>. Dengan demikian, percepatan infrastruktur tidak bergantung pada ruang anggaran pemerintah yang terbatas namun tetap menjaga kesinambungan arus kas dan dampak PMTB. 4. Perluasan diversifikasi pasar ekspor dan konektivitas logistik. Dominasi ekspor Sumsel ke Tiongkok dan India perlu diimbangi dengan penetrasi ke pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah melalui misi dagang terarah, <i>buyer matching</i>, dan pendampingan. Dukungan terhadap percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat, konektivitas jalur logistik, dan efisiensi layanan kepabeanan juga perlu diperkuat untuk penguatan ekosistem ekspor Sumsel ke depan. 5. Perlindungan pendapatan petani dan stabilisasi harga komoditas pangan. Pemerintah daerah perlu untuk memfasilitasi skema <i>off-take/contract farming</i> hortikultura dengan <i>offtaker</i>. Selain itu, diperlukan penguatan <i>buffer stock</i> komoditas volatil melalui <i>cold chain</i> dan subsidi resi gudang (SRG) agar petani dapat menunda penjualan ketika harga jatuh. Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster berbasis <i>offtaker</i> juga diperlukan dalam pengelolaan modal kerja. 6. Pemulihan ekosistem pariwisata dan akomodasi formal. Dengan mobilitas dan wisnus yang menguat namun TPK belum pulih penuh, diperlukan kurasi kalender event lintas musim, paket destinasi-kuliner dengan mitra maskapai/<i>Travel Agent</i>, serta peningkatan amenities di kota tujuan utama agar belanja wisata dapat mendorong sektor akomodasi serta makanan dan minuman. 7. Penguatan tata kelola data harga-logistik untuk respons kebijakan cepat. Dibutuhkan satu platform informasi terpadu (harga, stok, arus barang, bongkar-muat) yang menjadi rujukan TPID Sumsel dalam pengambilan keputusan. <i>Early-warning System</i> berbasis data ini penting untuk mempercepat intervensi saat terjadi



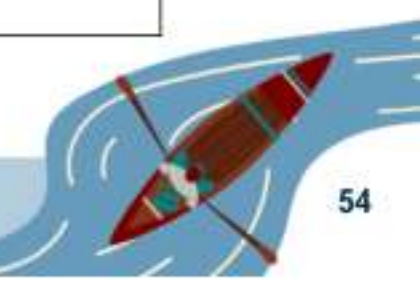


Kesimpulan	Rekomendasi
investasi fisik dan menurunnya <i>multiplier effect</i> fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, 6. Pasar tenaga kerja Sumsel membaik, tercermin dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), penurunan setengah pengangguran, serta perbaikan kualitas kerja. Sementara itu, meskipun tingkat kemiskinan dan gini rasio mengalami perbaikan secara regional, persentase penduduk miskin perkotaan (Maret 2025) mengalami sedikit kenaikan dibandingkan periode sebelumnya (September 2024). Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan yang mencerminkan melemahnya daya beli petani dan adanya inefisiensi usaha tani terutama bagi petani hortikultura dan perkebunan.	lonjakan harga komoditas pangan atau gangguan distribusi. 8. Intervensi yang lebih spesifik dan terfokus untuk mengatasi tantangan kemiskinan di wilayah perkotaan seperti urbanisasi, pengangguran, dan biaya hidup tinggi. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain: mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien untuk menekan harga, mendorong realisasi program perumahan terjangkau melalui KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) agar berjalan tepat guna dan tepat sasaran serta revitalisasi UMKM perkotaan untuk mengurangi tingkat pengangguran.
II. Perkembangan Fiskal Regional	
1. Kinerja fiskal di Sumatera Selatan menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Penerimaan negara mampu tumbuh secara positif, ditopang oleh kinerja perpajakan yang meningkat meskipun beberapa pos seperti Pajak Penghasilan (PPh 21 dan PPh Final) menurun. Di sisi lain, realisasi belanja negara sedikit terkonsentrasi karena adanya kebijakan efisiensi, khususnya pada belanja pemerintah pusat. Namun demikian, belanja daerah tetap tumbuh dan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan APBD di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Secara keseluruhan, pelaksanaan APBN dan APBD masih berada pada jalur yang tepat meskipun perlu diwaspadai beberapa tantangan ke depan. 2. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 berdampak pada Belanja APBN di Triwulan II 2025 yang mengalami kontraksi dibanding periode tahun sebelumnya karena adanya pemotongan dan pengalihan anggaran langsung kepada program-program prioritas serta blokir anggaran sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut. Di sisi lain pada Penerimaan PNPB juga mengalami kontraksi khususnya pada PNPB BLU Pendidikan karena perubahan status Universitas Sriwijaya yang sebelumnya sebagai Satker BLU menjadi PTNBH. Namun, secara keseluruhan PNPB mengalami pertumbuhan apabila mengecualikan nilai PNPB BLU Universitas Sriwijaya. 3. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Sumsel masih menghadapi beberapa tantangan, yang pertama pada penyaluran DBH seperti keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi pajak dan kurang pahamiannya Pemda terkait kebijakan penyaluran DBH melalui <i>Treasury Deposit Facility</i>. Kedua pada penyaluran DAU, seperti belum terdapat salur DAU PPPK pada Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan keterlambatan BKD Sumsel dalam merekam data PPPK dan masih terbatasnya kapasitas SDM di kelurahan untuk mengelola DAU Pendanaan Kelurahan. Ketiga, pada penyaluran DAK Fisik masih kurangnya koordinasi internal antara Pemda dan BPKAD sehingga melambat penyaluran DAK Fisik. Dan yang terakhir, kendala pemahaman aplikasi OMSPAN TKD,	1. Perlunya meningkatkan penerimaan komponen PPh Final sebagai kontribusi penerimaan melalui kerja sama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. Misalnya untuk menggali potensi penerimaan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat proaktif melakukan penelitian terhadap nilai pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota di lingkup Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan menyandingkannya dengan keesuaian data pembayaran PPh yang semestinya disetorkan oleh wajib pajak tersebut. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari adanya kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan melalui perjanjian kerja sama (PKS) optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian ketepatan nilai setor PPh wajib pajak juga tidak terbatas pada pajak restoran. Namun juga melalui pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain yang datanya terakomodir di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Data-data tersebut dapat menunjukkan nilai-nilai yang sebenarnya dari kinerja atau omzet perusahaan (badan) atau nilai perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan, dari sisi perseorangan dapat menunjukkan harta kekayaan yang sebenarnya. 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lingkup Wilayah Sumatera Selatan juga dapat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyetoran dan pelaporan SPT Masa oleh pemerintah secara bulanan sebagai upaya untuk meningkatkan PPh 21. Kegiatan dapat dilakukan dengan program ST yaitu tepat subjek, tepat objek, tepat tarif, tepat setor, dan tepat lapor. Manfaat daripada pengawasan administrasi PPh 21 ini bukan hanya bermanfaat bagi penerimaan pajak pusat saja, Pemerintah Daerah Sumatera Selatan juga dapat menerima manfaatnya melalui dana bagi hasil yang akan diterima, salah satu syarat agar dana bagi hasil yang diterima lebih banyak adalah mengenai administrasi penyetoran dan pelaporan SPT masa di lingkup wilayah kerja Sumatera Selatan melalui kegiatan rekonsiliasi pajak pusat dan daerah.





Kesimpulan	Rekomendasi
terlambatnya pemenuhan syarat salur, dan isu terkait interkoneksi aplikasi yang mempengaruhi penyaluran dana desa. - Kinerja APBD di Sumsel di Triwulan II 2025 tetap berkinerja baik dengan pertumbuhan di sisi PAD. Pertumbuhan PAD mencapai 81,97% (yoy) atau 41,95% dari target, terutama dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdorong oleh implementasi UU No 1 Tahun 2022. Ini menunjukkan potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer jika pengelolaan PAD terus diperkuat. - Ketergantungan pada Dana Transfer Masih Tinggi, Kemandirian Fiskal belum mandiri. Meskipun pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan, sebagian besar pemerintah daerah di Sumatera Selatan masih bergantung pada dana transfer. Hingga Juni 2025, 16 dari 18 daerah tergolong "Belum Mandiri", menandakan perlunya strategi peningkatan PAD untuk memperkuat otonomi fiskal. - Realisasi belanja daerah perlu dipercepat dan dioptimalkan. Belanja daerah masih terkontraksi, dengan realisasi hanya 28,56% hingga Triwulan II. Sementara pembiayaan daerah khususnya penggunaan silpa menunjukkan realisasi tinggi. Optimalisasi belanja menjadi kunci agar program pembangunan berjalan sesuai rencana. - Terkait perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan masih terdapat kendala yaitu isu kualitas makanan yang disajikan dimana pada Kabupaten PALI 174 siswa mengalami keracunan. Badan Gizi Nasional. Sebagai tindak lanjut, Badan Gizi Nasional menerapkan 4 langkah untuk mencegah kejadian terulang yaitu penerapan protokol keamanan saat pengantaran dari dapur ke sekolah, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan, memperketat mekanisme distribusi di sekolah dan menetapkan kewajiban uji <i>organoleptik</i> (tampilan, rasa, aroma dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.	- Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Belanja Pemerintah: Kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah melalui blokir anggaran di Triwulan I tahun 2025 perlu diiringi dengan monitoring atas ketercapaian output belanja pemerintah. Dalam hal nantinya berdasarkan monitoring diketahui bahwa dengan adanya blokir anggaran namun output masih dapat tetap tercapai maka kebijakan blokir pagu anggaran dapat ditindaklanjuti dengan merelokasi anggaran yang diblokir untuk dialokasikan pada belanja lain yang lebih prioritas. Sedangkan dari sisi penerimaan PNBPN perlu dilakukan optimalisasi penerimaan PNBPN dari sumber-sumber lain selain penerimaan PNBPN K/L salah satunya dengan upaya peningkatan PNBPN dari Sumber Daya Alam yang banyak tersedia di Wilayah Sumsel. - Percepatan Belanja Daerah: BPKAD dan BAPPEDA mendorong OPD terkait untuk merealisasikan belanja daerah agar tidak terdapat program pembangunan yang tertunda. Koordinasi dengan OPD perlu dilakukan dalam hal mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran; - Optimalisasi PAD: Pemda memperluas basis pajak dan retribusi daerah melalui layanan dan pemutakhiran data objek pajak dan melakukan evaluasi serta penguatan regulasi lokal yang mendukung pemungutan PAD. Selain itu pemda, perlu melakukan pencatatan hasil dividen pengelolaan kekayaan yang dipisahkan pada BUMD. - Pemenuhan syarat salur TKD tepat waktu: Pemda dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan dan KPPN di wilayah masing-masing terkait dengan pemenuhan syarat salur untuk menghindari penundaan penyaluran Transfer ke Daerah sehingga dapat berdampak kepada kemampuan daerah untuk melakukan belanja mengingat pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah di Sumsel. - Perlu adanya sinergi dan komunikasi antara Kepala Daerah, BPKAD dan OPD selaku pengelola keuangan/pengguna anggaran daerah untuk memprioritaskan kegiatan peningkatan pelayanan ke masyarakat. - Selain tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh BGN, diperlukan juga tindakan lain oleh BGN yaitu penekanan kepada SPPG untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan, melakukan peningkatan pengawasan terhadap SPPG terutama untuk pemilihan bahan baku yang berkualitas, waktu pemasakan yang efisien, pengiriman makanan yang tepat waktu dan tepat jumlah serta uji kelayakan sebelum makanan didistribusikan.
III. Peran dan Strategi Pengembangan KDMP/KKMP di Sumatera Selatan	
- Jumlah koperasi yang menjadi KDMP/KKMP Tahun 2025 berjumlah 3.258 yang tersebar di 17 Kabupaten dan Kota lingkup Sumatera Selatan. Dari 3.258 KDMP/KKMP terpilih 4 <i>mock up</i> yaitu KDMP Surya Adi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, KDMP Muara Beliti Baru di Kabupaten Musi Rawas, KKMP Mangun Harjo di Kabupaten Musi Rawas, dan KKMP Sukodadi di Kota Palembang. Pendirian KDMP/KKMP sejumlah 3.258 tersebut menyisakan tugas, kualitas tata kelola yang masih belum optimal. - Kapasitas/kompetensi pengelola/pengurus koperasi banyak yang belum memadai karena target pendirian KDMP/KKMP harus selesai, karena sebagai salah satu	- Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kerja sama untuk memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan, baik dari regulasi pemberdayaan, alokasi pada APBN/APBD, hingga bantuan pembiayaan yang menciptakan ekosistem kondusif bagi koperasi. Target Dinas Provinsi untuk membuat <i>mock up</i> lingkup Sumatera Selatan maksimal 5 KDMP/KKMP setiap Kabupaten/kota mudah-mudahan segera terealisasi. - Perlunya peningkatan pembinaan dan pendampingan dari berbagai sektor (Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BLU, maupun pihak swasta) agar kualitas/kompetensi SDM pengelola dapat meningkat





Kesimpulan	Rekomendasi
syarat salur untuk dana desa tahap II ditahun 2025. Hal ini membuat pengurus, dan pengawas sangat membutuhkan pendampingan agar dapat mengembangkan kompetensi untuk menjalankan KDMP/KKMP. 3. Sebelumnya, sektor usaha koperasi di Sumatera Selatan didominasi koperasi simpan pinjam (satu lini unit) sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja. KDMP/KKMP didirikan dengan memberikan berbagai layanan, sehingga dalam koperasi tersedia berbagai lini usaha.	dalam menjalankan usaha KDMP/KKMP secara kredibel dan akuntabel. 3. Perlu dukungan pembiayaan dan kerja sama dengan <i>supporting</i> (BUMN yang ditunjuk, BLU yang ditunjuk, atau pihak swasta) yang didampingi oleh Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi dan UKM Provinsi atau Kabupaten/Kota.





**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan**

Jl. Kapten A. Rivai No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135
Telp. (0711) 356534



djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/



@KanwilDJPbSumsel



@DJPbSumsel



@KanwilDJPbSumsel

ISSN 3047-0994



9

773047

099009